



**PEMERINTAH
KABUPATEN PESAWARAN**

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PESAWARAN

TAHUN ANGGARAN 2023



**KEMILAU
PESAWARAN**

TAHUN 2024

**Dr. H. DENDI RAMADHONA. K, S.T., M.Tr.IP
BUPATI PESAWARAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesawaran akhir Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan dan disusun dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesawaran disusun sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, serta mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan *Progress Report* dalam bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesawaran, khususnya terkait dengan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dicapai selama tahun 2023, sekaligus sebagai langkah nyata dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.

Demikian, semoga laporan ini dapat menjadi bahan informasi sekaligus sebagai salah satu bahan evaluasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesawaran di masa yang akan datang.

Gedong Tataan, Maret 2024

Bupati Pesawaran,

Dendi Ramadhona K



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 71 menyatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen anggaran tahunan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Menteri yang secara substansi memuat arah kebijakan umum Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama Tahun Anggaran 2023 maka dilakukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 dan

dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran.

1.1 Dasar Hukum

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran ini merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2023.

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

-
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 90);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 105);
26. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 592);
27. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 622);

1.2 Visi dan Misi Kabupaten Pesawaran

Pada bagian ini disajikan visi dan misi untuk pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026. Visi Misi yang menjadi dasar

dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021–2026.

1.2.1 Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode Tahun 2021-2026 adalah **“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif”**.

Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut:

Maju : Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.

Sejahtera : Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.

Masyarakat Produktif : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya di sekitarnya menuju kemandirian ekonomi.

1.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan kata lain sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan visi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu – isu strategis, faktor – faktor

faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut, untuk kemudian menetapkan Misi daerah sebagaimana diuraikan dibawah ini. Sebab pada dasarnya Misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi yang ditetapkan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

a. Misi 1 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, efektif, dan efisien yang memperluas jangkauan.

b. Misi 2 :

Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.

Misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah dengan menyediakan aksesibilitas dan konektivitas pada wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata, akses terhadap ketahanan air, dan akses terhadap infrastruktur dasar berkualitas yang berkeadilan dan merata dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

c. Misi 3 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.

Misi ini adalah upaya untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan gender, serta meningkatnya daya beli dan standar hidup layak masyarakat sehingga tercipta ketentraman, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

d. Misi 4 :

Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta nilai investasi pada sektor prioritas agribisnis, industri, dan pariwisata serta mempermudah dan menjamin iklim investasi di seluruh wilayah.

e. Misi 5 :

Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika

Misi ini untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa berbasis kemasyarakatan dan Potensi lokal yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

1.3 Data Umum Daerah

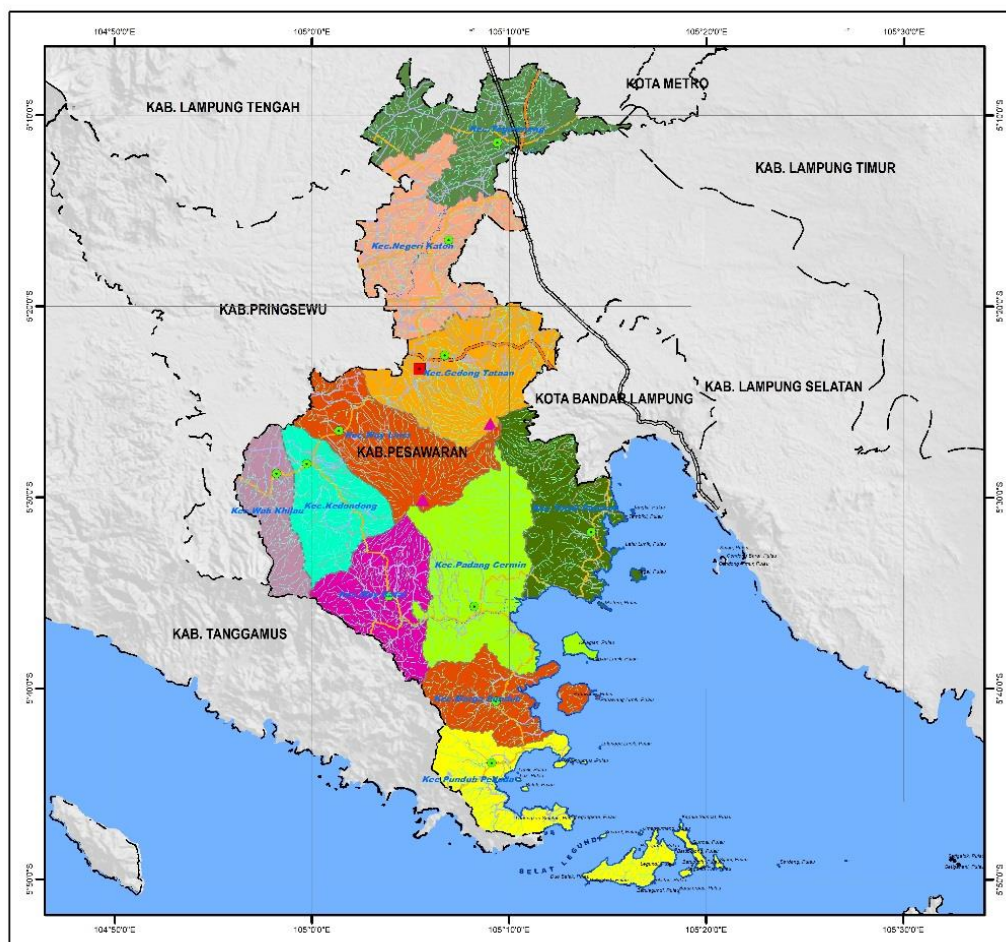
1.3.1 Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada kedudukan 104,92⁰-105,34⁰ Bujur Timur (BT) dan 5,12⁰ – 5,84⁰ Lintang Selatan (LS). Luas Kabupaten Pesawaran secara keseluruhan adalah 1.278,21 km² termasuk 38 pulau yang ada disekitarnya. Secara terperinci batas-batas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Bangunrejo, Bumi Ratu Nuban dan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kecamatan Kelumbayan dan Cukuh Balak (Kabupaten Tanggamus).
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Gadingrejo dan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu).
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung

Selatan), Kecamatan Kemiling dan Teluk Betung Barat (Kota Bandar Lampung).

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Pesawaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Pada awal terbentuknya, Kabupaten Pesawaran hanya terdiri dari tujuh Kecamatan dan seiring kebutuhan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sampai saat ini Kabupaten Pesawaran telah berkembang menjadi sebelas kecamatan. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Punduh Pedada	94,67	7,41
2	Marga Punduh	78,35	6,13
3	Padang Cermin	172,78	13,52
4	Teluk Pandan	118,77	9,29

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
5	Way Ratai	96,92	7,58
6	Kedondong	88,04	6,89
7	Way Khilau	62,20	4,87
8	Way Lima	128,00	10,01
9	Gedong Tataan	146,51	11,46
10	Negeri Katon	150,05	11,74
11	Tegineneng	141,90	11,10
	Jumlah	1.278,21	100

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Kecamatan Padang Cermin merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pesawaran dengan luas 172,78 km² atau persentase sebesar 13,52%, sedangkan Kecamatan Way Khilau memiliki luas wilayah terkecil seluas 62,20 km² dengan persentase 4,87% dari Luas Kabupaten Pesawaran yaitu 1.278,21 km².

Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan kecil sejumlah 38 pulau. Tiga pulau terbesar yaitu pulau Legundi, Pahawang dan Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga memiliki beberapa gunung dengan puncak tertinggi berada di Gunung Way Ratai dan Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 m dari permukaan laut. Adapun Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran
Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Punduh Pidada	7,41	29
2	Marga Punduh	6,13	2
3	Padang Cermin	13,52	2
4	Teluk Pandan	9,29	5
5	Way Ratai	7,58	–
6	Kedondong	6,89	–
7	Way Khilau	4,87	–
8	Way Lima	10,01	–
9	Gedong Tataan	11,46	–
10	Negeri Katon	11,74	–
11	Tegineneng	11,10	–
	Jumlah	100	38

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2024

1.3.2 Kondisi Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan kemiringan lerengnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 0 - 8 % dan > 40 %. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode interpolasi dapat diketahui sebagian wilayah merupakan wilayah berbukit terjal yang hampir tersebar di seluruh bagian wilayah. Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi lahan yang cukup datar berada di wilayah bagian utara. Kelerengan tanah menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Kelerengan Tanah menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Kelas Lereng (Ha)		Jumlah (Ha)	Persen (%)
		0-8%	>40%		
1.	Punduh Pedada	6.791	4.528	11.319	9,64
2.	Marga Punduh	4.440	6.660	11.100	9,46
3.	Padang Cermin	4.456	9.278	12.734	10,85
4.	Teluk Pandan	4.795	2.939	7.734	6,59
5.	Way Ratai	4.630	6.665	11.295	9,62
6.	Kedondong	4.690	2.010	6.700	5,71
7.	Way Khilau	2.884	3.527	6.411	5,46
8.	Way Lima	6.988,10	2.994,90	9.983	8,51
9.	Gedong Tataan	8.250,10	1.455,90	9.706	8,27
10.	Negeri Katon	13.742,10	1.526,90	15.269	13,01
11.	Tegineneng	12.857,10	2.268,90	15.126	12,89

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui luas wilayah dengan topografi 0-8% terbesar adalah sebesar 13.742,10 yang tersebar di wilayah Kecamatan Negeri Katon. Sedangkan topografi > 40 % terbesar adalah sebesar 9.278 yang tersebar di Kecamatan Padang Cermin. Adapun pengelompokkan luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- Kemiringan lereng 0 – 8% : 74.523,40 ha (63,49%).
- Kemiringan lereng > 40 % : 42853.60 ha (36,51%).

1.3.3 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Pesawaran memiliki iklim tropis, suhu rata-rata tahunan adalah 27,38°C dengan kelembapan udara 72,08% dan curah hujan rata-rata 129,41 mm/tahun, adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Mei. Berdasarkan data curah hujan pada Tabel 2.4, kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Pesawaran namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Kondisi Klimatologi

No	Bulan	Curah Hujan (mm/tahun)	Hari Hujan (hari)	Suhu Rata- rata (°C)	Kelembaban Rata-rata (%)
1	Januari	361,90	19,00	26,20	79,90
2	Februari	211,70	16,00	26,30	79,30
3	Maret	229,80	17,00	26,70	79,30
4	April	149,00	27,00	27,50	73,80
5	Mei	219,40	9,00	27,90	74,60
6	Juni	76,10	9,00	27,20	76,90
7	Juli	102,50	6,00	26,90	74,60
8	Agustus	7,80	2,00	27,00	69,10
9	September	2,00	1,00	27,70	58,40
10	Oktober	-	1,00	29,00	56,70
11	November	73,80	11,00	28,30	70,00
12	Desember	118,90	15,00	27,90	72,30

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2024

1.3.4 Kondisi Geologi

Secara geologi, wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa Formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuartar. Formasi Qhv (Batuan Gunung Api kuartar muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di wilayah Kecamatan Gedongtatan dan Way Lima. Di Kecamatan Padang Cermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian timur. Formasi Tov/Qvt (Batuan Gunung Api Kuartar tua) mendominasi wilayah Kecamatan Punduh Pedada. Formasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat dan selatan.

Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-

kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Formasi Qt (Endapan Fluvial) terdapat di timur wilayah Kecamatan Padang Cermin dan timur wilayah Kecamatan Punduh Pedada. Sementara formasi lainnya tersebar di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Tegineneng dan Punduh Pedada.

Untuk kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Pesawaran berkisar antara 30 – 100 cm. Kondisi ini dasarnya sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian baik lahan basah, lahan kering dan tanaman keras, karena kegiatan pertanian memerlukan kedalaman efektif tanah lebih besar dari 30 cm. Oleh sebab itu, khusus untuk tanaman pangan lahan basah dipersyaratkan pada kedalaman lebih dari 60 cm, sedangkan tanaman pangan lahan kering dan tanaman tahunan/keras cukup sesuai untuk kedalaman efektif tanah lebih dari 30 cm, dan untuk kedalaman tanah kurang dari 30 cm dapat dijadikan lahan konservasi.

Kedalaman efektif tanah > 90 cm, meliputi daerah-daerah lembah, bantaran sungai dan dataran banjir yang tersebar di Kabupaten Pesawaran. Kedalaman efektif tanah antara 30 – 90 cm, meliputi daerah-daerah yang berada disekitar perbukitan (Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh). Kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm meliputi sebagian daerah-daerah perbukitan yaitu Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh.

Tekstur tanah ikut menunjang bagi pertumbuhan tanaman dimana tanah yang teksturnya sedang sampai halus relatif lebih mudah diolah dengan kandungan unsur hara serta penyuburnya relatif terjaga. Kondisi tekstur tanah sedang sampai halus sangat cocok pembudidayaan tanaman lahan basah dan tanaman lahan kering sedangkan tekstur kasar lebih sesuai untuk tanaman keras/tahunan.

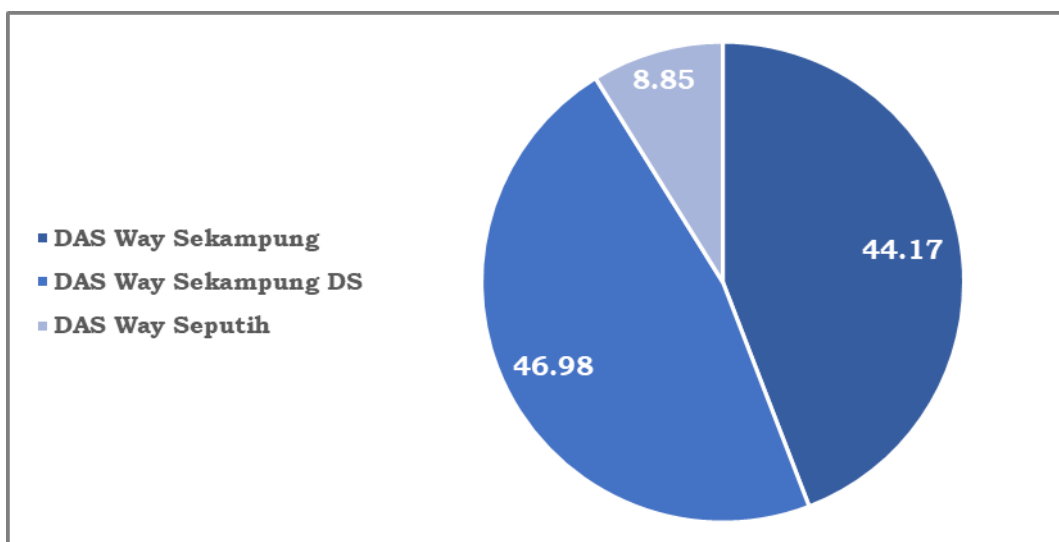
1.3.5 Kondisi Hidrologi

Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah di Kecamatan Gedong Tataan dengan panjang 53 km dan daerah aliran sungai seluas 135 km² dan sungai terpendek adalah sungai Way Kepayang di Kecamatan Kedondong dengan panjang 4 km. Bentuk morfologis, jenis batuan, proses-proses geomorfik serta keadaan tata air yang ada di Kabupaten

Pesawaran sangat menentukan pola drainasenya. Daerah pegunungan dan perbukitan yang pada umumnya mempunyai gradient yang cukup besar membentuk pola drainase dendritik, sedang di daerah dimana proses tektonik nyata mempunyai pola drainase rectangular. Daerah volkan dengan bentukan-bentukan kerucut yang masih utuh membentuk pola radial di daerah puncak dan lereng atas, sedang di lereng tengah dan bawah paralel dan sub-paralel.

Kabupaten Pesawaran dilintasi oleh dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Sekampung seluas 564,60 km² dan DAS Seputih seluas 113,60 km² serta DAS Sekampung DS seluas 600,55 km², sehingga Kabupaten Pesawaran memiliki potensi yang relatif besar, khususnya berupa ketersediaan air permukaan yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian, antara lain dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, budidaya perikanan air tawar, sarana penyediaan air bersih, dan sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat, dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), baik secara konvensional maupun inkonvensional, yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Gambar 1.2 Daerah Aliran Sungai (DAS)



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

1.3.6 Penggunaan Lahan

Aspek penting lainnya yang perlu diketahui dan digunakan sebagai bahan kajian adalah pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Hal ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi

kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran pada dasarnya masih didominasi oleh hutan, perkebunan, sawah dan semak belukar dengan masing-masing persentase mencapai 45,70%; 27,91%; 9,27%; dan 7,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian masyarakat masih berada pada sektor primer pertanian dan perkebunan sehingga masih banyak potensi lahan untuk pengembangan wilayah terbangun yang dapat menggeser sektor perekonomian primer ke sekunder (industrialisasi) untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Adapun karakteristik penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5 Karakteristik Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Belukar	93,64	7,33
2	Hamparan Pasir Pantai	0,01	0,00
3	Hutan Bakau	6,96	0,54
4	Hutan Campuran	584,11	45,70
5	Ladang	21,40	1,67
6	Pelabuhan antar pulau	0,02	0,00
7	Pemukaman Umum	0,14	0,01
8	Perkebunan	356,76	27,91
9	Permukiman	77,81	6,09
10	Rawa	0,01	0,00
11	Sawah	125,04	9,78
12	Sungai	2,62	0,20
13	Tambak Ikan	9,25	0,72
14	Tanah Kosong	0,31	0,02
15	Waduk	0,13	0,01
	Jumlah	1.278,21	

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

1.3.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-

aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah meliputi aspek letak wilayah (administratif dan geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan maupun kondisi geografi lainnya.

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039. Berdasarkan Perda dimaksud Kawasan Budidaya Kabupaten Pesawaran terdiri atas:

A. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan produksi Register 18 Tangkit Titi Bungur ditetapkan seluas kurang lebih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng.

B. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan. Kawasan tanaman pangan ditetapkan seluas lebih dari sama dengan 13.318 (tiga belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar yang tersebar di Kecamatan Kedondong, Punduh Pedada, Marga Punduh, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Way Khilau, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, dan Tegineneng. Kawasan hortikultura ditetapkan seluas

kurang lebih 13.849 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektar tersebar di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 13.847 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar yang tersebar pada peruntukkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan perkebunan ditetapkan seluas kurang lebih 47.414 (empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas) hektar tersebar di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada.

C. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budi daya, dan sarana penunjang perikanan. Kawasan perikanan tangkap berada di wilayah perairan Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh dan Punduh Pedada. Kawasan perikanan budi daya ditetapkan seluas kurang lebih 703 (tujuh ratus tiga) hektar yang tersebar di Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada. Adapun sarana untuk menunjang kegiatan perikanan berupa pelabuhan perikanan yang terdiri dari pelabuhan perikanan Durian dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Kecamatan Padang Cermin.

D. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi terdiri dari kawasan pertambangan mineral dan kawasan panas bumi. Kawasan pertambangan mineral meliputi :

- 1) Kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh dan Punduh Pedada;
- 2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada; dan
- 3) Kawasan pertambangan batuan berada di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada.

Adapun kawasan panas bumi sebagai potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berada di Kecamatan Way Ratai, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin.

E. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Kawasan industri ditetapkan seluas kurang lebih 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh satu) hektar yang berada di Kecamatan Tegineneng dan Teluk Pandan. Sedangkan sentra industri kecil dan menengah dikembangkan diseluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

F. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata ditetapkan seluas kurang 2.193 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar yang meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada dengan daya tarik wisata berupa wisata alam pesisir pantai, laut, air terjun, perbukitan, dan wisata buatan.

G. Kawasan Permukiman

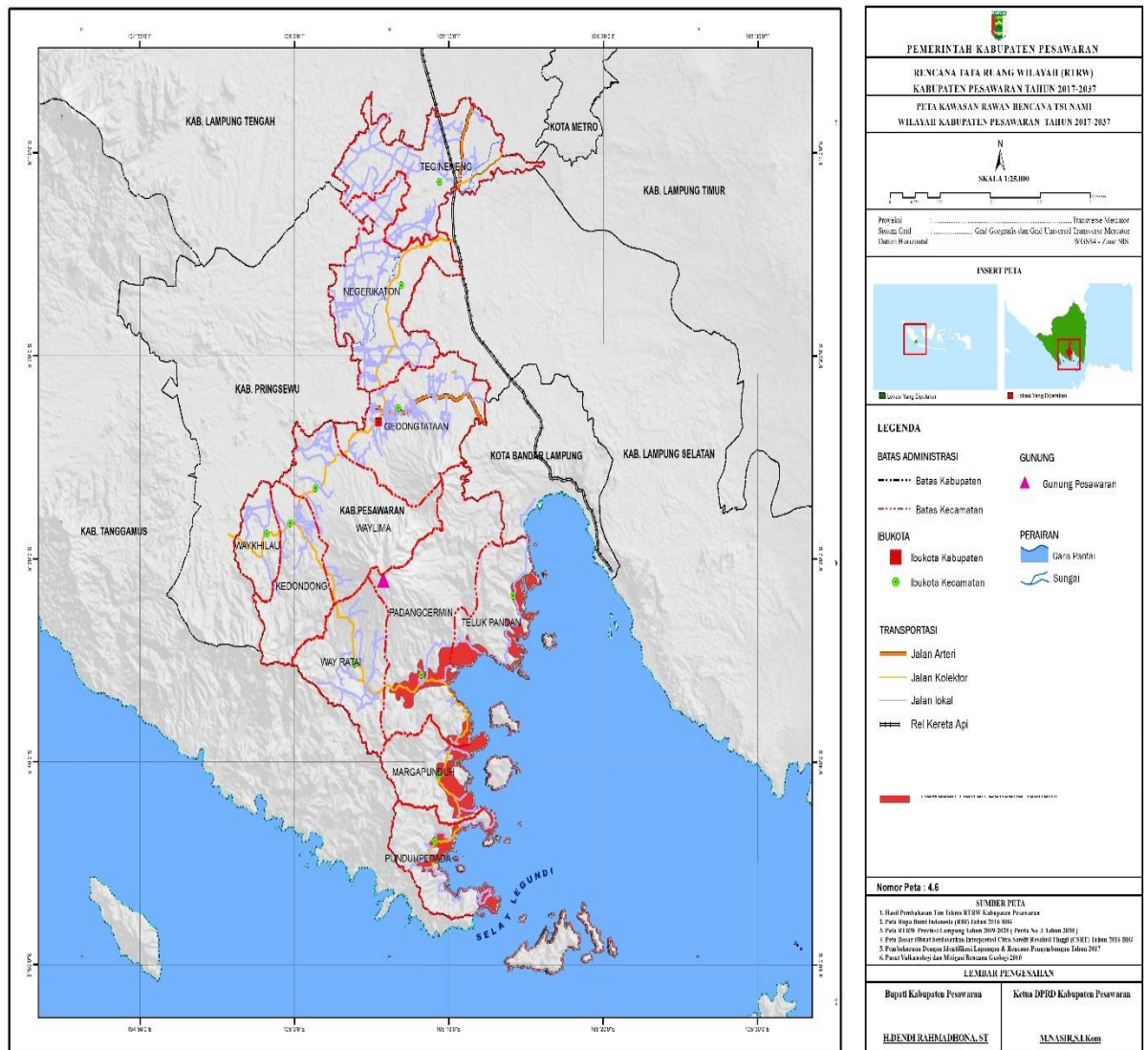
Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan pemukiman perkotaan ditetapkan seluas lebih kurang 7.758 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) hektar tersebar di pusat-pusat kegiatan di Kecamatan Gedong Tataan, Tegineneng, Negeri Katon, Padang Cermin, Teluk Pandan, Kedondong, Way Lima, dan Way Ratai. Sedangkan untuk kawasan pemukiman perdesaan ditetapkan seluas lebih kurang 3.147 (tiga ribu seratus empat puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada.

H. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- 1) Kawasan Terpadu Kepentingan Pertahanan dan Keamanan ditetapkan seluas kurang lebih 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar berada di Kecamatan Teluk Pandan dan Padang Cermin;
- 2) Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir di Kecamatan Padang Cermin;
- 3) Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Gedong Tataan;
- 4) Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Gedong Tataan;
- 5) Kompi Senapan A Batalyon 143 di Kecamatan Gedong Tataan;
- 6) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan
- 7) Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan.

Gambar 1.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

1.3.9 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada semester I tahun 2023 sebanyak 485.671 jiwa yang terdiri atas 249.458 laki-laki dan 236.213 perempuan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran tahun 2023 mencapai 379,96 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Gedong Tataan

dengan kepadatan sebesar 732,49 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Punduh Pidada sebesar 164,08 jiwa/km².

Masyarakat Kabupaten Pesawaran merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tionghoa, Bugis, dan beberapa suku dari wilayah kepulauan Indonesia lainnya. Adapun jumlah penduduk, distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk Semester I tahun 2020 menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 1.6 Jumlah penduduk, distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk Semester I tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1.	Punduh Pidada	15.533	3,20	164,08
2.	Marga Punduh	15.616	3,22	199,31
3.	Padang Cermin	29.280	6,03	169,46
4.	Teluk Pandan	38.599	7,95	324,99
5.	Way Ratai	36.016	7,42	371,61
6.	Kedondong	39.089	8,05	443,99
7.	Way Khilau	31.606	6,51	508,14
8.	Way Lima	38.721	7,97	302,51
9.	Gedong Tataan	107.317	22,10	732,49
10.	Negeri Katon	74.036	15,24	493,41
11.	Tegineneng	59.858	12,32	421,83
PESAWARAN		485.671	100	379,96

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2024

1.3.10 Pertumbuhan Penduduk

Peningkatan jumlah penduduk utamanya dipengaruhi oleh migrasi masuk dan tingkat kelahiran. Peningkatan kepadatan penduduk memberikan 2 (dua) dampak sekaligus, bagaikan dua sisi dalam satu mata uang, yaitu dampak negatif dan dampak positif secara bersamaan. Terpusatnya penduduk pada

suatu wilayah (*aglomerasi*), akan berdampak pada aktivitas ekonomi dengan intensitas tinggi, di mana dalam perspektif ekonomi timbulnya *aglomerasi* akan menciptakan efisiensi “biaya” dalam proses transformasi sumberdaya-sumberdaya yang ada serta *multiplier effect* berupa peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat sebagai penggerak ekonomi utama.

Di sisi lain, terpusatnya penduduk pada suatu wilayah tertentu, bukan saja akan berimplikasi terhadap masalah kependudukan, seperti permukiman kumuh, peningkatan pelayanan publik, disfungsi tata guna lahan dan akan berimplikasi pula terhadap masalah keamanan, ketertiban, ketenteraman dan masalah sosial lainnya.

Pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, daya dukung lingkungan serta sarana prasarana lainnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesawaran dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar rata-rata 1,49% per tahun. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran, Semester I tahun 2023 terlihat dari tabel berikut.

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran, Semester I tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-5	20.906	19.681	40.587
2.	6-10	22.790	21.616	44.406
3.	11-17	29.213	27.236	56.449
4.	18-22	17.337	16.904	34.241
5.	23-27	20.062	18.229	38.291
6.	28-32	18.408	17.161	35.569
7.	33-38	22.760	22.162	44.922
8.	39-43	19.915	18.889	38.804
9.	44-48	18.436	17.711	36.147
10.	49-53	15.023	14.376	29.399
11.	54-58	12.614	12.412	25.026
12.	59-63	10.204	10.233	20.437
13.	64-68	8.175	7.241	15.416
14.	69-73	6.049	5.386	11.435
15.	> 74	7.566	6.976	14.542
Pesawaran		249.458	236.213	485.671

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2024

Komposisi penduduk Pesawaran didominasi oleh kelompok penduduk berusia muda. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi untuk melakukan perepatan pembangunan daerah yang diiringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat juga menjadi beban/masalah, jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mumpuni.

Dari aspek rasio jenis kelamin (*sex ratio*), secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dari *sex ratio* yang nilainya lebih dari 100. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesawaran semester I tahun 2023 sebesar 105,61 yang berarti dari tiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Kecamatan Marga Punduh memiliki nilai *sex ratio* tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu, sebesar 107,88.

Tabel 1.8 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, Semester I 2023

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1.	Punduh Pidada	107,19
2.	Marga Punduh	107,88
3.	Padang Cermin	106,88
4.	Teluk Pandan	107,87
5.	Way Ratai	106,55
6.	Kedondong	105,18
7.	Way Khilau	107,42
8.	Way Lima	104,06
9.	Gedong Tataan	104,19
10.	Negeri Katon	106,22
11.	Tegineneng	104,14
PESAWARAN		105,61

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2024

Jumlah penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang harus dikelola secara maksimal guna mendapatkan hasil yang optimal dalam pembangunan. Di samping itu jumlah penduduk juga dapat menimbulkan ekses negatif dari proses pembangunan, bila terjadi kesenjangan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu penanganan jumlah penduduk harus

diimbangi dengan penekanan terhadap laju pertumbuhan penduduk agar terdapat keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada.

1.3.11 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

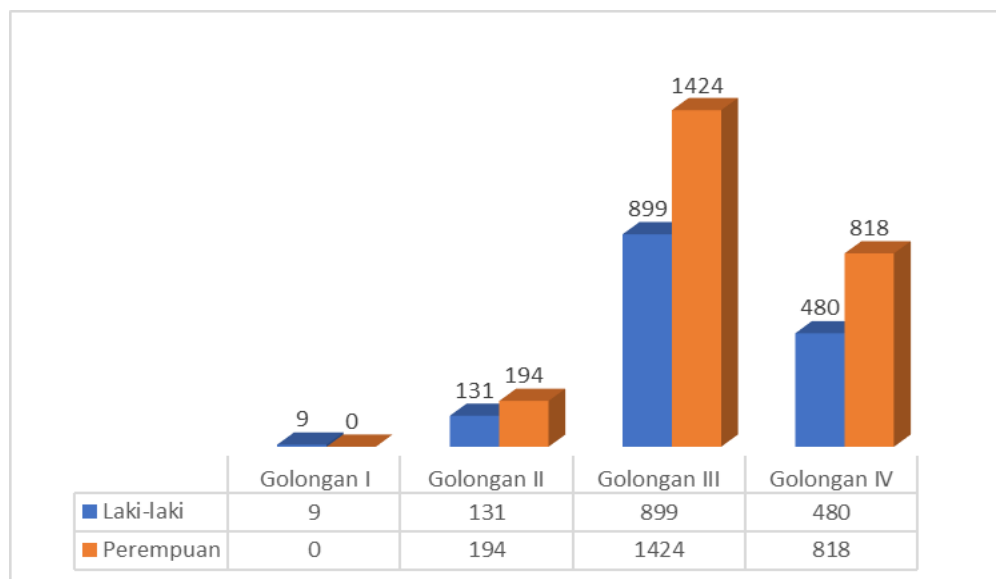
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil yang termasuk ke dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran pada tahun 2023 adalah sebanyak 3.955 orang, dengan 1.519 orang laki-laki dan 2.436 orang perempuan. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh sebagian besar PNS tersebut adalah tingkat Sarjana (S1) sebanyak 2.543 orang dan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 590 orang. Golongan kepangkatan terbanyak yang diduduki oleh PNS di Kabupaten Pesawaran adalah Golongan III sebanyak 2.323 orang.

Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Jenis Kelamin Per- 31 Desember 2023



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2024

Gambar 1.8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran, Desember 2023



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2024

1.4 Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

1.4.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Penyusunan dan perumusan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pesawaran harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial budaya, dan kultur masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya akan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparatur daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mampu memberikan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Pesawaran. Disamping itu juga peraturan daerah diharapkan juga dapat menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan daya beli/kemampuan ekonomi masyarakat (enabling).

Kebijakan-kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah senantiasa mempertimbangkan potensi-potensi sumber pendapatan yang ada sehingga kebijakan-kebijakan yang dimaksud akan lebih dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan daerah dan bukan sebaliknya dapat menekan, bahkan memperkecil potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dibidang pendapatan daerah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan aparatur pemerintah dibidang pendapatan daerah yang profesional baik dari segi kemampuan, keterampilan maupun keahlian. Dengan adanya aparatur pemerintah yang profesional penyelenggaraan pemerintahan yang profesional akan terwujud

1.4.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.331.480.405.116,00; Dari Target yang ditetapkan secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran terealisasi sebesar Rp. 1.212.663.765.525,67 atau kurang sebesar Rp. 118.816.639.590,33 atau hanya pencapaian sebesar 91,08 persen. Pendapatan tersebut berasal dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target ditetapkan sebesar Rp. 165.329.822.616,00 terealisasi sebesar Rp. 88.037.737.058,67 atau kurang sebesar Rp. 77.292.085.557,33 atau hanya tercapai sebesar 53,25 persen, yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 74.222.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.861.960.015,08 atau kurang sebesar Rp. 33.360.039.984,92 atau hanya tercapai sebesar 55,05 persen;
- 2) Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 7.169.607.500,00 terealisasi sebesar Rp. 3.828.798.857,40 atau kurang sebesar Rp. 3.340.808.642,60 atau hanya tercapai sebesar 53,40 persen;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp. 2.007.888.271,00 terealisasi sebesar Rp. 1.998.524.639,60 atau kurang sebesar Rp. 9.363.631,40 atau hanya tercapai sebesar 99,53 persen; dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp. 81.930.326.845,00 terealisasi sebesar Rp. 41.348.453.546,59 atau kurang sebesar Rp. 40.581.873.298,41 atau hanya tercapai sebesar 50,47 persen.

b. Pendapatan Transfer dengan target ditetapkan sebesar Rp. 1.164.337.675.681,00 terealisasi sebesar Rp. 1.124.140.131.292,00 atau kurang sebesar Rp. 40.197.544.389,00 atau hanya tercapai sebesar 96,55 persen, yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar Rp. 1.062.021.365.428,00 terealisasi sebesar Rp. 1.058.771.673.347,00 atau kurang sebesar Rp. 3.249.692.081,00 atau hanya tercapai sebesar 99,69 persen; dan

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 102.316.310.253,00 terealisasi sebesar Rp. 65.368.457.945,00 atau kurang sebesar Rp. 36.947.852.308,00 atau hanya tercapai sebesar 63,89 persen.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target ditetapkan sebesar Rp. 1.812.906.819,00 terealisasi sebesar Rp. 485.897.175,00 atau kurang sebesar Rp. 1.327.009.644,00 atau hanya tercapai sebesar 26,80 persen, yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan Hibah yang ditargetkan sebesar Rp. 967.670.000,00 terealisasi sebesar Rp. 130.559.000,00 atau kurang sebesar Rp. 837.111.000,00 atau hanya tercapai sebesar 13,49 persen; dan
- 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditargetkan sebesar Rp. 845.236.819,00 terealisasi sebesar Rp. 355.338.175,00 atau kurang sebesar Rp. 489.898.644,00 atau hanya tercapai sebesar 42,04 persen.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah secara rinci disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.9 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.331.480.405.116,00	1.212.663.765.525,67	(118.816.639.590,33)	91,08
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.329.822.616,00	88.037.737.058,67	(77.292.085.557,33)	53,25
4.1.01	Pajak Daerah	74.222.000.000,00	40.861.960.015,08	(33.360.039.984,92)	55,05
4.1.02	Retribusi Daerah	7.169.607.500,00	3.828.798.857,40	(3.340.808.642,60)	53,40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.007.888.271,00	1.998.524.639,60	(9.363.631,40)	99,53
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	81.930.326.845,00	41.348.453.546,59	(40.581.873.298,41)	50,47
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.164.337.675.681,00	1.124.140.131.292,00	(40.197.544.389,00)	96,55
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah	1.062.021.365.428,00	1.058.771.673.347,00	(3.249.692.081,00)	99,69

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	Pusat				
4.2.01.01	Dana Perimbangan	908.860.974.428,00	905.611.282.347,00	(3.249.692.081,00)	99,64
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.612.711.428,00	26.015.670.485,00	1.402.959.057,00	105,70
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	634.676.295.000,00	634.632.103.468,00	(44.191.532,00)	99,99
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.042.740.000,00	57.052.805.800,00	(989.934.200,00)	98,29
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	191.529.228.000,00	187.910.702.594,00	(3.618.525.406,00)	98,11
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.612.178.000,00	11.612.178.000,00	0,00	100,00
4.2.01.05	Dana Desa	141.548.213.000,00	141.548.213.000,00	0,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.316.310.253,00	65.368.457.945,00	(36.947.852.308,00)	63,89
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	102.316.310.253,00	65.368.457.945,00	(36.947.852.308,00)	63,89
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.812.906.819,00	485.897.175,00	(1.327.009.644,00)	26,80
4.3.01	Pendapatan Hibah	967.670.000,00	130.559.000,00	(837.111.000,00)	13,49
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	845.236.819,00	355.338.175,00	(489.898.644,00)	42,04

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023

1.5 Target dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

1.5.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Kabupaten Pesawaran. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, topdown dan bottom-up.

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja Kabupaten Pesawaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, dan tolok ukur kinerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah dalam upaya pelayanan publik dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk kelancaran pelaksanaan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu diprioritaskan juga pada pembangunan ekonomi terkait dengan sektor pertanian, kelautan perikanan dan koperasi, industri, perdagangan.

Dalam mengalokasikan anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung didasarkan pada fungsi ekonomi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan menggunakan prinsip anggaran kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah. Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja Perangkat Daerah yang mengisi kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Anggaran Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Anggaran belanja langsung disusun berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Anggaran belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai kebutuhan fiskal sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam rangka pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023. Belanja pegawai diarahkan untuk membayar gaji pegawai, tunjangan pegawai, dan penghasilan lainnya. Belanja hibah diarahkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan atau kemampuan keuangan.

Kebijakan Belanja berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Keterbatasan anggaran yang setiap tahun senantiasa mengemuka, menuntut adanya kreativitas dan inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendanaan bagi percepatan pembangunan.

Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Disamping itu juga membiayai penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang bersifat mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kewilayahan, serta organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik sepanjang belum diperoleh kepastian pendanaan dari APBN.

Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi Lampung.

Arah Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

- a. Memenuhi belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
- b. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari DBHCHT, DBH Pajak Rokok untuk pendanaan program prioritas daerah yang sesuai dengan pedoman penggunaan dana tersebut.
- c. Merencanakan alokasi belanja berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta disesuaikan dengan ketersediaan dana dan pemenuhan prioritas kebutuhan belanja urusan wajib.
- d. Melakukan optimalisasi terhadap belanja langsung akibat tidak tercapainya asumsi penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022.
- e. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama.
- f. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat, yaitu sisa DAK fisik dan DAK Non Fisik, serta pembayaran retensi kegiatan tahun 2022.

Belanja daerah tahun 2023 disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2023 akan dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang merupakan kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang dan pendukung pemerintahan.

Agenda pembangunan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 terkait dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan trigger pertumbuhan ekonomi wilayah. Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten Pesawaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi

Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah guna mewujudkan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah, peningkatan kualitas manajemen keuangan daerah, serta Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik lokal. Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:

- a. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Kearsipan
- c. Komunikasi dan Informatika
- d. Persandian
- e. Statistik
- f. Pengawasan/Inspektorat
- g. Kewilayahan/Kecamatan
- h. Kepegawaian
- i. Kesatuan Bangsa dan Politik
- j. Keuangan
- k. Pendidikan dan Pelatihan
- l. Penelitian dan Pengembangan
- m. Perencanaan
- n. Sekretariat Daerah
- o. Sekretarian DPRD

2. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing

Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas sumber daya manusia, melalui akses dan kualitas pendidikan serta perwujudan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum dalam kehidupan sosial yang harmonis, serta pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Penanganan dan penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, ibu dan anak, serta Rencana aksi daerah pangan dan gizi, Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19, seperti penyediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, dan penanganan kesehatan lainnya. Prioritas ini akan diampu oleh Urusan :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Sosial
- d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. Perpustakaan
- g. Kepemudaan dan Olahraga

3. Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas

Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, serta Peningkatan Kesiapan Penanggulangan Bencana, diarahkan dalam rangka pemantapan dan peningkatan daya dukung, kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, dan persampahan), pengembangan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan daya dukung kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum, serta dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan penanggulangan bencana serta pemanfaatan tata ruang melalui penyesuaian dan pengendalian tata ruang. Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan melalui padat karya. Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:

- a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- c. Pertanahan
- d. Lingkungan Hidup
- e. Perhubungan

4. Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha Yang Kondusif

Percepatan Pembangunan sektor unggulan melalui peningkatan Iklim Investasi dan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Energi Sumber Daya Mineral dan Destinasi Wisata. dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, serta dalam rangka program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19, seperti penetapan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan Industri terdampak serta pemberian insentif ekonomi, Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia terdampak, serta penanganan dampak ekonomi lainnya. Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:

- a. Tenaga Kerja
- b. Kelautan dan Perikanan
- c. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- d. Pariwisata
- e. Penanaman Modal
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Pertanian
- i. Transmigrasi

5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal

Percepatan Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri diarahkan demi terwujudnya percepatan pembangunan pada sektor unggulan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta koordinasi dan sinergitas yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam berbasis Pertanian dan Perikanan guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan, serta pemantapan pengembangan dan diversifikasi

produk pertanian sejalan dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan dampak Ekonomi, seperti Pengadaan bahan pangan dan ketahanan pangan, serta Penyediaan Jaring Pengaman Sosial seperti bansos dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial seperti pekerja informal/harian, dan keluarga miskin. Prioritas ini akan diampu oleh Urusan :

- a. Kebudayaan
- b. Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- c. Pangan
- d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pemerintah pusat dan provinsi dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja. Untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi, Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan yaitu Money Follow Program Prioritas tidak berdasarkan Money Follow Function, dalam arti tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata

1.5.2 Target dan Realisasi Belanja

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Target Belanja daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.351.529.979.151,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 923.000.730.630,00 (68,29%), belanja modal sebesar Rp. 199.846.485.811,00 (14,79%), belanja tidak terduga sebesar Rp. 500.000.000,00 (0,04%) dan belanja transfer sebesar Rp. 228.182.762.710,00 (16,88%).

Belanja Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan

bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya; Belanja Tidak Terduga merupakan belanja pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan Belanja Transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Target Belanja Daerah yang ditetapkan secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.351.529.979.151,00; akan tetapi secara keseluruhan belanja daerah kabupaten Pesawaran yang dapat terealisasi sebesar Rp. 1.227.608.811.607,00 atau 90,83% atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 123.921.167.544,00. Hal tersebut terjadi pada sisi belanja dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi yang ditargetkan sebesar Rp. 923.000.730.630,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 846.747.316.847,00 atau tercapai sebesar 91,74 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 76.253.413.783,00, yang terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai yang ditargetkan sebesar Rp. 486.270.744.940,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 465.299.138.789,00 atau tercapai sebesar 95,69 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 20.971.606.151,00;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa yang ditargetkan sebesar Rp. 393.966.001.690,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 341.671.467.138,00 atau tercapai sebesar 86,73 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 52.294.534.552,00;
 - 3) Belanja Bunga yang ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.491.189.320,00 atau tercapai sebesar 89,82 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 508.810.680,00; dan
 - 4) Belanja Hibah yang ditargetkan sebesar Rp. 37.763.984.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 35.285.521.600,00 atau tercapai sebesar 93,44 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.478.462.400,00.
- b. Belanja Modal yang ditargetkan sebesar Rp. 199.846.485.811,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 160.708.909.188,00 atau tercapai sebesar 80,42 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.133.161.308,00, yang terdiri dari :

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang ditargetkan sebesar Rp. 21.244.090.129,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 20.110.928.821,00 atau tercapai sebesar 94,67 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.133.161.308,00;
 - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang ditargetkan sebesar Rp. 60.911.309.005,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 46.525.548.167,00 atau tercapai sebesar 76,38 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.385.760.838,00;
 - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang ditargetkan sebesar Rp. 108.054.457.177,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 84.436.432.700,00 atau tercapai sebesar 78,14 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 23.618.024.477,00;
 - 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang ditargetkan sebesar Rp. 9.473.629.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 9.473.629.500,00 atau tercapai sebesar 100,00; dan
 - 5) Belanja Modal Aset Lainnya yang ditargetkan sebesar Rp. 163.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 162.370.000,00 atau tercapai sebesar 99,61 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 630.000,00.
- c. Belanja Tidak Terduga yang ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 463.375.000,00 atau tercapai sebesar 92,68 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 36.625.000,00, yang terdiri dari :
- d. Belanja Transfer yang ditargetkan sebesar Rp. 228.182.762.710,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 219.689.210.572,00 atau tercapai sebesar 96,28 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 8.493.552.138,00, yang terdiri dari :
- 1) Belanja Bagi Hasil yang ditargetkan sebesar Rp. 8.127.960.750,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 5.298.636.723,00 atau tercapai sebesar 65,19 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.829.324.027,00; dan
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan yang ditargetkan sebesar Rp. 220.054.801.960,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 214.390.573.849,00 atau tercapai sebesar 97,43 persen sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.664.228.111,00.

Hal ini terjadi pada sisi belanja operasi dari target yang ditetapkan, terealisasi sebesar Rp. 846.747.316.847,00 atau sebesar 91,74% atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 76.253.413.783,00; kemudian pada sisi belanja modal dari target yang ditetapkan, terealisasi sebesar Rp. 160.708.909.188,00 atau sebesar 80,42% atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 39.137.576.623,00;

selanjutnya pada sisi belanja tidak terduga dari target yang ditetapkan, terealisasi sebesar Rp. 463.375.000,00 atau sebesar 92,68% atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 36.625.000,00; Sedangkan pada sisi belanja transfer terealisasi sebesar Rp. 219.689.210.572,00 atau 96,28% atau terjadi efisiensi sebesar Rp. 8.493.552.138,00.

Rincian Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.10 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	1.351.529.979.151,00	1.227.608.811.607,00	(123.921.167.544,00)	90,83
5.1	BELANJA OPERASI	923.000.730.630,00	846.747.316.847,00	(76.253.413.783,00)	91,74
5.1.01	Belanja Pegawai	486.270.744.940,00	465.299.138.789,00	(20.971.606.151,00)	95,69
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.966.001.690,00	341.671.467.138,00	(52.294.534.552,00)	86,73
5.1.03	Belanja Bunga	5.000.000.000,00	4.491.189.320,00	(508.810.680,00)	89,82
5.1.05	Belanja Hibah	37.763.984.000,00	35.285.521.600,00	(2.478.462.400,00)	93,44
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	199.846.485.811,00	160.708.909.188,00	(39.137.576.623,00)	80,42
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.244.090.129,00	20.110.928.821,00	(1.133.161.308,00)	94,67
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.911.309.005,00	46.525.548.167,00	(14.385.760.838,00)	76,38

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.054.457.177,00	84.436.432.700,00	(23.618.024.477,00)	78,14
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.473.629.500,00	9.473.629.500,00	0,00	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	163.000.000,00	162.370.000,00	(630.000,00)	99,61
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	463.375.000,00	(36.625.000,00)	92,68
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	463.375.000,00	(36.625.000,00)	92,68
5.4	BELANJA TRANSFER	228.182.762.710,00	219.689.210.572,00	(8.493.552.138,00)	96,28
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.127.960.750,00	5.298.636.723,00	(2.829.324.027,00)	65,19
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	220.054.801.960,00	214.390.573.849,00	(5.664.228.111,00)	97,43

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023

1.6 Target dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

1.6.1 Kebijakan Pembiayaan

Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya defisit dan surplus anggaran dalam penyusunan APBD. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja. Untuk menutupi anggaran yang mengalami defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Ketika terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Adapun pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.

Kebijakan pembiayaan daerah mencakup dua sumber yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan arah kebijakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa Lebih Pengangggaran Tahun Lalu (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA diupayakan seminimal mungkin dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni maksimal dibawah 6 (enam) persen dari kebutuhan belanja dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara konsisten.
- 2) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja serta Pembentukan BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan

1.6.2 Target dan Realisasi Pembiayaan

Struktur Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Target Pembiayaan Kabupaten Pesawaran tahun 2023, dengan defisit (selisih antara Pendapatan dan Belanja) sebesar Rp. 20.049.574.035,00 yang ditutupi oleh pembiayaan sebesar Rp. 20.049.574.034,00. yang terdiri atas dari Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Penggunaan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp. 8.163.766.434,00 serta bersumber dari Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 43.485.807.600,00. Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 31.600.000.000,00.

Dari Target Pembiayaan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 20.049.574.034,00 secara keseluruhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesawaran terealisasi sebesar Rp. 23.057.646.969,97 atau tercapai 115.00%, dengan Defisit (selisih antara Pendapatan dan Belanja) sebesar Rp. 14.945.046.081,33 yang terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp. 51.649.574.034,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 51.649.472.034,97 berkurang sebesar Rp. 101.999,03 atau tercapai sebesar 100,00 persen, yang bersumber dari Penggunaan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp. 8.163.664.434,97 dan yang bersumber pada Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 43.485.807.600,00; dan

- b. Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo hanya terealisasi sebesar Rp. 28.591.825.065,00,

Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp. 8.112.600.888,64. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 1.11 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	SELISIH	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.049.574.035,00)	(14.945.046.081,33)	5.104.527.953,67	74,54
6	PEMBIAYAAN DAERAH	20.049.574.034,00	23.057.646.969,97	3.008.072.935,97	115,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51.649.574.034,00	51.649.472.034,97	(101.999,03)	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.163.766.434,00	8.163.664.434,97	(101.999,03)	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	43.485.807.600,00	43.485.807.600,00	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.600.000.000,00	28.591.825.065,00	(3.008.174.935,00)	90,48
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	31.600.000.000,00	28.591.825.065,00	(3.008.174.935,00)	90,48
	PEMBIAYAAN NETTO	20.049.574.034,00	23.057.646.969,97	3.008.072.935,97	115,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	8.112.600.888,64	8.112.600.888,64	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023



PESAWARAN

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

2.1.1. Kondisi dan Arahkan Perekonomian Nasional

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat pada Tahun 2023 dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi perekonomian Kabupaten Pesawaran kedepan. Kerangka perekonomian nasional secara makro dalam Tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia, masalah yang masih perlu diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, peluang serta tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan perekonomian Indonesia yang diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Pesawaran meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisheery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Sesuai dengan Tema Pembangunan IV RPJMN Tahun 2020-2024 : “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, dengan arah kebijakan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada

2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju dan berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa Kabupaten Pesawaran tercantum dalam Kawasan pengembangan industri baru diluar pulau jawa yaitu Kawasan Industri Pesawaran (Tegineneng) yang akan dikembangkan dalam kerangka industrialisasi dengan dimanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Kondisi ekonomi global pada tahun ini diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Bank Dunia pada awal Juni 2023 memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami penurunan dari 3,1% di Tahun 2022 menjadi 2,1% di akhir Tahun 2023. Adapun untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada pertengahan tahun 2022 diprediksi akan tumbuh 5,1% namun pada akhir Juni 2023 Bank Dunia memproyeksi kembali bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih moderat pada angka 4,9% diakhir 2023, lebih rendah daripada realisasi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 diangka 5,3%. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti masih berlangsungnya perang Russia dan Ukraina dan inflasi di negara maju.

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2023 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada triwulan ketiga dan keempat Tahun 2023.

Memahami kondisi tersebut Tema RKP Tahun 2023 menjadi: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Fokus Pembangunan RKP Tahun 2023 ialah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaringan pengaman nasional; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Arahan Kebijakan Nasional yang menjadi penekanan pada RKP Tahun 2023 yaitu:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 2) Peningkatan kualitas SDM.

- 3) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job.
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha.
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim.
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi).
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2.1.2. Kondisi dan Arahana Perekonomian Provinsi Lampung

Secara substansial misi terkait dengan pengembangan perekonomian Provinsi Lampung adalah dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain: 1) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi pengangguran; 2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah; 3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat; 4) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil; dan 5) Pemerataan distribusi pendapatan.

Perkembangan kegiatan ekonomi Provinsi Lampung yang dicerminkan dengan PDRB atas dasar harga konstan maupun harga berlaku mengalami pertumbuhan. Nilai PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku pada Tahun 2021 adalah sebesar 371,198 trilyun, meningkat di Tahun 2022 menjadi 414,131 trilyun. Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB Provinsi Lampung adalah sektor pertanian dengan kontribusi 27,90 persen; industri pengolahan dengan kontribusi 18,55 persen; perdagangan

besar dan eceran dengan kontribusi 13,20 persen; dan konstruksi dengan kontribusi 9,75 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Lampung selama periode 2018-2022 menunjukkan tren fluktuasi akibat Pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi di pada Tahun 2018 sebesar 5,23 persen, meningkat di Tahun 2019 menjadi 5,26 persen. Pada Tahun 2020 terjadi kontraksi hingga -1,67 persen dan Tahun 2021 mulai meningkat kembali pada angka 2,79 persen dan mulai bergerak bangkit ke angka 4,28 persen pada Tahun 2022..

Perkembangan inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2021 tercatat terendah pada batas bawah kisaran sasaran $3,0 \pm 1$ persen yaitu sebesar 1,56 persen (yoy) atau melambat dibandingkan Triwulan tahun sebelumnya 2,34 persen (yoy). Rendahnya angka inflasi pada periode ini dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan mobilitas dan sosial masyarakat serta masuknya masa panen pada komoditas strategis. Secara periode tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada Triwulan III Tahun 2021 disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan porsi 1,08 persen dengan nilai inflasi 3,81 persen (yoy).

Pada Tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sebanyak 1.083,93 ribu jiwa bertambah menjadi sebesar 1.002,41 ribu jiwa pada Tahun 2022 atau menurun sebesar 7,52 persen dari tahun sebelumnya.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk diperlihatkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Lampung per September 2019 sebesar 0,33 dan terus mengalami penurunan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 secara berturut-turut yakni 0,320, 0,314 dan 0,313, Indeks Gini Lampung lebih baik dari Nasional yang berada pada angka 0,381.

Tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah “Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Berdasarkan tema tersebut, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Pembangunan infrastruktur.
- 4) Reformasi birokrasi.

- 5) Kehidupan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya.
- 6) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

2.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesawaran

Identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Kerangka ekonomi makro Tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Pesawaran hingga triwulan kedua Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2023, masalah-masalah yang akan diselesaikan, tantangan yang akan dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Pesawaran yang Maju, Makmur dan Sejahtera. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan sebagai pasca pandemi Covid-19 di daerah, dilakukan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi serta arah kebijakan keuangan daerah.

Kebijakan ekonomi daerah di Kabupaten Pesawaran diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya mengurangi kemiskinan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kabupaten Pesawaran yang kompetitif, sehingga dapat terbentuk daya saing daerah yang tangguh dan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh difokuskan pada peningkatan aspek kompetitif dari sektor-sektor unggulan yang meliputi pariwisata dan industri kreatif dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk lokal, tenaga kerja, maupun pemasaran ke luar daerah sehingga mampu bersaing di pasar. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai serta adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Selain itu masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai penonton tetapi juga menjadi bagian dari pelaku pasar.

Untuk Tahun 2023, perekonomian Pesawaran akan kembali pulih sejalan dengan pulihnya perekonomian nasional dan Provinsi Lampung dengan

keberhasilan percepatan penanganan pasca pandemi covid-19 melalui berbagai langkah pengalokasian APBD yang diprioritaskan pada upaya peningkatan akses kesehatan masyarakat, jaringan pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Meskipun di triwulan awal tahun 2023 beberapa program pembangunan tetap akan berfokus pada pemulihan ekonomi daerah, seiring dengan menguatnya tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha maka Kabupaten Pesawaran akan memberikan ekspektasi positif baik secara regional sumatera maupun nasional sepanjang tahun 2023.

Memahami kondisi tersebut, memperhatikan Kondisi dan Arahan Perekonomian Nasional dan Provinsi Lampung, dilaksanakan untuk mendukung Tema Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 yaitu “Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kemandirian Desa dan Pengentasan Kemiskinan” yang diimplementasikan kedalam Prioritas Pembangunan tahun 2023 yaitu:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkinerja tinggi.
- 2) Peningkatan kualitas SDM yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul dan berdaya saing.
- 3) Pemerataan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berkualitas.
- 4) Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- 5) Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow* program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran telah memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas, juga berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- 1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

2) Disiplin Anggaran

Adanya program yang telah disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan juga untuk mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 untuk alokasi DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa; Perubahan alokasi pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Lampung pada komponen Dana Bagi Hasil Pajak Rokok; Perubahan proyeksi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP; Perubahan proyeksi Belanja Daerah untuk menyesuaikan kebutuhan belanja untuk PBI Non BPJS dan penyesuaian besaran alokasi dana transfer ke daerah; Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang

Jatuh Tempo sesuai akta perjanjian pinjaman Daerah Nomor 11 Tahun 2022; serta penyesuaian terhadap asumsi saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (Silpa) pada Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.

2.2 Perubahan Pendapatan Daerah

2.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, untuk itu maka dapat dirumuskan arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2023 meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Pajak daerah dan Retribusi daerah :
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah akan melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan

pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak

keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 1) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah :
 - a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;

- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (14) pendapatan dari pengembalian;
 - (15) pendapatan dari BLUD; dan
 - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Intentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) :
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau

ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) :

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) :

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Penganggaran Dana Desa (DD) :

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan dana desa dimaksud dengan

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6) Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil:

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

7) Penganggaran Pendapatan Bantuan Keuangan :

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk

melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi

Sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

4) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota akan menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2022 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer, diperhitungkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2023 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2023 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
3. Pendayagunaan Aset Daerah;
4. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

2.2.2. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada saat penyusunan Perubahan APBD 2023, mengalami perubahan semula sebesar Rp. 1.304.842.516.841 menjadi Rp. 1.331.480.405.116 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.637.888.275 atau sebesar 2,04 persen yang meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari Rp. 168.693.322.616 menjadi Rp. 165.329.822.616 mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.363.500.000 atau 1,99 persen.
- b. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari Rp. 1.134.336.287.406 menjadi Rp. 1.164.337.675.681 mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.001.388.275 atau 2,64 persen.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan sebesar Rp. 1.812.906.819.

Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.304.842.516.841	1.331.480.405.116	26.637.888.275	2,04
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	168.693.322.616	165.329.822.616	(3.363.500.000)	(1,99)
4.1.01	Pajak Daerah	73.522.000.000	74.222.000.000	700.000.000	0,95
4.1.02	Retribusi Daerah	6.973.607.500	7.169.607.500	196.000.000	2,81
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.457.888.271	2.007.888.271	(2.450.000.000)	(54,96)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83.739.826.845	81.930.326.845	(1.809.500.000)	(2,16)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.134.336.287.406	1.164.337.675.681	30.001.388.275	2,64
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.040.558.769.912	1.062.021.365.428	21.462.595.516	2,06
4.2.01.01	Dana Perimbangan	903.130.174.912	908.860.974.428	5.730.799.516	0,63
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.000.111.912	24.612.711.428	5.612.599.516	29,54
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	634.676.295.000	634.676.295.000	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.042.740.000	58.042.740.000	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	191.411.028.000	191.529.228.000	118.200.000	0,06
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	11.612.178.000	11.612.178.000	100,00!
4.2.01.05	Dana Desa	137.428.595.000	141.548.213.000	4.119.618.000	3,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.777.517.494	102.316.310.253	8.538.792.759	9,11
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	93.777.517.494	102.316.310.253	8.538.792.759	9,11
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.812.906.819	1.812.906.819	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	967.670.000	967.670.000	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	845.236.819	845.236.819	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesawaran, 2023

2.3 Perubahan Belanja Daerah

2.3.1. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;

- e) Belanja Hibah; dan
 - f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
- a) Belanja Tanah;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d) Belanja Jalan;
 - e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
- a) Belanja Bagi Hasil;
 - b) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga diharapkan dapat mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan APBD akan lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70

Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsure perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- 9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).
- 11) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

b) Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, perusahaan/lembaga penerima subsidi telah terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tariff yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah akan menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

- 1) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa akan diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

f) Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan akan diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 2) Pemerintah kabupaten/kota akan menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengalokasikan dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut akan diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut akan diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

g) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

h) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

- a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing OPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- 11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13) Penganggaran belanja perjalanan dinas akan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya dirasionalkan sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

a) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta

c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,

seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

- 15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

i) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah akan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap

digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

2.3.2. Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023, mengalami perubahan dari Rp. 1.329.442.516.841 menjadi Rp. 1.351.529.979.151 bertambah sebesar Rp 22.087.462.310 atau 1,66 persen, yang meliputi:

- a. Belanja Operasi mengalami perubahan dari Rp. 902.943.983.345 menjadi Rp. 923.000.730.630 bertambah sebesar Rp. 20.056.747.285 atau 2,22 persen.
- b. Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp. 201.495.914.677 menjadi Rp. 199.846.485.811 berkurang sebesar Rp. 1.649.428.866 atau 0,82 persen.
- c. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari Rp. 5.000.000.000 menjadi Rp. 500.000.000 berkurang sebesar Rp. 4.500.000.000 atau 90,00 persen.
- d. Belanja Transfer mengalami perubahan dari Rp. 220.002.618.819 menjadi Rp. 228.182.762.710 bertambah sebesar Rp. 8.180.143.891 atau 3,72 persen.

Tabel 2.2 Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	1.329.442.516.841	1.351.529.979.151	22.087.462.310	1,66
5.1	BELANJA OPERASI	902.943.983.345	923.000.730.630	20.056.747.285	2,22
5.1.01	Belanja Pegawai	508.852.019.308	486.270.744.940	(22.581.274.368)	(4,44)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.605.180.037	393.966.001.690	22.360.821.653	6,02
5.1.03	Belanja Bunga	6.500.000.000	5.000.000.000	(1.500.000.000)	(23,08)
5.1.05	Belanja Hibah	15.755.784.000	37.763.984.000	22.008.200.000	139,68
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	231.000.000	0,00	(231.000.000)	(100,00)
5.2	BELANJA MODAL	201.495.914.677	199.846.485.811	(1.649.428.866)	(0,82)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.003.228.339	21.244.090.129	5.240.861.790	32,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.326.571.448	60.911.309.005	(5.415.262.443)	(8,16)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.320.476.790	108.054.457.177	(3.266.019.613)	(2,93)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.845.638.100	9.473.629.500	1.627.991.400	20,75
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	163.000.000	163.000.000	100%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	500.000.000	(4.500.000.000)	(90,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	500.000.000	(4.500.000.000)	(90,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	220.002.618.819	228.182.762.710	8.180.143.891	3,72
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.779.678.662	8.127.960.750	(651.717.912)	(7,42)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	211.222.940.157	220.054.801.960	8.831.861.803	4,18

2.4 Perubahan Pembiayaan Daerah

2.4.1. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja

Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- Pelampauan penerimaan PAD;
- Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- Penghematan belanja;
- Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya, SiLPA dimaksud akan diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2023.

b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- d) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Pinjaman daerah dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
- Persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
 - Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - Kerangka acuan kegiatan;
 - RPJMD;
 - RKPD;
 - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - APBD tahun anggaran berjalan;
 - Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;
 - Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;

- Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- e) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung

prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah akan dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- b) Pemerintah Daerah menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- c) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana

Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

- d) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
- e) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- f) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan

penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- g) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nol.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Perubahan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah akan memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan perubahan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya

2.4.2. Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah pada saat penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023, mengalami perubahan dari Rp. 24.600.000.000 menjadi Rp. 20.049.574.035 berkurang sebesar Rp 4.550.425.965 atau 18,50 persen, yang meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan mengalami perubahan dari Rp. 61.800.000.000 menjadi Rp. 51.649.574.035 berkurang sebesar Rp. 10.150.425.965 atau 16,42 persen.
- b. Pengeluaran Pembiayaan mengalami perubahan dari Rp. 37.200.000.000 menjadi Rp. 31.600.000.000 berkurang sebesar Rp. 5.600.000.000 atau 15,05 persen.

Tabel 2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Surplus / (Defisit)	(24.600.000.000)	(20.049.574.035)	4.550.425.965	(18,50)
6	PEMBIAYAAN	24.600.000.000	20.049.574.035	(4.550.425.965)	(18,50)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.800.000.000	51.649.574.035	(10.150.425.965)	(16,42)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.000.000.000	8.163.766.435	(10.836.233.565)	(57,03)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	42.800.000.000	43.485.807.600	685.807.600	1,60
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.200.000.000	31.600.000.000	(5.600.000.000)	(15,05)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.200.000.000	31.600.000.000	(5.600.000.000)	(15,05)
	Pembiayaan Netto	24.600.000.000	20.049.574.035	(4.550.425.965)	(18,50)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI

KEWENANGAN DAERAH

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan dalam belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *topdown* dan *bottom-up*. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2023 menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah memuat kewenangan urusan sebagai berikut:

1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

- 1.1 Urusan Pendidikan
- 1.2 Urusan Kesehatan
- 1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- 1.6 Urusan Sosial

2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

- 2.1 Urusan Tenaga Kerja
- 2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.3 Urusan Pangan
- 2.4 Urusan Pertanahan
- 2.5 Urusan Lingkungan Hidup

- 2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.9 Urusan Perhubungan
- 2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika
- 2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.12 Urusan Penanaman Modal
- 2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- 2.14 Urusan Statistik
- 2.15 Urusan Persandian
- 2.16 Urusan Kebudayaan
- 2.17 Urusan Perpustakaan
- 2.18 Urusan Kearsipan

3 URUSAN PILIHAN

- 3.1. Urusan Perikanan dan Kelautan
- 3.2 Urusan Pariwisata
- 3.3 Urusan Pertanian
- 3.4 Urusan Perdagangan
- 3.5 Urusan Perindustrian
- 3.6 Urusan Energi Sumber Daya Mineral
- 3.7 Urusan Ketransmigrasian

4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*)

- 4.1 Perencanaan
- 4.2 Keuangan
- 4.3 Kepegawaian dan Diklat
- 4.4 Penelitian dan Pengembangan
- 4.5 Sekretariat DPRD
- 4.6 Sekretariat Daerah
- 4.7 Inspektorat
- 4.8 Kecamatan

5 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN*)

- 5.1 Penanggulangan Bencana Daerah
- 5.2 Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang memuat kewenangan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, penunjang urusan pemerintahan, serta pendukung urusan pemerintahan selengkapannya sebagai berikut:

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Capaian Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 404.812.349.848,-

Realisasi Rp. 386.528.016.364,-

Persentase (95,48 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi skpd

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan meliputi kegiatan :
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan atau Semesteran
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal meliputi kegiatan :
- rehabilitasi ,sedang berat,gedung,ruang kelas,ruang guru Paud
 - pengadaan alat peraktik dan peraga siswa paud
 - penyelenggaraan proses paud
 - pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
 - pendidik paud
 - Penyelenggaran proses belajar nonformal/kesetaraan
 - penilaian kelayakan usul perijinan paud dan Pendidikan nonformal dan diselenggarakan oleh masyarakat
 - pengadilan dan pengawasan perijinan paud dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - penilaian kelayakan usul perijinan Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat
5. Program Pendidikan Dasar meliputi kegiatan:
- pembangunan ruang guru/kepala sekolah/tu-sd
 - pembangunan ruang unit kesehatan sekolah sd
 - pembangunan perpustakaan sekolah sd
 - rehabilitasi sedang /berat ruang kelas sd
 - pengelolaan perlengkapan siswa
 - pengadaan alat peraktik dan peraga siswa sd
 - penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
 - pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa
 - pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan

sekolah dasar

- pembinaan kelembagaan manajemen sekolah sd
- pengolaan dana bos sekolah dasar
- pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah smp
- pengolaan perlengkapan siswa
- pengadaan alat praktik dan peraga siswa smp
- penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik
- pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
- pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan Pendidikan sekolah menengah pertama
- pembinaan kelembagaan manajemen sekolah smp
- pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama

6. Program Sarana dan Prasarana meliputi kegiatan :

- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP
- Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar
- Peningkatan sarana dan prasarana SMP
- Penyediaan Peralatan Pendidikan SD
- Penyediaan Peralatan Pendidikan SMP
- Peningkatan Parana dan Prasarana PAUDNI
- Penyediaan Parana dan Prasarana PAUDNI
- Penyusunan data base dan aset sekolah

7. Program Bina Murid meliputi kegiatan :

- Penjaringan Tes dan Seleksi Peserta Didik Tidak Mampu Berprestasi
- Penyediaan Kelengkapan Peserta Didik Tidak mampu Berprestasi

8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meliputi Kegiatan:

- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
- Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya
- Workshop Pengelolaan Manajemen Pendidikan
- Pembinaan Masyarakat peduli pendidikan

9. Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meliputi Kegiatan :
 - Penyediaan Honorarium Guru Tidak Tetap
 - Penyediaan Honorarium Bagi Guru Daerah Terpencil
10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Pembinaan KKG dan MGMP
 - Pembinaan Prestasi Guru dengan Sertifikasi Guru
 - Penilaian Angka Kredit Guru
 - Lomba Guru Berprestasi
 - Peningkatan Mutu Kemampuan guru TK
 - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Tutor PAUD)
 - Lomba Kepala Sekolah Berprestasi
 - Diklat Pengembangan Kualifikasi dan Karir Pendidikan
11. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Pelestarian dan aktualisasi budaya daerah
 - Pelestarian dan pengembangan nilai tradisi kesejarahan
12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka (naskah kuno)
 - Pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya
13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya meliputi kegiatan :
 - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
14. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Keragaman Budaya meliputi kegiatan :
 - Pembinaan Sanggar seni budaya Kab. Pesawaran
 - Pembinaan Masyarakat adat lampung

b. Permasalahan dan Solusi

Dari gambaran program dan kegiatan-kegiatan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, secara umum masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah pada saat ini yang mencakup aspek perluasan akses dan pelayanan pendidikan, mutu, daya saing dan daya relevansi

pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas pengelolaan pendidikan dapat di uraian sebagai berikut:

1. Pemerataan dan Perluasan Akses.

a. Angka Partisipasi Pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur Pendidikan Formasi Sebesar 55,86% tahun 2023 Meningkat yaitu 61,49 % di tahun 2018. Yaitu Perbandingan dari Jumlah 12.920 Peserta didik terhadap 21,011 Penduduk Usia Sekolah. Faktor utama Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar PAUD antara lain adalah:

- 1) Tingginya pengetahuan dan kesadaran orang tua/masyarakat akan pentingnya pelayanan PAUD
- 2) Semakin terjangkau biaya pendidikan pada PAUD formal dibandingkan dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi orang tua/masyarakat ; dan
- 3) Optimalnya sosialisasi program PAUD ke seluruh lapisan masyarakat Sudah terlaksana. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak Sekolah dengan Penduduk usia Sekolah. Pada APM PAUDNI sebesar 54,60% di tahun 2023 meningkat 59,82 pada tahun 2018, Yaitu dengan perbandingan dari jumlah 8.918 Peserta Didik terhadap 12.920 Penduduk Usia Sekolah.

Untuk jenjang SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) 98.90 % pada tahun 2023 meningkat 99,18% pada tahun 2018 yaitu dengan perbandingan dari Jumlah 45.395 Peserta Didik terhadap 45.770 Penduduk Usia Sekolah dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 97,90% % tahun 2018 meningkat 98.06% di tahun 2018 yaitu dengan perbandingan dari jumlah 44.515 peserta didik terhadap 45.395 penduduk usia sekolah.. Dilihat dari APK tersebut masih memerlukan sedikit peningkatan APK untuk mencapai target APM 100 %. Rendahnya APK disebabkan faktor terbatasnya sarana prasarana,

kondisi ekonomi orang tua yang tidak mendukung, dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan APK tersebut diperlukan peningkatan pelayanan pendidikan di bidang sarana prasarana yang dirasa masih sangat terbatas.

Dalam rangka pencapaian target penuntasan wajar dikdas pada tahun 2018 dengan APK SMP Sebesar 98,90% tahun 2023 meningkat 99,18% pada tahun 2018, yaitu perbandingan dari jumlah 45.395 peserta didik terhadap 45.770 penduduk usia Sekolah. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sebesar 90,74% tahun 2023, meningkat 92,30% pada tahun 2018 yaitu perbandingan dari jumlah 14.565 Peserta didik terhadap 14.496 penduduk Usia Sekolah. perlu dilakukan berbagai upaya bagi peningkatan wajar dikdas khususnya di daerah yang APK nya masih rendah. Kebijakan kecepatan penuntasan wajar dikdas perlu di implementasikan dengan langkah konkrit melalui pengembangan berbagai pola penuntasan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan beberapa faktor penyebab utama percepatan penuntasan wajar dikdas di Kabupaten Pesawaran antara lain ;

- a. Masih terbatasnya akses atau sarana Pendidikan di daerah pedesaan khususnya daerah terpencil dan pedalaman.
- b. Masih kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat untuk mendorong anak usia tingkat SMP/ MTS melaksanakan pendidikan dasar.
- c. Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai pendidikan.
- d. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dasar.

b. Bangunan Sekolah Rusak.

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2023

Penanganan Jumlah Ruang kelas dalam Kondisi rusak TK/ PAUD sebanyak 30 RK, SD 602 RK, SMP 76 RK, Sehingga terdapat penurunan Prosentase kerusakan dari 31% menjadi 25 % dengan rincian Baik : 1.954, Rusak ringan : 277 dan Rusak Berat : 403.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2023.

Jumlah Ruang kelas dalam Kondisi rusak TK/PAUD sebanyak 25 RK, SD 487 RK, dan SMP 69 RK, Sehingga terdapat penurunan prosentase Kerusakan dari 25% menjadi 19,19% dan rincian Baik : 2,515, Rusak Ringan : 261 dan Rusak Berat : 253.

Total Penurunan Kerusakan Ruang Kelas sampai dengan Tahun 2018 20.43%.

c. Sarana Prasarana Pendidikan.

Tersedianya sarana prasarana sekolah yang memadai sangat penting bagi Pendidikan dalam rangka meningkatkan daya tampung pendidikan. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menampung anak usia sekolah baik di jejang PAUD, pendidikan dasar dan menengah terutama terjadi di daerah pedesaan, pedalaman dan terpencil termasuk pulau-pulau kecil. Terbatasnya akses pendidikan di daerah tersebut, mengakibatkan banyak anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan daya tersebut perlu di lakukan peningkatan sarana prasarana melalui pembangunan USB, RKB, termasuk pola-pola perluasan daya tampung seperti kelas jauh, sekolah satu atap, SMP terbuka dan sebagainya.

Untuk tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran mengalokasikan anggaran perbaikan sarana dan prasarana untuk Pengadaan Ruang Kelas Baru sebanyak 1 PAUD, 6SD, 2 SMP untuk pembangunan pagar sekolah 4 SD, 4 SMP untuk pembangunan paving block sekolah 4 SD, 4 SMP dan untuk pengadaan mebeler sebanyak 41 SD sedangkan untuk pengadaan buku – buku dan alat tulis siswa sebanyak 25 SD dan untuk pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 77 SD.

d. Kebutuhan Guru

Berdasarkan rasio siswa/guru pada semua jenjang pendidikan, hampir rata-rata jumlah guru telah memenuhi kebutuhan. Akan tetapi dalam kenyataannya dilapangan bagi daerah pedesaan, pedalamaan dan terpencil kebutuhan guru belum terpenuhi. Hal ini disebabkan persebaran tenaga pendidik tidak merata antara kecamatan dengan desa terpencil. Tingginya tingkat disparitas jumlah guru antara daerah pusat kabupaten dan kecamatan dengan pedesaan dapat disebabkan proses pendistribusian tenaga pendidik yang tidak memenuhi formasi atau kebutuhan dan proses mutasi tenaga yang tidak sesuai kebutuhan.

2. Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Relevansi Pendidikan

a. Fasilitas pembelajaran sekolah

Dalam rangka mendukung proses pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing di sekolah, diperlukan berbagai alat dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Penggunaan buku pelajaran di sekolah masih sangat terbatas. Untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTS rasio siswa 1 siswa: Kondisi ini mempengaruhi kualitas pendidikan yang dicapai dalam proses pembelajaran. Ketersediaan perpustakaan, Lab IPA, Lab Bahasa, Lab Komputer.

b. Kualifikasi Pendidikan Guru

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor utama dalam mutu pendidikan. Dalam meningkatkan tersebut, salah satu upaya adalah meningkatkan standar kualifikasi pendidikan guru minimal S1. Standar kualifikasi pendidikan S1 bagi guru pada semua jenjang pendidikan belum terpenuhi. Persentasi guru yang memiliki pendidikan S1 masing-masing guru TK/RA 10 %, guru SD/MI 45 %, guru SMP/MTS 86%. Dari data tersebut pendidikan guru TK/RA dan SD/MI masih rendah bila di banding dengan pendidikan guru SMP/MTS. Untuk mencapai target guru memiliki pendidikan S1 perlu ditingkatkan program penyetaraan dengan prioritas utama guru SD/MI.

c. Kompetensi Guru

Sebagian besar kompetensi guru yang ada sebelum memenuhi standar kompetensi. Rendahnya kompetensi guru dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kualitas input yang rendah, kurang profesionalnya tenaga guru dalam mengembangkan kemampuannya. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi guru merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi guru sesuai dengan standar minimal (75%)

d. Siswa Mengulang

Siswa mengulang pada SD/MI adalah rendah (0,14%) namun sangat rawan putus sekolah. Oleh karena itu persentase angka mengulang akan lebih diperkecil lagi dalam upaya mencapai efisiensi penyelenggaraan di sekolah yang lebih optimal.

e. Prestasi Akademik

Hasil Ujian Nasional (UN) prestasi akademik siswa SMP/MTS di lihat dari ujian nasional output (lulusan) masih berkisar angka 6, artinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Prestasi akademik siswa SMP/MTS sedikit peningkatan dibanding tahun 2015/2016. Namun kisaran tingkat prestasi dengan nilai 6 merupakan batas marginal, artinya tingkat kemampuan/daya serap siswa SMP terhadap ilmu masih pada katagori sedang, yang kemungkinan bisa meningkat atau bahkan menurun. Gejala ini juga dapat di anggap sebagai kondisi ambang batas toleransi peningkatan mutu pendidikan SMP/MTS di Kabupaten Pesawaraan. Meskipun kondisi akademik siswa SMP ada peningkatan yang signifikan namun peningkatan itu masih menyimpan pertanyaan apakah peningkatan tersebut mencerminkan peningkatan mutu yang sesungguhnya atau karena ada faktor lain.

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Beberapa masalah yang dihadapi dalam penguatan tata kelola, akuntabilitas pencitraan publik pada jenjang

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah meliputi :

1. Melaksanakan MBS dengan terbatasnya kemampuan SDM guru dan kepala sekolah. Selain itu kendala pelaksanaan MBS di sekolah adalah kurangnya respon, dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen pendidikan di lingkungan sekolah dan terbatasnya sarana dan biaya dalam menggerakkan sistem tersebut.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hakekat dan fungsi pendidikan dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Kualitas manajemen sekolah masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator:
 - Masih banyak sekolah yang belum dapat menerapkan MBS
 - Kurang optimalnya peran dan fungsi sekolah
 - Kurang optimalnya tugas pokok dan fungsi guru dan kepala sekolah
 - Kurang optimalnya fungsi komite sekolah
 - Dukungan masyarakat dalam memenuhi dana operasional yang tersedia di sekolah masih jauh dari standar minimal yang diharapkan
 - Dukungan masyarakat dalam memenuhi dana operasional yang tersedia di sekolah masih jauh dari standar minimal yang diharapkan.

2. Dinas Kesehatan

a. Capaian Program dan Kegiatan

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 92.798.674.608,-

Realisasi Rp. 80.632.343.730,-

Persentase (86,89 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Obat, Vaksin
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Operasional Pelayanan Puskesmas
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayaagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia
- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- a. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
- Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan, industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga

5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota
 - Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Dinas Kesehatan kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 158.078.785.497,-

Realisasi Rp. 119.950.089.078,-

Persentase (75,88 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1. Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengama Pantai
Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan
Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
 - 2) Rehabilitasi Tanggul Sungai
 - 3) Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
2. Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000
Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 3) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Umum
 1. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perkotaan
 - 2) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 1. Kegiatan: Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan
Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
 - 2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Terpusat Skala Permukiman

e. Program Penataan Bangunan Gedung

1. Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- 2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

1. Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- 2) Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

g. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2) Pembangunan Jalan
- 3) Rekonstruksi Jalan
- 4) Pemeliharaan Berkala Jalan
- 5) Pemeliharaan Rutin Jalan
- 6) Pembangunan Jembatan
- 7) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

1. Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi
Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Kegiatan: Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Sub Kegiatan:
 - 1) Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - 2) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
2. Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

b. Permasalahan dan Solusi

Berikut beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengcover pekerjaan pekerjaan teknis (tenaga ahli)
2. Sarana dan prasarana ke-PU an yang belum memadai
3. Bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir dan lain-lain)
4. Masih terdapat konflik pemanfaatan air untuk air minum dan air irigasi
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ijin pemanfaatan ruang dan kurangnya informasi terkait perubahan sistem dari IMB ke PBG

6. Keuangan APBD yang mengalami defisit sehingga banyak kegiatan yang sudah terelaisasi 100 % secara fisik tetapi realisasi keuangannya belum terealisasi 100 %.

Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran pada tahun 2023 masih menghadapi beberapa kendala/masalah sebagaimana telah diungkapkan pada uraian sebelumnya. Berikut ini beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Perlu adanya pelatihan/ kursus yang lebih intensif tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan proyek
2. Meng-upgrade sarana dan prasarana penunjang kinerja ke-PU an
3. Melakukan analisis kondisi alam kedalam konsep perencanaan teknis
4. Melakukan analisis terhadap pemanfaatan air untuk air minum dan air irigasi
5. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait ijin pemanfaatan ruang
6. Mendorong pemangku kebijakan agar dapat menghasilkan perencanaan anggaran kegiatan guna menjamin terselenggaranya program dan kegiatan yang dapat mencapai sasaran baik dari segi waktu pelaksanaan maupun keluaran yang dihasilkan dengan fokus utama pada asas manfaat terhadap kebutuhan atau kepentingan masyarakat luas.

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Dinas PUPR KabupatenPesawaran melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Mengadakan/ mengikuti pelatihan/ kursus tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan proyek
2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kinerja
3. Mengantisipasi kemungkinan kondisi alam kedalam konsep perencanaan teknis
4. Melakukan pengukuran sumber debit air untuk pemanfaatan air dan membagi sesuai kebutuhan antara kebutuhan air minum dan air irigasi
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala terkait ijin pemanfaatan ruang

Memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur prioritas. Solusi upaya peningkatan kinerja perencanaan tahun 2024, Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran akan lebih cermat dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan efisiensi anggaran sehingga *output* dan *outcome* dapat tercapai sebagaimana target yang tertuang dalam Renstra Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 30.042.011.349,-

Realisasi Rp. 21.493.292.821,-

Persentase (71,54 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- b. Penyusunan Rencana Kerja OPD
- c. Monitoring Peliputan dan dokumentasi Kegiatan Dinas Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman
- d. Penyusunan Database dan rencana Pembangunan/ Pengembangan perumahan dan kawasan Permukiman
- 4. Pengembangan Perumahan
 - a. Pendamping Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
 - b. Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan
- 5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - a. Kegiatan Pendamping Stimulan Perumahan Swadaya
 - b. Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh
 - c. Pengawasan teknis Peningkatan Kualitas Permukiman kawasan Kumuh
 - d. Rehap Rumah Sederhana Sehat
 - e. Rehabilitasi sarana dan Prasarana pedesaan
- 6. Program Perencanaan Teknik Infrastruktur Daerah
 - a. Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman
- 7. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK dan Pendamping DAK)
 - b. Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK dan Pendamping DAK)
 - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Perdesaan
 - d. Sanitasi layak Sehat
 - e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Perdesaan (DAK dan Pendamping DAK)
- 8. Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - a. Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan Wilayah 1
 - b. Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan Wilayah 2
 - c. Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan Wilayah 3
 - d. Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan Wilayah 4
 - e. Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan Wilayah 5
 - f. Pengawasan teknis Pembangunan Jalan dan jembatan perdesaan
- 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud /Bronjong /Saluran /Draenase /Gorong-Gorong

- a. Pembangunan Saluran daenase/Gorong-gorong
- 10. Penataan Penguasaan lahan, Pemilikan Lahan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah
 - a. Perencanaan dan persiapan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pesawaran
 - b. Konsolidasi Pertanahan
 - c. Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pesawaran
- 11. Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahn
 - a. Fasilitas penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
 - b. Monitoring dan Pembinaan Batas Wilayah kabupaten pesawaran
- 12. Penyediaan dan Pengelolaan Air baku
 - a. Penunjang Kegiatan PAMSIMAS
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Perdesaaan

b. Permasalahan dan Solusi

Belum ditemukan permasalahan terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 14.654.852.321,-

Realisasi Rp. 14.261.756.041,-

Persentase (97,32 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pemeliharaan/ Pengembangan Website
 - b. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - e. Operasional Korsik dan Perawatan Alat Korsik
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
 - b. Dokumen Rencana Kerja (Renja)
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- a. Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Penertiban Alat Peraga Kampanye
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- a. Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Bahaya Kebakaran
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- a. Fasilitasi Peningkatan Nilai- Nilai Jiwa Korsa
 - b. Optimalisasi Penegakkan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah
 - c. Tim Penegak Perda
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban
- a. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - b. Pembinaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman

b. Permasalahan dan Solusi

Mengingat Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran cukup besar terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu diatasi dan dicarikan solusinya :

1. Permasalahan

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mengerti dan faham mengenai administrasi keuangan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi untuk tercapainya tujuan dan sasaran,
- b. Masih kurangnya anggaran untuk penyediaan alat tulis kantor,
- c. Masih kurangnya anggaran untuk penyediaan barang cetak dan penggandaan,
- d. Masih kurangnya anggaran pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor,
- e. Masih kurangnya anggaran yang tersedia untuk pembelian surat kabar, majalah, dan bahan bacaan yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan wawasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran,
- f. Masih kurangnya anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan perawatan alat korsik.
- g. Masih kurangnya anggaran yang dapat dipergunakan untuk penyusunan laporan capaian kinerja SKPD,
- h. Masih kurangnya anggaran yang dapat dipergunakan untuk pembayaran honorarium THLS, dan uang makan anggota Satpolpp yang guna menunjang kinerja dan menjalankan TUPOKSI Satuan Polisi Pamong Praja,
- i. Masih kurangnya anggaran yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah sehingga masih sering terjadi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

2. Solusi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah dan hambatan sehingga tidak menimbulkan kendala serupa dimasa mendatang yaitu :

- a. Memberikan pelatihan – pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih memahami adminitrasi keuangan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi,

- b. Menekan anggaran penyediaan alat tulis kantor dengan melakukan penghematan agar dengan dana minim kegiatan dapat terlaksana,
- c. Menekan anggaran penyediaan barang cetak dan penggandaan dengan melakukan penghematan agar dengan dana minim kegiatan dapat terlaksana,
- d. Menekan anggaran pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor dengan melakukan penghematan agar dengan dana yang minim kebersihan kantor tetap terjaga,
- e. Menekan anggaran untuk pembelian surat kabar, majalah, dan bahan bacaan dengan melakukan penghematan agar dengan dana minim kegiatan dapat terlaksana,
- f. Mengingat masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tapi terbatasnya anggaran yang ada, maka anggaran yang tersedia dibelanjakan untuk memenuhi perlengkapan gedung kantor yang benar- benar dibutuhkan,
- g. Menekan anggaran yang dapat dipergunakan untuk pemeliharaan rutin kendaraan operasional kantor dengan melakukan penghematan agar dengan dana minim kegiatan dapat terlaksana,
- h. Mengupayakan agar THLS yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja diangkat menjadi PNS,
- i. Meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat dan pemberdayaan PPNS serta perlu didukung dengan dana yang memadai sehingga dapat menyentuh pada sasaran yang diharapkan.

Menekan anggaran kegiatan dengan melakukan penghematan agar dengan dana minim kegiatan dapat terlaksana.

6. Dinas Sosial

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 3.354.544.731,-

Realisasi Rp. 3.180.543.527,-

Persentase (94,81 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
- c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor,
- d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- e. Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga.
- g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
- h. Kegiatan Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman.
- i. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Renja OPD
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - a. Pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin pedesaan
 - b. Pendamping keluarga harapan (PKH)
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT)
 - d. Penanganan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang cacat dan Eks trauma
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
 - b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam / Bencana Sosial
7. Program Lingkungan Sehat
 - a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pedesaan
 - b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Terkecil
8. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial

- a. Optimalisasi kinerja dalam pembangunan kesejahteraan sosial bagi TKSM/PSM
 - b. Pembinaan Peran Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Rangka Lomba desa.
 - c. Bulan Bhakti Karang Taruna.
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - a. Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu.
 10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Pemanfaatan Jasa Komunikasi Untuk Penyampaian Informasi

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun 2023 disebabkan oleh Efisiensi belanja kegiatan dan belum adanya Solusi

7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 4.019.784.941,-

Realisasi Rp. 3.853.438.358,-

Persentase (95,86 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;

- c. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Dengan Sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dengan Sub kegiatan :
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi;

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dengan Sub kegiatan :
 - Pemberdayaan, Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Pengembangan UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
Dengan Sub kegiatan :
 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang di hadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

- Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Pameran / Promosi Hasil Koperasi yang sebelumnya di targetkan 2 event yaitu dalam rangka Harkopnas dan Harkopprov. Hanya bisa diikuti 1 event saja yaitu Harkopnas. Hal ini terjadi karna ada rasionalisasi anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sehingga untuk event Harkopprov tidak bisa diikuti. Untuk tahun anggaran 2024 event Harkopprov mudah-mudahan dapat kami ikuti kembali hal ini sudah dapat kita anggarakan kembali.

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 14.701.435.096,-

Realisasi Rp. 13.553.848.956,-

Persentase (92,19 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanju bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - e. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak baLembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat DaeKabupaten/Kota

II. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
 - i. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
 - a. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - b. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 - c. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/PenyuluhLapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - d. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - e. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - g. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasil Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan

Kesertaan Ber-KB Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dan

- h. Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Peserta Ber-KB
 - i. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak terealisasi 100% disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki Kabupaten Pesawaran atau tidak terbayarkan sedangkan beberapa pengajuan pencairan telah dilakukan.

Pelaksanaan Biaya Mediko Legal korban kekerasan tidak terealisasi secara optimal, hal ini disebabkan sebagian besar korban kasus kekerasan yang menggunakan pelayanan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung yang tidak bisa diklaim (gratis).

Solusi

Penyusunan dan perencanaan anggaran sebaiknya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan data yang ada sehingga penyerapan dana dapat dilakukan dengan maksimal dan efisiensi anggaran di tahun berikutnya

9. Dinas Ketahanan Pangan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 4.351.593.626,-

Realisasi Rp. 4.181.311.001,-

Persentase (96,09 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - h. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Akhir Tahun; dan
 - c. Ekpose Capaian Pembangunan
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
 - b. Pengembangan Lumbung Pangan Desa dan Lantaijemur;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
 - d. Lomba Cipta Menu, Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman;
 - e. Pemantauan Dan Analisis Kebutuhan Pangan Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
 - f. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Mandiri;
 - g. Pengisian Cadangan Pangan;

- h. Pemantauan Panen, Harga Dan Penyerapan Gabah/Beras;
- i. Penyusunan Pola Pangan Harapan; dan
- j. Pengembangan Sistem Informasi Pasar.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik hanya dapat memenuhi sebesar 67,50% dari kebutuhan, dikarenakan pemakaian listrik kurang dari anggaran.

Solusi

Jumlah tagihan lebih kecil dari jumlah dana yang dianggarkan, oleh karena itu anggaran perlu disesuaikan dengan tagihan.

10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 16.872.929.653,-

Realisasi Rp. 14.239.014.266,-

Persentase (84,39 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - h. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

- d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Penyusunan Renja OPD
 - d. Penyusunan Data Aset
 - e. Publikasi Informasi Pembangunan Pertanian Daerah
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a. Pembinaan Petani Tembakau (DBH-CHT)
 - b. Pendampingan Fasilitas Pembiayaan Pertanian AUDP (Asuransi Usaha Tani Padi)
 - c. Stimulasi Partisipasi Masyarakat
 - d. Sekolah Lapang tani/farmer field school (IPDMIP)
 - e. Catatan Usaha Tani
 - f. Forum Temu Tani (IPDMIP)
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
 - a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
 - b. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
 - c. Kontes Buah Unggulan Kabupaten Pesawaran
6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
 - a. Pengendalian OPT Tanaman Pangan
 - b. Pengelolaan UPT BBU
 - c. Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura
 - d. Pengembangan Bibit Unggul Lokal Tanaman Hortikultura
 - e. Pengembangan Pasar Lelang Komoditas Tanaman Hortikultura
 - f. Rehabilitasi Tanaman Kakao
 - g. Pemeliharaan Kebun Entres Kakao
 - h. Pengembangan Desa Mandiri Benih
 - i. Pembuatan SID
 - j. Pendampingan Kegiatan Tugas Pembantuan dan UPSUS Pajale
 - k. Pembangunan Jalan Pertanian, Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani
 - l. Penyimpanan Benih untuk Usaha Tani (IPDMIP)

7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
 - a. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
 - b. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
 - c. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian
 - d. Fasilitas Rembuk Pembangunan Pertanian
 - e. Peningkatan kemampuan Kelompok Petani
 - f. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyuluhan
 - g. Rekrutmen Staf Lapangan (IPDMIP)
 - h. Kunjungan Antar Desa per Kecamatan (IPDMIP)
 - i. Pertemuan Bulanan Penyuluh (IPDMIP)
 - j. Penghargaan Bagi Petani (IPDMIP)
 - k. Penghargaan Bagi Penyuluh (IPDMIP)
 - l. Renovasi Gedung BPP (DAK)
8. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - a. Pengendalian dan Pencegahan Flu Burung (A1), Penyakit Rabies dan Penyakit Ternak
 - b. Pengawasan Keamanan Produk Pangan Asal Hewan (ASUH)
9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
 - a. Fasilitas Rembuk Ternak
10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - a. Peningkatan Aplikasi Teknologi IB
11. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
 - a. Validasi Data Statistik Pertanian
12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - a. Demonstrasi Alsintan (IPDMIP)
 - b. Demonstrasi lainnya (IPDMIP)
13. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
 - b. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
 - c. Pembangunan Dam Parit (DAK)
 - d. Pembangunan Long Storage (DAK)
 - e. Pembangunan Embung (DAK)
 - f. Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal (DAK)
 - g. Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pertanian (Retensi)

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

11. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi	Rp. 349.280.000,-
Realisasi	Rp. 209.149.200,-
Persentase	(59,88 %)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - g. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
 - i. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Kegiatan Sewa kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran
 - c. Kegiatan Penyusunan Renja OPD

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a. Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - b. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan persampahan
 - c. Kegiatan Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
 - d. Kegiatan Pemutakhiran Data
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pengawasan Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup
 - b. Kegiatan B3 dan Limbah B3
 - c. Kegiatan Pembuatan Laporan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/proper kabupaten
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - a. Kegiatan Pemeliharaan RTH
 - b. Kegiatan Penyediaan operasional dan pemeliharaan LPJU
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa penerangan lampu jalan
7. Program Pengembangan data/informasi/statistic daerah
 - a. Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan /SILH
 - b. Kegiatan Pengelolaan Website
8. Program Pengendalian dan Pemamfaatan Ruang
 - a. Pengendalian dan Penguatan dokumen perizinan Lingkungan
 - b. Fasilitasi Sengketa Lingkungan
 - c. Penyusunan daya dukung daya tampung/DDDT

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 disebabkan oleh Defisit Anggaran

12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 4.319.902.641,-

Realisasi Rp. 3.852.460.580,-

Persentase (89,18 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
 - b. Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor
 - d. Kegiatan Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga
 - g. Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Expose Capaian Pembangunan
4. Penataan Administrasi Kependudukan
 - a. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
 - b. Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Data Agregat dan laporan
 - c. Kegiatan Pemeliharaan, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Catatan Sipil
5. Program Perencana Pembanguna Daerah
 - a. Pengolahan informasi dan dokumentasi kependudukan

b. Permasalahan dan Solusi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran belum menemukan kendala yang menghambat pelaksanaan dan realisasi keseluruhan program kegiatan Tahun Anggaran 2023.

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 4.539.321.082,-

Realisasi Rp. 4.183.558.846,-

Persentase (92,16 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
 - c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

b. Permasalahan dan Solusi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran belum menemukan kendala yang menghambat pelaksanaan dan realisasi keseluruhan program kegiatan Tahun Anggaran 2023.

14. Dinas Perhubungan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 9.114.010.687,-

Realisasi Rp. 8.914.134.554,-

Persentase (97,81 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - Administasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
3. Program Pengelolaan Pelayaran
 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembambunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

b. Permasalahan dan Solusi

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Permasalahan:

- Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), Teknis di bidang Perhubungan.

- Tenaga Struktural dan Pelaksana sebagian besar belum mengikuti Pendidikan dan Diklat Tekhnis Bidang Perhubungan.

- Terbatasnya anggaran pembangunan Bidang Perhubungan

Solusi:

- Melaksanakan MoU dengan PTDI-STTD Bekasi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis di bidang Perhubungan

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Permasalahan:

- Belum adanya fasilitas gedung bangunan Terminal.
- Fasilitas jalan banyak yang belum terpenuhi seperti rambu lalu lintas, Warning Light, Guardrail Pembatas Jalan, RPPJ penunjuk Arah, dll.

Solusi:

- Aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung untuk pengadaan sarana dan prasaran serta fasilitas keselamatan di jalan raya.

- Program Pengelolaan Pelayaran

Permasalahan:

- Terbatasnya tenaga profesi Bidang Perhubungan dan rendahnya keterampilan tekhnis staf/pelaksana tugas dibidang Perhubungan.
- Fasilitas alat keselamatan di atas kapal terbatas.

Solusi:

- Aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP Kelas I Panjang untuk pengamanan dan kelancaran lalu lintas penyeberangan.

15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 12.334.005.661,-

Realisasi Rp. 11.522.001.444,-

Persentase (93,42 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - b. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
 - d. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - f. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - g. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
 - h. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - c. Penyusunan renja opd
 - d. Operasional pusat informasi potensi pembangunan daerah Kab. Pesawaran
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Web Pemkab Pesawaran
 - b. Kegiatan Pengembangan Pesawaran One Center
5. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - a. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
 - b. Kegiatan Pengadaan Bahan Publikasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran
 - c. Kegiatan Pengelolaan informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten pesawaran
 - d. Kegiatan Operasional tim pengelola keterbukaan informasi public
 - e. Pengembangan Jaringan Pos Telekomunikasi dan Penyiaran

6. Program Pemanfaatan Ruang
 - a. Penataan Zonasi Cell
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - a. Pengembangan Jaringan Pos Telekomunikasi dan Penyiaran
8. Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah
 - a. Pengembangan Literasi Data, Informasi, dan Statistik Sektoral

b. Permasalahan dan Solusi

1. Jajaran OPD di Pemkab Pesawaran meningkatkan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terkait program kegiatan yang dilaksanakan agar terpublikasi;
2. Peningkatan kapasitas SDM Pranata Humas terkait dengan pembuatan press release kegiatan diseluruh OPD untuk dipublikasikan melalui Media Massa, Website, maupun Media Sosial yang dikelola oleh Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;
3. Dibutuhkan Regulasi (Perda/Perbup) terkait klasifikasi dan kerjasama Media Massa dengan Pemkab Pesawaran serta penetapan kerjasama oplah pada OPD
4. Pembentukan Tim Survey Desa Blankspot dalam mengatasi daerah yang belum tercover jaringan telekomunikasi dengan cara turun bersama dengan pihak Provider ke lokasi/daerah Blankspot. Selain itu, menggunakan sistem penembakan sinyal dari menara terdekat dan pemasangan repeater jaringan telekomunikasi (induksi sinyal) maupun pembangunan menara Telekomunikasi (BTS) Newsite
5. Dibutuhkan kolaborasi yang optimal dengan pihak akademisi/ Stake holder dalam rangka penerapan / pelaksanaan tingkat kematangan indikator SPBE.

Saran :

2. Diharapkan kedepan dapat meningkatkan kerjasama dengan Media Massa dalam hal publikasi maupun berlangganan oplah koran sehingga dapat membantu penyebaran informasi pembangunan daerah kabupaten Pesawaran kepada Masyarakat sesuai yang diharapkan.
3. Diharapkan kedepan dapat mewujudkan kerjasama dengan akademisi/stake holder terkait dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 5.012.675.126,-

Realisasi Rp. 4.313.774.175,-

Persentase (86,06 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluan Usaha Kabupaten/Kota
- 3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 4. Program Pengendalian Penanaman Modal (DAK NON FISIK)
 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

❖ Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

b. Permasalahan dan Solusi

Realisasi anggaran DPMPTSP Tahun 2023 sebesar 86,06%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terealisasi dikarenakan Devisit Anggaran

17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 5.620.305.592,-

Realisasi Rp. 4.367.521.017,-

Persentase (77,71 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
 - h. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Sewa Kantor
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- a. Fasilitas Aksi Bakti Sosial Kepemudaan
- b. Penjangkauan dan Pembinaan Paskibraka
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - a. Pengembangan Olahraga Rekreasi
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana keolahragaan
 - b. Monitoring evaluasi dan Pelaporan
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Penyusunan system informasi terhadap layanan public

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang masih dihadapi antara lain :

- a. Tingginya tingkat pengangguran terbuka;
- b. Belum Terpolanya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
- c. Rendahnya Minat dan Budaya Berolahraga
- d. Belum Terpolanya Pemasaran dan Pembibitan Olahraga
- e. Belum optimalnya Koordinasi antara Organisasi Pemuda dan Pemberdayaan Organisasi Pemuda.
- f. Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemuda dan Olahraga.

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 14.961.645.010,-

Realisasi Rp. 14.259.533.536,-

Persentase (95,31 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan
 - h. Penyediaan Makan dan Minum rapat
 - b. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - e. Sewa Kantor
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 4. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Renja OPD
 - d. Ekspose Capaian Prioritas Pembangunan
 5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
 - a. Lomba Cerita Tingkat Kabupaten
 - b. Supervisi, Pembinaan, dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
 - c. Penyediaan Bahan Pustaka Umum dan Daerah
 - d. Pemeliharaan dan Pengolahan Buku Bacaan
 - e. Pelayanan Perpustakaan Dengan Mobil Keliling
 6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
 - a. Pengumpulan dan Pemeliharaan Arsip Statis
 - b. Pengumpulan Dokumentasi Kearsipan Bernilai Sejarah
 - c. Penyusunan Prolegda Kearsipan
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
 - e. Bimtek Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta
 - f. Pengelolaan Informasi dan Dokumen Daerah

- g. Lomba Mewarnai Gambar, Pahlawan / Bernilai Sejarah Tingkat Kabupaten

b. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
 - a. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan.
 - b. Belum Tersedianya SDM Pengelola Kearsipan (Arsiparis.
 - c. Belum Tersedianya SDM Pengelola Perpustakaan dan juga Staf.
2. Solusi
 - a. Diberikan Anggaran Untuk Sarana Dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan.
 - b. Pejabat Struktural yang sudah dinyatakan lulus oleh Arsip Nasional (Inpasing) dari pejabat Struktural ke fungsional segera dilantik.

19. Dinas Perikanan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.076.900.000,-

Realisasi Rp. 564.810.000,-

Persentase (52,45 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
 - h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - i. Penyediaan Bahan Kebersihan Kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - b. Penyusunan Rencana Kerja OPD
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - a. Operasional Balai Benih Ikan
 - b. Penyediaan Benih dan Pakan Ikan Bagi Pembudidaya
 - c. Operasioanal POSIKANDU
 - d. Standarisasi Pengelolaan Budidaya Perikanan Darat/ CBIB
 - e. Pemberdayaan Pembudidayaan dan Pendampingan Program KKP
 - f. Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar di Kolam Terpal (DAK)
 - g. Inventaris Produksi Perikanan Budidaya
 - h. Pembinaan Pokdakan dan Penilaian Peningkatan Kelas Kelompok
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - a. Pembinaan Nelayan dan Pendampingan Program Kartu Nelayan
 - b. Penyediaan Alat Tangkap Ikan untuk Nelayan (DAK)
 - c. Penyediaan Mesin Perahu Nelayan Kecil
 - d. Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil dan Penilaian Kelas Kemampuan KUB
 - e. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan
 - b. Inventarisasi Produksi Perikanan Tangkap
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - a. Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
 - b. Penyediaan dan Operasional Aquarium di Kantor Pemda Pesawaran
 - c. Pembinaan Usaha Bagi POKLAHSAR
 - d. Pengembangan Pasar Ikan (Ikan Konsumsi dan Ikan Hias)
 - e. Penyediaan Sarana Rantai Dingin
7. Program Usaha Agrobisnis Perdesaan
 - a. Pelatihan Bagi Pembudidaya Ikan
8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - a. Pengembangan Teknologi Informasi Melalui Website Dinas
9. Program Pemanfaatan Ruang
 - a. Inventarisasi Potensi Perikanan sesuai dengan RT/RW Kabupaten Pesawaran.

10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a. Monitoring Perizinan Usaha Perikanan

b. Permasalahan dan Solusi

Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran belum menemukan kendala yang menghambat pelaksanaan dan realisasi keseluruhan program kegiatan Tahun Anggaran 2023.

20. Dinas Pariwisata

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 5.007.803.518,-

Realisasi Rp. 4.446.623.178,-

Persentase (88,79 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- I Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - A. *Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - B. *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - C. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- II Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - A. *Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*
 - 1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- III Program Pemasaran Pariwisata
 - A *Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*

1. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- IV Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - A *Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*
 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

b. Permasalahan dan Solusi

Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran belum menemukan kendala yang menghambat pelaksanaan dan realisasi keseluruhan program kegiatan Tahun Anggaran 2023.

21. Dinas Perkebunan dan Peternakan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 5.860.069.860,-

Realisasi Rp. 4.587.399.816,-

Persentase (78,28 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - B Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - C Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- D Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - B Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
 - C Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- III PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
 - A. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - B Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- IV PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 - A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 8.241.826.459,-

Realisasi Rp. 6.753.907.069,-

Persentase (81,95 %)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - b. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Renja OPD
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a. Kegiatan Fasilitasi Sarana Produksi Industri Kecil Dan Menengah (IKM)

- b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Pendampingan, Promosi dan Pameran IKM
- c. Kegiatan Bantuan Mesin Dan Peralatan Industri Kecil
- b. Kegiatan Pelatihan Ditempat Kerja / Magang Bagi Industri Kecil Kerajinan
- c. Kegiatan Operasional Sekretariat Dekranasda Kabupaten Pesawaran
- d. Monitoring dan Pemutakhiran Data (IKM)
- e. Bimtek Achievement Motivation Training (AMT)
- 6. Program Penataan Struktur Industri Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
 - a. Kegiatan Operasional Pabrik Mini Pengolahan Kakao
 - b. Kegiatan Bimtek Bagi Pelaku Industri Kecil Kerajinan Baru
- 7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - a. Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP
 - b. Pembangunan Pasar Rakyat (DAK)
 - a. Pasar Murah Bersubsidi
 - b. Penataan Tempat Berusaha Bagi Para Pedagang
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Pasar
 - c. Pemantauan kebutuhan Pokok Masyarakat, Informasi Stock dan Barang Strategis
 - d. Penyuluhan dan Pembinaan bagi Pengelola Pasar
 - e. Sosialisasi Akses Permodalan para Pedagang
 - f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - g. Sosialisasi Alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya
 - h. Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar dan ber SNI Wajib

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023. Program kegiatan berlangsung dengan baik.

23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 6.151.222.767,-

Realisasi Rp. 5.865.068.504,-

Persentase (95,35 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan
 - e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- b) Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya
 - b) Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - c) Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah
 - d) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - e) Penyiapan Bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - f) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2. Analisis Data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a) Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
 - b) Penyusuna profil pembangunan daerah kabupaten/kota
 - 3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencnan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - d) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - e) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- f) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - a) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - c) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - e) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - d) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
 - e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan
 - g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Kewilayahan

b. Permasalahan dan Solusi

Semua kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada program kegiatan yang mengalami permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja organisasi.

Permasalahan :

1. Kurangnya tenaga profesional baik kualitas maupun kuantitas dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sehingga mengalami kendala yang berkaitan dengan kinerja organisasi.
2. Sumber data primer untuk bahan dasar perencanaan, Tingkat validitasnya belum optimal sehingga menimbulkan kurangnya integrasi perencanaan dan tahapan-tahapan perencanaan.
3. Penyampaian laporan Evaluasi hasil Renja dari masing-masing OPD tidak tepat waktu, sehingga penyampaian ketingkat Provinsi terlambat.

Solusi :

1. Diperlukannya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara dalam meningkatkan kemampuan aparatur perencanaan daerah.
2. Sistem informasi pembangunan perencanaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi untuk mendapatkan data informasi Pembangunan daerah yang valid.
3. Koordinasi antar OPD sehingga penyampaian laporan Evaluasi hasil Renja oleh setiap OPD tepat waktu.

24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 268.281.994.546,-

Realisasi Rp. 254.479.853.173,-

Persentase (94,86 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - e. Sewa Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
5. Program Peningkatan Kapasitas, Pembinaan, Fasilitas dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
 - b. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesawaran
 - f. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
 - g. Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan Keuangan Daerah
 - h. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - i. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- j. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan / Semester / Prognosis
 - k. Pengelolaan Pertanggungjawaban dan Realisasi SPJ Bulanan SKPD
 - l. Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Transfer Dana Pemerintah Pusat dan Provinsi
 - m. Penyusunan dan Pengendalian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD
 - n. Konsolidasi dan Rekonsiliasi Perbendaharaan atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pengelolaan Kas Daerah
 - o. Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah
 - p. Pengelolaan Hibah dan Bantuan SKPKD dan SKPD
 - q. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran
 - r. Penyusunan dan Verifikasi Penyerapan Anggaran SKPD dan SKPKD
 - s. Pelaksanaan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
 - t. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD)
 - u. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - v. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS)
6. Program Peningkatan dan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah
- a. Rekonsiliasi Data Base Barang Milik daerah (BMD) SKPD
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pesawaran (RKBMD)
 - c. Kodefikasi Barang Milik Daerah
 - d. Penghapusan Barang Milik Daerah
 - e. Pendampingan SIMDA BMD dan Penentuan Nilai Penyusutan BMD
 - f. Pengelolaan Stock & Cash Opname Barang Persediaan SKPD
 - g. Pengamanan Aset Daerah
 - h. Penataan database BMD Kabupaten Pesawaran

b) Permasalahan dan Solusi

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

25. Badan Pendapatan Daerah

a) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 9.635.108.234,-

Realisasi Rp. 8.773.468.665,-

Persentase (91,06 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan, Sopir dan Keamanan
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - i. Penyediaan Makan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Ekspose Capaian Pembangunan
 - d. Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah Pembantu (PPID)

- e. Penyusunan Renja OPD
- 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Verifikasi Objek Pajak PBB dan BPHTB
 - b. Pengawasan dan Kepatuhan Pajak Daerah
 - c. Pendataan Objek dan Subjek PBB dengan Cara Indentifikasi Verifikasi/Pengukuran Objek Pajak Individu
 - d. Fasilitasi dan Evaluasi Pemungutan PBB-P2
 - e. Penyampaian SPPT PBB
 - f. Penyelenggaraan Pelayanan SPPT dan BPHTB
 - g. Pendataan Objek Pajak Parkir Kabupaten Pesawaran
 - h. Validasi Piutang Pajak Daerah
 - i. Penyuluhan pajak dan Retribusi Daerah
 - j. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
 - k. Monitoring dan Evaluasi Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daerah
 - l. Rekonsiliasi Pajak Restoran Dana APBD dan APBN
 - m. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
 - n. Penertiban Pajak Daerah Lainnya
 - o. Rekonsiliasi Data PLN
 - p. Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
 - q. Penagihan PBB-P2 dan BPHTB
 - r. Pendataan Objek Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam
 - s. Penagihan Pajak Daerah
 - t. Pendataan, pendaftaran, penetapan objek pajak daerah lainnya
 - u. Pembuatan Laporan Realisasi PAD dan APBD
 - v. Penerbitan SPPT PBB-P2
 - w. Sistem Informasi Manajemen PAD
 - x. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah

b) Permasalahan dan Solusi

Kabupaten Pesawaran saat ini memiliki 11 (sebelas) Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dimungkinkan menemui permasalahan, adapun permasalahan

yang menjadi kendala. Berdasarkan Data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) pada Tahun 2017 diperoleh hasil tunggakan PBB P2 Yang tersebar di 11 Kecamatan 144 Desa termasuk 4 Desa Hasil Pemekaran pada tahun 2017. Luas wilayah yang cukup besar dan keterbatasan sumber Pendapatan dan Pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan skala prioritas dan masih rendahnya sumber daya manusia taupun aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran serta kekurangan personil untuk penagihan yang wajib pajaknya berdomisili di luar wilayah Kabupaten Pesawaran. Dalam mengatasi permasalahan diatas strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran pada umumnya dan Bidang Pajak Daerah Lainnya yang mempunyai tugas menghimpun, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Pajak Daerah Lainnya merumuskan kiat-kiat yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pertama koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelolaan PAD terutama pada sektor pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran diharapkan dengan mengintensifkan penagihan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum ditemukan. Kemudian tahap kedua pengawasan, hal ini diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan dilapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administrative terhadap hasil pemungutan pajak daerah secara khusus, kemudian tahap evaluasi, pada tahap ini evaluasi setiap program kerja dan kegiatan bidang diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidentil tetapi dilakukan berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi lain seperti kecamatan sehingga perkembangan penerimaan PAD akan optimal, serta melakukan peneriban, pembinaan dan sosialisasi pajak daerah kepada para wajib pajak sebagai solusi yang ditempuh.

- a) Penambahan personil di bidang pelayanan pendapatan yang disertai pelatihan peningkatan kualitas SDM.
- b) Pemutakhiran data wajib pajak dan peningkatan pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.
- c) Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam partisipasi membayar pajak.

26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 5.325.466.556,-

Realisasi Rp. 4.804.680.523,-

Persentase (90,22 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
 - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan .
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Seleksi Izin Belajar dan Tugas Belajar
 - c. Diklat Prajabatan
 - d. Diklat Fungsional
 - e. Diklat Kepemimpinan Tk. II, III dan IV
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - c. Penyusunan Dokumen RENJA OPD
 - d. Ekspose Capaian Pembangunan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - a. Penyusunan Kebutuhan dan Penetapan Formasi Pegawai
 - b. Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural
 - c. Penataan Sistem Adm. Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
 - d. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran disiplin PNS
 - e. Alih Tugas PNS
 - f. Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional
 - g. Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
 - h. Pembinaan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
 - i. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
 - j. Validasi Tenaga Kontrak
 - k. Pensiun PNS
 - l. Pemberian Penghargaan SLKS PNS
 - m. Penerbitan Kartu-kartu Kpegawaian
 - n. Seleksi Penerimaan CPNS
 - o. Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
 - p. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
 - q. Pengelolaan Dokumentasi/Arsip Kepegawaian

b) Permasalahan dan Solusi

- 1) Alokasi Pagu anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebelum perubahan sebesar Rp. 5.200.957.276,- terjadi penambahan anggaran sehingga anggaran yang ada menjadi Rp. 5.325.466.556,- atau bertambah sebesar Rp. 124.509.280,-
- 2) Bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun 2023 menjadi masukan terhadap penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Pesawaran tahun 2023. Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 antara lain disebabkan karena tidak terlaksananya kegiatan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), hal ini disebabkan karena penilaian target pencapaian kinerja masih sesuai dengan yang diharapkan, sehingga evaluasi oleh PPK terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama belum dibutuhkan. selain itu pada kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian terdapat anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat terserap, hal ini disebabkan karena pelaksanaan updating data dan asistensi pendampingan dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Kemudian pada

kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdapat anggaran perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap, hal ini disebabkan karena pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat diikuti melalui zoom meeting, sehingga anggaran perjalanan dinas yang seharusnya untuk mengikuti acara-acara tersebut tidak dapat terserap.

- 3) Solusi upaya peningkatan kinerja untuk perencanaan tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran akan lebih cermat dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan Efisiensi anggaran sehingga output dan outcome dapat tercapai sebagaimana target dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Pesawaran.

27. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

a) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 2.739.060.369,-

Realisasi Rp. 2.554.852.549,- (93,27 %)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Sewa Kantor
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Renja
4. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
 - a. Dewan Riset Daerah (DRD)
 - b. Kajian Bidang Pemerintahan dan Kesra
 - c. Kajian Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - d. Kajian Bidang SDA dan Lingkungan

b) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan tugas adalah :

1. Masih Minimnya anggaran untuk mendukung Program dan Kegiatan
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas
3. Masih terbatasnya Personil, yaitu jumlah dari 8 Sub Koord /kasubag hanya memiliki 7 personil Staf.
4. Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah masih sewa Rumah masyarakat.

Solusi

1. Perlu adanya Dukungan Penambahan Anggaran Balitbang dalam menopang Program dan Kegiatan
2. Perlu adanya dukungan menambah sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengajukan permohonan permintaan penambahan staf.

28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 52.020.118.978,-

Realisasi Rp. 46.719.791.616,-

Persentase (89,81 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan , supir dan Keamanan
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - h. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung kantor.
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor.
 - c. Pengadaan Meubelair.
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Penyediaan Jasa/Sewa rumah Jabatan, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun
 - d. Penyusunan RENJA dan RKA
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - b. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.
 - c. Kegiatan Reses.

- d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
- e. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- f. Perda Prakarsa DPRD.
- g. Penyelenggaraan Kehumasan DPRD.
- h. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
- i. Medical Check up Pimpinan dan Anggota DPRD

b) Permasalahan dan Solusi

Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

29. Sekretariat Daerah Kabupaten

a) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 60.481.683.697,-

Realisasi Rp. 56.802.333.932,-

Persentase (93,92 %) sebagaimana terlampir diurai menjadi 12 (dua Belas) Bagian pada Matriks I.

b) Permasalahan dan Solusi

Akan diurai pada Organisasi Perangkat Daerah 12 Bagian sebagai berikut :

1) Bagian Tata Pemerintahan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 200.000.000,-

Realisasi Rp. 192.430.000,-

Persentase (96 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

2) Bagian Hukum

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Hukum Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 300.000.000,-

Realisasi Rp. 229.747.081,-

Persentase (76,58 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Hjkum Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
- 1.1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
- 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2023 antara lain disebabkan :

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain.

3) **Bagian Organisasi**

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Organisasi
Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 492.500.000,-

Realisasi Rp. 490.277.280,-

Persentase (99,54 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Organisasi
Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Penataan Organisasi

- a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata Laksana

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran tahun
2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari
Program dan Kegiatan.

4) **Bagian Kerjasama**

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Kerjasama
Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 192.500.000,-

Realisasi Rp. 188.910.000,-

Persentase (98,14 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Kerjasama
Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri
 - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

- Evaluasi Kerjasama

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

5) Bagian Kesejahteraan Rakyat

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 11.191.116.000,-

Realisasi Rp. 9.189.847.695,-

Persentase (82 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

6) Bagian Sumber Daya Alam

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Sumber Daya Alam Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 192.500.000,-

Realisasi Rp. 192.500.000,-

Persentase (100 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Sumber Daya Alam Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan Pemantauan, Kebijakan Sumber Daya Alam

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Wilayah Kabupaten Pesawaran merupakan wilayah yang sangat luas yang kaya akan potensi sumber daya alam sehingga untuk mendata dan melakukan monitoring di butuhkan anggaran yang lebih besar.
2. Belum tersedianya sumber daya alam manusia yang kompeten di bidang Sumber Daya Alam.
3. Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan belum memadai.

Solusi

1. Kedepannya agar dapat di anggarkan lebih besar sehingga kegiatan monitoring sumber daya alam dapat mencakup keseluruhan wilayah di kabupaten pesawaran.
2. Kedepannya agar dapat bekerja sama dengan Tenaga Ahli akademis dan pihak-pihak yang kompeten dan profesional di Bidang Sumber Daya Alam sehingga Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam lebih Optimal.
3. Pengajuan usulan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Sumber Daya Alam.

7) **Bagian Umum**

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Umum Setdakab.
Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.970.230.000,-

Realisasi Rp. 1.949.451.000,-

Persentase (98,95 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Umum
Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2023 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - 1.1.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 1.2.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.2.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 1.3.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 1.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1.5.1. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.5.2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

1.6. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

1.6.1. Pelaksanaan Medical Check UP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.6.2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.7. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

1.7.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

1.7.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Wakil Daerah

1.7.3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Bagian Umum Setdakab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

8) Bagian Administrasi Pembangunan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 292.500.000,-

Realisasi Rp. 289.491.653,-

Persentase (98,97 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan.
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.

- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Permasalahan dan Solusi

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa hambatan yaitu :

- Perlu mengupdate Sistem SSH-ASB Pesawaran dan Sistem Informasi Administrasi Pelaporan (SIAP).
- Perlu adanya perbaikan peralatan pendukung pekerjaan seperti computer dan printer.

9) Bagian Perekonomian

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Perekonomian Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 192.500.000,-

Realisasi Rp. 188.567.148,-

Persentase (79,6 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Perekonomian Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2. Sub kegiatan meliputi :
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Bagian Perekonomian Setdakab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

10) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapat

an Belanja Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 732.500.000,-

Realisasi Rp. 732.360.000,-

Persentase (99,8 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)
3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

11) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 2.566.000.000,-

Realisasi Rp. 2.565.359.000,-

Persentase (99,98 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Fasilitasi Keprotokolan
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan

12) Bagian Perlengkapan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bagian Perlengkapan Setdakab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 11.769.868.593,-

Realisasi Rp. 11.008.467.610,-

Persentase (93,53 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Perlengkapan Setdakab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pengadaan mebel
- Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lain

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Bagian Perlengkapan Setdakab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

30. Inspektorat

a) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 9.539.931.952,-

Realisasi Rp. 8.873.191.168,- (93,01 %)

sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 8. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman
 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
 4. Sewa Kantor
 5. Penyedia Jasa Kom,Sumber daya air dan Listrik
 6. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 7. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 8. Rekrutmen/seleksi Auditor melalui jalur Pengangkatan Pertama
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan dan Reviu rencana Strategis SKPD
3. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
4. Pendidikan dan pelatihan Formal
5. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun
6. Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis SKPD
7. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
8. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Komprehensif
9. Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan
10. Pemutakhiran Data Irjen Depdagri dan BPK
11. Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
12. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)
13. Reviu Rencana kerja Anggaran (RKA)SKPD
14. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan jasa dan Penyerapan dana Desa
15. Pengawasan LHKPASN
16. Operasional Tim satgas Unit Pemberantasan Pungli
17. Evaluasi Sistem Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
18. Operasionalisasi Unit pengendalian gratifikasi
19. Reviu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
20. Evaluasi SPIP
21. Reviu Renja OPD
22. Evaluasi Penyelenggara Pemerintah daerah, pelayanan publik dan evaluasi pelaksanaan Apebedes
23. Whistleblowing system(WBS)
24. Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapong Anggaran Sementara (PPAS)
25. Reviu Alokasi Khusus (DAK)
26. Pengawasan dengan tujuan tertentu
27. Pengembangan Fropesi APIP
28. Pembentukan Unit Kerja Zona integritas
29. Sosialisasi Pencegahan Korupsi
30. Koordinasi Tim pengawal dan pengamanan dan pembangunan daerah (TP4D)
31. Pemeriksaan kasus Pengaduan
32. Tindak lanjut hasil pemeriksaan
33. Ekspose Capaian pembangunan
34. Survei Penilaian Integritas Pembuatan WEB SITE OPD

b) Permasalahan dan Solusi

Pada Inspektorat Daerah kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

31. Kecamatan

1) Kecamatan Gedong Tataan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Gedong Tataan kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 2.004.968.011,-

Realisasi Rp. 1.891.769.405,-

Persentase (94,35 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Gedong Tataan kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Anggaran sebesar Rp. 2.846.200,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.846.200,- atau 100 % yang telah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan kantor.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Anggaran sebesar Rp. 1.674.013.811,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.588.029.855,- atau 94,86 % yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Petugas Tenaga Kontrak (PTK) serta pengelola keuangan kantor.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Anggaran sebesar Rp. 118.478.000,- telah terealisasi sebesar Rp.110.897.800,- atau 93,60 % yang telah dipergunakan untuk pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Anggaran sebesar Rp. 57.300.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.620.050,- atau 70,89 % yang telah dipergunakan untuk pembayaran jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa pelayanan umum kantor.

5. *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

Dengan Anggaran sebesar Rp. 136.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.825.500,- atau 98,79 % yang telah dipergunakan untuk pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan sarana dan prasarana gedung kantor.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. *Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*

Dengan Anggaran sebesar Rp. 13.600.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.300.000,- atau 90,44 % yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan dana yang dipergunakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. *Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*

Dengan Anggaran sebesar Rp. 2.250.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.250.000,- atau 100 % yang telah dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum sesuai kebutuhan kantor.

b. Permasalahan dan Solusi

1. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dirasakan sementara ini antara lain :

- a. Penyediaan dana rutin bagi kecamatan yang dirasakan sangat minim sehingga untuk mendukung operasional kegiatan perlu ditingkatkan.
- b. Dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Gedong Tataan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti peralatan kantor sudah cukup lama digunakan sehingga harus senantiasa hati-hati karena sering rusak dan perbaikan terus menerus seperti komputer dan printer. Sedang sarana dan

prasarana yang lain juga mengharapkan pergantian contoh lemari banyak arsip-arsip yang tidak dapat disimpan dalam lemari atau failing karena sudah penuh tidak muat lagi sehingga penempatan arsip-arsip surat menggunakan kardus-kardus aqua yang tidak terpakai.

2. SOLUSI

Sekalipun dihadapkan pada beberapa permasalahan yang ada, namun dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta dalam rangka tetap menjaga optimalisasi kinerja, maka kami selalu melakukan koordinasi secara intensif dengan Uspika dan jajaran Dinas / Instansi Kecamatan serta Kepala Desa agar semua tugas dapat tetap berjalan dengan baik, dan tentunya perlu perhatian dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

2) Kecamatan Punduh Pedada

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Punduh Pedada kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.424.363.913,-

Realisasi Rp. 1.336.780.482,-

Persentase (93,85 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Punduh Pedada kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga;

- i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
- k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
- l. Kegiatan Lomba Desa
- m. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Kecamatan
- n. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- o. Kegiatan Fasilitasi Gerakan desa Ikut Sejahtera
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Kegiatan Expose Capaian Pembangunan
 - c. Kegiatan fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa
 - d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB Kecamatan
 - e. Kegiatan Penyusunan Provil Desa.
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB Kecamatan;
 - b. Kegiatan Lomba Desa

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Punduh Pedada kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

3) Kecamatan Kedondong

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Kedondong kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.688.339.096,-

Realisasi Rp. 1.590.502.101,-

Persentase (94,21 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Kedondong kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, sopir dan Keamanan;
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
 - k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - l. Kegiatan Lomba Desa;
 - m. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan;
 - n. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - o. Kegiatan Pemeliharaan / Pengembangan Web Site
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Kegiatan Ekspose Capaian Pembangunan
 - d. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- e. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB Kecamatan
- f. Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Kedondong kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

4) Kecamatan Negeri Katon

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Negeri Katon kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.794.693.187,-

Realisasi Rp. 1.708.848.863,-

Persentase (92,22 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Negeri Katon kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, sopir dan Keamanan
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - l. Kegiatan Lomba Desa
 - m. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
 - n. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - o. Kegiatan Fasilitasi Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS)

- p. Pembuatan Website
- q. Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Pelaksanaan Pameran Pembangunan/Ekspose capaian pembangunan
 - d. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - e. Kegiatan Penyusunan Renja OPD

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Negeri Katon kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

5) Kecamatan Marga Punduh

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Marga Punduh kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.621.511.862,-

Realisasi Rp. 1.549.370.282,-

Persentase (95,55 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Marga Punduh kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, sopir dan Keamanan;
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
 - k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - l. Kegiatan Lomba Desa;
 - m. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan;
 - n. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - o. Kegiatan Fasilitasi Program GADIS.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan.
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Kegiatan Ekspose Capaian Pembangunan;
 - c. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB Kecamatan;Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Marga Punduh kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

6) Kecamatan Tegineneng

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Tegineneng kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 200.000.000,-

Realisasi Rp. 192.430.000,-

Persentase (96 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Tegineneng kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan , Sopir Dan Keamanan
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Atau Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - k. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
1. Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Daerah Pembantu (Ppid)
- m. Kegiatan Lomba Desa
- n. Fasilitasi Pelaksanaan Mtq Tingkat Kabupaten
- o. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- p. Pemeliharaan/Pengembangan Website
- q. Fasilitasi Gadis
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
 - b. Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
 - b. Penyusunan Renja Opd
 - c. Pelaksanaan Pameran Pembangunan / Ekspose Capaian Pembangunan
 - d. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - e. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Penyusunan Profil Kecamatan

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Tegineneng kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

7) Kecamatan Way Khilau

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Way Khilau kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.541.980.325,-

Realisasi Rp. 1.441.042.434,-

Persentase (93,45 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Way Khilau kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, sopir dan Keamanan
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- l. Kegiatan Lomba Desa
- m. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
- n. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- o. Kegiatan Fasilitasi Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS)
- p. Kegiatan Pemeliharaan Software Website Kecamatan
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Kegiatan Ekspose Capaian Pembangunan.
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Way Khilau kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

8) Kecamatan Way Lima

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Way Lima kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.745.492.175,-

Realisasi Rp. 1.668.347.443,-

Persentase (95,58 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Way Lima kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h. Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - i. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
 - j. Kegiatan Lomba Desa
 - k. Fasilitasi Pelaksanaan Mtq Tingkat Kabupaten
 - l. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - m. Pemeliharaan/Pengembangan Website
 - n. Belanja Surat Kabar/Majalah
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - d. Penyedia Jasa/Sewa Rumah Jabatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Ekspose Capaian Pembangunan
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - e. Penyusunan Renja Opd
 - f. Profil Kecamatan

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Way Lima kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

9) Kecamatan Way Ratai

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Way Ratai kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.392.988.025,-

Realisasi Rp. 1.285.185.559,-

Persentase (92,26 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Way Ratai kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - i. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
 - j. Kegiatan Lomba Desa
 - k. Fasilitas Pelaksanaan Mtk Tingkat Kecamatan
1. Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Peningkatan Jiwa Nasionalisme Kebangsaan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
 - b. Ekspose Capaian Pembangunan
 - c. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

d. Penyusunan Profil Kecamatan

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Way Ratai kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

10) Kecamatan Teluk Pandan

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Teluk Pandan kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.723.607.453,-

Realisasi Rp. 1.638.027.094,-

Persentase (95,03 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Teluk Pandan kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyedia jasa kebersihan, sopir, keamanan kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - l. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah Pembantu (PPID)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Teluk Pandan kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

11) Kecamatan Padang Cermin

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Padang Cermin kab. Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 1.641.934.182,-

Realisasi Rp. 1.565.499.055,-

Persentase (95,34 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Cermin kab. Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, sopir dan Keamanan
- e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- g. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
- i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- l. Kegiatan Lomba Desa
- m. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
- n. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- o. Kegiatan Fasilitasi Program GADIS
- p. Kegiatan Kunjungan Silaturahmi Ramadhan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Kegiatan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - d. Kegiatan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Kegiatan Ekspose Capaian Pembangunan
 - d. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - e. Kegiatan Penyusunan Renja OPD
 - f. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB Kecamatan

b. Permasalahan dan Solusi

Pada Kecamatan Padang Cermin kab. kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 3.197.226.895,-

Realisasi Rp. 2.902.945.235,-

Persentase (90,80 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen. Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- g. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan.
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - a. Penyusunan Peta Rawan Bencana
- 5. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - a. Operasional Pusdalops dan Satgas Penanggulangan Bencana
 - b. Pengadaan dan Distribusi Buffer Stok Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Responsif
 - c. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
 - d. Fasilitasi Program Nasional Penanggulangan Bencana
 - e. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana
 - f. Apel Siaga Bencana
 - g. Pengembangan Desa Tangguh Bencana
 - h. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

b) Permasalahan dan Solusi

Beberapa hambatan/masalah yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

- a. Terbatasnya jumlah personil/SDM yang ada di BPBD Kabupaten Pesawaran bagi secara kuantitas maupun kualitas, hal ini mengingat Wilayah Kabupaten Pesawaran yang relatif rawan bencana;
- b. Kondisi geografis Kabupaten Pesawaran yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dan lain-lain);
- c. Masih banyaknya bangunan rumah penduduk yang terbuat dari bangunan semi permanen atau terbuat dari material kayu, hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana kebakaran pemukiman;

- d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Pesawaran dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di OPD selain BPBD;
- e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran;
- f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia ;
- g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
- h. Permasalahan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah orientasi kelembagaan penanggulangan bencana yang ada pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana.
- i. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
- j. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana. Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggap darurat dan logistik sebagai berikut :

- a. Terbatasnya jumlah personil/SDM yang ada di BPBD Kabupaten Pesawaran bagi secara kuantitas maupun kualitas;
- b. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- d. Kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- e. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- f. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;

- g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana. Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah personil/SDM yang ada di BPBD Kabupaten Pesawaran bagi secara kuantitas maupun kualitas;
- b. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- c. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
- d. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- e. Koordinasi penilai kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
- f. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

Solusi

- a. Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik secara organisasi, personil, sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan, sehingga BPBD sebagai satuan kerja yang membidangi penanganan penanggulangan bencana di daerah dapat berfungsi dan bekerja secara optimal serta dapat melaksanakan perencanaan yang lebih terinci dan komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanganan penanggulangan bencana;
- b. Peningkatan dan optimalisasi kerjasama secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan instansi, organisasi ataupun ormas terkait di bidang penanggulangan bencana harus terus diintensifkan, sehingga kinerja yang belum optimal seperti belum terpadu dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam penanganan penanggulangan bencana baik pada tahap tanggap darurat maupun pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dioptimalkan. Serta informasi mengenai data jumlah korban yang meninggal, luka-luka, serta jumlah kerugian yang kerap kali ada perbedaan antara satu sama lainnya dapat dipecahkan;

- c. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif dikalangan pemerintah, masyarakat dan semua unsur-unsur terkait merupakan hal yang harus bisa dipahami oleh semua elemen, sehingga paradigma baru ini dapat menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap kebencanaan sampai ke tingkat Pemerintahan yang paling bawah;
- d. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat;
- e. Segera disusun SOP Penanggulangan Bencana sehingga menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
- g. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
- i. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
- j. Penyediaan dana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat

33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Alokasi Rp. 23.183.235.491,-

Realisasi Rp. 22.682.605.158,-

Persentase (97,84 %) sebagaimana terlampir pada Matriks I.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa/Sewa Gedung Kantor
 - 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 4. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa pendukung forum kerukunan umat beragama (FKUB)
 - b. Kegiatan Pembentukan Forum pembauran kebangsaan (FPK)
 - c. Kegiatan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Dengan Unsur Inteljen dan Elemen Masyarakat (KOMINDA)
 - d. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - e. Kegiatan Monitoring dan Pemetaan Daerah Rawan Konflik
 - f. Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat Daerah Rawan Konflik
 - g. Kegiatan Penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan kepada partai politik
 - h. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Kelancaran Pemilu Kepala Daerah

b) Permasalahan dan Solusi

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pesawaran tahun 2023 tidak ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan dari Program dan Kegiatan.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022

Komisi 1 :

1. Bagian Organisasi

Persentase 99,76%
Pagu Awal Rp 1.150.000.000,-
Realisasi Rp 1.147.201.000,-
Sisa Anggaran Rp 2.799.000,-

Catatan dan rekomendasi :

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2022 antara lain disebabkan tidak terserapnya anggaran pada Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Perjalanan Dinas.

Jawaban :

Akan dilaksanakam perencanaan ditahun 2023 agar dapat terserapnya anggaran Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya.

2. Bagian Hukum

Persentase 99,95%
Pagu Rp 703.261.400,-
Realisasi Rp 702.916.680,-
Sisa Anggaran Rp 344.720,-

Catatan dan rekomendasi :

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2022 antara lain disebabkan Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah. Menjadi harapan kita bersama dalam mengoptimalisasikan penyusunan Produk Hukum Daerah (PHD) dikabupaten Pesawaran. Kami mengharapkan seluruh OPD dikabupaten Pesawaran dapat berkonsultasi serta dapat mengharmonisasikan dalam pembuatan Produk Hukum Daerah.

Jawaban :

Akan dilaksanakan perencanaan ditahun 2023 agar dapat terserapnya anggaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya, dan akan ditingkatkan Kembali kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah (PHD) ke seluruh OPD agar penyusunan produknya dapat optimal.

3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Persentase	99,22%
Pagu	Rp 2.926.000.000,-
Realisasi	Rp 2.922.215.000,-
Sisa Anggaran	Rp 3.785.000,-

Catatan dan rekomendasi:

Menjadi catatan penting bagi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan guna untuk memantapkan tata kelola kerja organisasi dalam mewujudkan Pemerintah yang efektif dan efisien serta lebih meningkatkan pelayanan sesuai ke protokol.

Jawaban :

Akan dilaksanakan ditahun mendatang tentang tata kelola kerja organisasi dalam mewujudkan Pemerintah yang efektif dan efisien serta lebih meningkatkan pelayanan sesuai ke protokol.

4. Bagian Umum

Persentase	98.13%
Pagu	Rp 21.068.160.000,-
Realisasi	Rp 20.674.883.036,-
Sisa Anggaran	Rp 393.276.964,-

Catatan dan rekomendasi:

Menjadi harapan kita bersama dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan yang maksimal.

Jawaban :

Akan dilaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan yang maksimal ditahun mendatang.

5. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pagu Awal	Rp 7.321.841.600,-
Setelah Perubahan	Rp 7.452.494.686,-
Sisa Anggaran	Rp 130.653.086,-

Catatan dan rekomendasi:

Ada dua (2) desa Pancasila di Kabupaten Pesawaran

1. Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima.
2. Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon.

Mereka (Kades Paguyuban dan Ponco Kresno) mengharapkan adanya penyuluhan Bela Negara / Nilai-nilai Pancasila.

Jawaban :

Akan dilaksanakan sosialisasi dua (2) desa tersebut tentang penyuluhan Bela Negara / Nilai-Nilai Pancasila sesuai dengan harapan aparaturnya (Kades Paguyuban dan Ponco Kresno).

6. Satuan Polisi Pamong Praja

Persentase	99,76%
Pagu	Rp 14.320.290.973,-
Realisasi	Rp 14.285.784.235,-

Catatan dan rekomendasi:

- a. Perlu adanya peningkatan kualitas personil Badan Satuan Polisi Pamong Praja baik mengenai kesamaptaan maupun pengetahuan Protokolernya.
- b. Komisi 1 menyarankan agar dianggarkan untuk pembelian HT (Handy Talkie). HT sangat membantu anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dengan radio HT segala informasi bisa cepat disampaikan untuk mengetahui kondisi terkini. Sebaliknya, jika tidak ada radio HT, maka Satpol PP sangat kesulitan.

Jawaban :

Akan dilaksanakan peningkatan kualitas personil Badan Satuan Polisi Pamong Praja baik mengenai kesamaptaan maupun pengetahuan Protokoler dan dianggarkan pembelian HT (Handy Talkie).

7. Bagian Kerjasama

Persentase 99,53%
Pagu Rp 452.310.000,-
Realisasi Rp 450.387.600,-

Catatan dan rekomendasi:

Terkait mengenai kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri apakah selama ini sudah berjalan, rekomendasi dari komisi I agar ditambahkan lagi anggaran sebesar 200 juta untuk kegiatan Pameran Expo atau Pesawaran Invention Promocion. Kegiatan tersebut nantinya akan dilaksanakan diluar Provinsi Lampung.

Jawaban :

Akan dilaksanakan kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri, dan akan dianggarkan sebesar 200 juta untuk kegiatan Pameran Expo atau Pesawaran Invention Promocion. Kegiatan tersebut nantinya akan dilaksanakan diluar Provinsi Lampung.

8. Inspektorat

Persentase 99,27%
Pagu Rp 10.068.895.777,-
Realisasi Rp 9.995.234.847,-
Sisa Anggaran Rp 73.660.930,-

Catatan dan rekomendasi :

Menjadi catatan penting bagi Inspektorat agar dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, serta melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Jawaban :

Akan dilaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, serta melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Persentase	91,05%
Pagu Awal	Rp 6.732.700.129,-
Realisasi	Rp 6.129.974.291,-
Sisa Anggaran	Rp 602.725.838,-

Catatan dan rekomendasi :

Komisi 1 menyarankan agar dinas PMD berkewajiban memberikan pembinaan ke semua kepala desa. Selain itu juga ada kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, komisi I memberi pengarahan agar nantinya ketika kegiatan tersebut dilaksanakan anggota Komisi 1 untuk menjadi nara sumber pada saat Pelatihan Aparatur Desa. Selain menjalin silaturahmi kami juga siap menampung aspirasi dari masyarakat.

Jawaban :

Akan memberikan pembinaan ke semua kepala desa dan akan dilaksanakan kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan memberi pengarahan agar nantinya ketika kegiatan tersebut serta agar dapat menjalin silaturahmi untuk menampung aspirasi dari Masyarakat.

10. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

Persentase	93,41%
Pagu Awal	Rp. 8.504.325.221,-
Pagu Perubahan	Rp. 8.134.049.281,-
Realisasi	Rp. 7.598.372.233,-
Sisa Anggaran	Rp. 535.677.048,-

Refocusing Rp. 370.275.940,-

Catatan dan rekomendasi :

Menjadi harapan kita bersama terkait dengan formasi atau penerimaan P3K yang telah di usulkan BKP SDM. Kita berharap ini sebagai celah atau pintu masuk bagi seluruh masyarakat kabupaten Pesawaran untuk menjadi abdi negara.

Jawaban :

Akan diusulkan terkait dengan formasi atau penerimaan P3K agar menjadi suatu peluang untuk seluruh masyarakat kabupaten Pesawaran untuk menjadi abdi negara.

11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Persentase 94,76%
Pagu Rp 4.664.673.325,-
Realisasi Rp 4.420.413.316,-

Catatan dan rekomendasi:

Komisi 1 merekomendasikan penambahan anggaran atau pembelian 5 Laptop yang dipergunakan untuk menginput KTPdigital.

Jawaban :

Akan dilaksanakan penambahan anggaran atau pembelian 5 Laptop yang dipergunakan untuk menginput KTP digital.

12. Bagian Tata Pemerintahan

Persentase 90,96%
Pagu Awal Rp 807.220.100,-
Pagu Perubahan Rp 22.992.100,-
Realisasi Rp 839.562.400,-

Catatan dan rekomendasi:

Persoalan tapal batas Pesawaran dengan Bandar Lampung, tepatnya Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan sampai saat ini apakah sudah ada kesepakatan bersama antara pihak Pemkot Bandar Lampung dengan Pemerintah Daerah Pesawaran.

Jawaban :

Seiring perjalanan waktu bahwa dasar ketentuan melalui Peraturan Dalam Negeri yang sudah terbit sehingga Kabupaten Pesawaran akan melakukan proses untuk perubahan Peraturan Dalam Negeri tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan batas wilayah yang sebenarnya.

13. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persentase	96,23%
Pagu Awal	Rp 5.187.273.219,-
Realisasi	Rp 4.991.614.376,-

Catatan

Menjadi catatan penting bagi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam hal membuat Laporan agar lebih teliti lagi dalam hal penulisan Laporan.

Jawaban

Akan dilaksanakan review serta ketelitian dalam penulisan Laporan

Rekomendasi Komisi II

1. Bagian Perlengkapan

Pagu anggaran	Rp	13.401.544.500
Realisasi anggaran	Rp	12.774.278.112
Persentase		95,32 %

Catatan dan rekomendasi

Pada bagian perlengkapan dalam penganggaran dan pengadaan barang untuk dapat lebih kepada peruntukannya dan dalam hal penempatan kendaraan – kendaraan dinas dan kepada Bagian Perlengkapan diharapkan mengacu pada peraturan – peraturan yang berlaku serta sesuai peruntukannya.

Jawaban :

Akan dilaksanakan penganggaran dan pengadaan barang sesuai peraturan – peraturan yang berlaku serta sesuai peruntukannya.

2. Bagian Perekonomian

Pagu anggaran	Rp	346.529.000
Realisasi anggaran	Rp	345.149.444
Persentase		99,61%

Catatan dan rekomendasi :

Sebagai tim pengawas Bagian Perekonomian daerah harus lebih aktif dan berani dalam mengawasi BUMD Kabupaten, sehingga

BUMD Kabupaten Pesawaran dapat berkembang dan maju serta dapat menghasilkan PAD untuk kabupaten pesawaran

Jawaban :

Ditahun mendatang akan lebih aktif dan berani dalam mengawasi BUMD Kabupaten, sehingga BUMD Kabupaten Pesawaran dapat berkembang dan maju serta dapat menghasilkan PAD untuk kabupaten pesawaran

3. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Pagu anggaran	Rp 1.012.000.000,-
Realisasi anggaran	Rp 1.010.739.45,-
Persentase	99,88 %

Catatan dan rekomendasi :

Akan dianggarkan oprasional pada Bagian bagian pengadaan barang dan jasa dan akan ditata waktu dan personil.

4. BAPENDA

Pagu anggaran	Rp 11.864.659.113
Realisasi anggaran	Rp 11.274.594.785
Sisa pagu	Rp 590.064.328
Persentase	95,03 %

Catatan dan rekomendasi

Kami mengusulkan untuk di buat atau di bentuk tim khusus dalam proses penghimpunan PAD yang terdiri dari beberapa satuan kerja OPD sehingga target yang telah di tetapkan dapat tercapai maksimal.

harus adanya ketegasan dari BAPENDA terkait penarikan PAD untuk para pelaku usaha yang masih kurang sadar pajak

Catatan dan rekomendasi

akan di bentuk tim khusus dalam proses penghimpunan PAD

yang terdiri dari beberapa satuan kerja OPD sehingga target yang telah di tetapkan dapat tercapai maksimal dan akan ditindak tegas terkait penarikan PAD untuk para pelaku usaha yang masih kurang sadar pajak

5. Dinas Perikanan

Pagu anggaran	Rp	3.362.279.619
Realisasi anggaran	Rp	3.301.350.421
Persentase		98,19 %

Catatan dan rekomendasi

Untuk mendukung kawasan sentra produksi perikanan budidaya diperlukan pengelolaan kesehatan ikan melalui pos kesehatan ikan terpadu (POSIKANDU) termasuk juga kegiatan pembinaan pembudidayaan yang memerlukan dukungan anggaran untuk oprasionalnya.

Untuk lokus kegiatan budidaya perikanan air tawar agar benar-benar memperhatikan potensi perikanan dimasing masing kecamatan ,untuk potensi kecamatan kedondong dan way lima sangat banyak potensinya tapi belum dimasukan dalam analisis potensi

Diharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi para pengusaha produk olahan ikan untuk dapat meningkatkan nilai tambah dalam produk usahanya

Pembinaan SDM nelayan dan sarpras perlu ditingkatkan anggaranya agar aktivitasnya dapat secara maksimal.

Catatan dan rekomendasi

Akan dilaksanakan pengelolaan kesehatan ikan melalui pos kesehatan ikan terpadu (POSIKANDU) dan kegiatan pembinaan pembudidayaan yang memerlukan dukungan anggaran untuk oprasionalnya serta akan diperhatikan potensi perikanan dimasing masing kecamatan ,untuk potensi kecamatan kedondong dan way lima

Ditahun mendatang akan difasilitasi para pengusaha produk olahan ikan untuk dapat meningkatkan nilai tambah dalam

produk usahanya serta akan dibina SDM nelayan dan sarpras agar aktivitasnya dapat secara maksimal.

6. Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Pagu anggaran	Rp 10.951.322.267
Realisasi anggaran	Rp 10.844.543.947
Persentase	99,02%

Catatan dan rekomendasi

Telah dibahas di tingkat komisi II

Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutuira untuk dapat memaksimalkan tenaga tenaga penyuluh pertanian guna menyalurkan ilmunya kepada para petani dan pekebun

Berikunya pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura harus dapat memfasilitasi petani – petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu dengan cara memberikan sosialisasi secara Kontinue serta mendata kembali petani – petani kita untuk di masukan kedalam RDKK.

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura agar lebih kreatif dan inovatif dengan membuat progam yang bagus seperti membuat di setiap kecamatan memiliki produk- produk unggulan hasil pertanian

Jawaban :

Ditahun mendatang akan memaksimalkan tenaga tenaga penyuluh pertanian guna menyalurkan ilmunya kepada para petani dan pekebun.

akan memfasilitasi petani – petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu dengan cara memberikan sosialisasi secara Kontinue serta mendata kembali petani – petani kita untuk di masukan kedalam RDKK.

7. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja

Pagu anggaran	Rp 5.144.569.140
Anggaran Perubahan	Rp 5.093.915.946
Persentase	99,02 %

Catatan dan rekomendasi :

Telah di bahas di tingkat komisi II

- Terkait dengan anggaran yang masih kurang di harapkan untuk Dinas Koprasa Umkm Dan Tenaga Kerja agar lebih proaktif dalam dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait anggaran untuk dapat masuk di Kabupaten Pesawaran
- Selanjutnya harapan kami agar UMKM ini dapat juga di kembangkan di daerah daerah lain

Jawaban :

- Ditahun mendatang bahwa Dinas Koprasa Umkm Dan Tenaga Kerja akan lebih proaktif dalam dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait anggaran untuk dapat masuk di Kabupaten Pesawaran serta mencari solusi agar UMKM ini dapat juga di kembangkan di daerah daerah lain

8. BPKAD

Pagu anggaran	Rp 10.742.043,800,00
Realisasi anggaran	Rp 10.037.382,897,00
Persentase	93,44 %

Catatan dan Rekomendasi :

Telah di bahas di tingkat komisi II

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset guna menjaga aset – aset milik daerah baik yang bergerak atau yang tidak bergerak untuk selalu di data secara berkelanjutan terlebih untuk tanah – tanah hibah baik yang ada pada dinas kesehatan dinas pendidikan dan lainnya untuk di prioritaskan pembuatan sertifikat guna menghindari gejolak – gejolak yang timbul di kemudian hari.

Jawaban :

Akan dilaksanakan penataan ulang tentang pendataan untuk menjaga aset – aset milik daerah baik yang bergerak atau

yang tidak bergerak dan secara berkelanjutan terhadap aset tanah – tanah hibah

Akan diprioritaskan pembuatan sertifikat guna menghindari gejala – gejala yang timbul di kemudian hari.

9. Dinas Pariwisata

Pagu anggaran	Rp 6.362.555.228,00
Realisasi anggaran	Rp 6.313.007.478,00
Persentase	99,2 %

Catatan dan rekomendasi

- a. Dinas Pariwisata juga harus dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat sekitar kawasan pariwisata sehingga baik dari segi keamanan, homestay itu bisa dinikmati lingkungan setempat, dimana pesawaran adalah tempat wisata sementara kuliner, menginap dan lain sebagainya dinikmati oleh Bandar Lampung, ini menjadi salah satu kewajiban dari pada Dinas Pariwisata.
- b. Yang terakhir menurut kami belum ada keseriusan yang khusus dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menjadikan Kabupaten Pesawaran sebagai Bumi Wisata.

Jawaban :

Dinas Pariwisata akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan pariwisata demi mendapatkan keamanan serta akan berupaya lebih serius untuk menjadikan kabupaten pesawaran menjadi Bumi Wisata

10. Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Pagu anggaran	Rp 4.678.469.300
Realisasi anggaran	Rp 4.355.112.839
Persentase	93,09 %

Catatan dan rekomendasi

- Untuk Dinas Perkebunan & Peternakan agar berkolaborasi dan bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam menyusun ulang RDKK
- Agar di monitoring terus terkait pembangunan poskeswan yang ada di kecamatan kedondong
- Untuk para petani dan para pekebun yang mengagarap tanah register agar di bantu untuk legalitasnya

Jawaban :

- Akan melaksanakan kolaborasi dan bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam menyusun ulang RDKK
- Akan melaksanakan monitoring terkait pembangunan poskeswan yang ada di kecamatan kedondong
- Akan memfasilitasi para petani dan para pekebun yang mengagarap tanah register agar untuk legalitasnya dengan ketentuan hukum yang berlaku

11. Dinas Ketahanan Pangan

Pagu anggaran Rp 8.014.813.105

Realisasi anggaran Rp 7.623.378.653

Catatan Rekomendasi :

Pada Program rumah pangan lestari supaya menjadi progam unggulan dalam membantu pendapatan keluarga oleh sebab itu butuh biaya pendukung kegiatan.

Catatan Rekomendasi :

Akan menjadikan Program rumah pangan lestari menjadi progam unggulan dalam membantu pendapatan keluarga dan akan menganggarkan kegiatan ditahun mendatang.

Komisi III

1. Dinas Perhubungan

Pagu Anggaran murni : 9.402.064.000

Refocusing : 350.109.067

Perubahan	: 9.051.954.933
Realisasi Anggaran	: 8.982.236.294
Sisa Anggaran	: 69.718.639
Persentase	: 99,23 %

Catatan dan rekomendasi

- Secara umum program kegiatan sudah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan rencana program

Jawaban :

Akan berusaha lebih baik kembali untuk melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan serta melihat peluang untuk berinovasi.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pagu Anggaran murni	: 9.579.425.000
Refocusing	: 302.199.498
Perubahan	: 9.698.751.598
Realisasi Anggaran	: 9.043.025.343
Sisa Anggaran	: 654.915.255
Persentase	: 93,24 %

Catatan dan rekomendasi

- Secara umum program kegiatan sudah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan rencana program

Jawaban :

Akan berusaha lebih baik kembali untuk melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta melihat peluang untuk berinovasi.

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pagu Anggaran Murni	: 46.979.425.384
Refocusing	: -
Perubahan	: 46.505.177.333
Realisasi Anggaran	: 24.201.918.512
Sisa Anggaran	: 22.203.258.821

Persentase : 52,15%

Catatan dan rekomendasi

- Agar kiranya hal yang terkait dengan program yang telah disusun untuk dapat di maksimalkan perencanaannya dengan perhitungan yang matang, sehingga dapat menghindari hal atau meminimalisir permasalahan yang akan terjadi saat pelaksanaan program.

Jawaban :

- Akan melaksanakan perencanaan dengan perhitungan yang matang terkait dengan pelaksanaan program secara maksimal, sehingga dapat menghindari hal atau meminimalisir permasalahan yang ada.

4. Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup

Pagu Anggaran murni	: 5.671.541.608
Refocusing	: -
Perubahan	: 5.519.541.608
Realisasi Anggaran	: 5.130.730.620
Sisa Anggaran	: 388.810.988
Persentase	: 92,96 %

Catatan Rekomendasi :

- Dalam rangka memaksimalkan kinerja Dinas, maka di perlukan alat penunjang yang di butuhkan, Contohnya terkait dengan penanggulangan sampah.
Kedepan di harapkan di maksimalkan tentanag pengadaan truk sampah, kontainer,dan Excavator khusus untuk di lokasi tempat pembuangan akhir.

Jawaban :

- Akan dianggarkan alat penunjang yang di butuhkan

untuk mengatasi penanggulangan sampah contohnya pengadaan truk sampah, kontainer, dan Excavator khusus untuk di lokasi tempat pembuangan akhir.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pagu Anggaran murni	: 177.138.378.290
Realisasi Anggaran	: 119.410.954.836
Persentase	: 67.41 %

Catatan dan rekomendasi

Tingkatkan koordinasi dan komunikasi antara lembaga terkait (baik internal maupun eksternal), dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program

Agar kiranya hal yang terkait dengan program yang telah disusun untuk dapat di maksimalkan perencanaannya dengan perhitungan yang matang, sehingga dapat menghindari hal atau meminimalisir permasalahan yang akan terjadi suatu pelaksanaan program

Jawaban :

Akan berkoordinasi dan komunikasi antara lembaga terkait (baik internal maupun eksternal), dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program serta menyusun program untuk dapat di maksimalkan perencanaannya dengan perhitungan yang matang agar dapat meminimalisir permasalahan yang ada.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pagu Anggaran Murni	: 4.065.361.221
Refocusing	: -
Perubahan	: -
Realisasi Anggaran	: 3.913.545.961
Sisa Anggaran	: 151.815.260
Persentase	: 96,27%

Catatan dan rekomendasi :

Di karenakan Kabupaten Pesawaran merupakan wilayah rawan bencana, maka dalam rangka penguatan aturan terkait penanganan dan penguatannya, di perlukan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk pelaksanaannya

Jawaban :

Akan dilaksanakan pembuatan peraturan daerah sebagai payung hukum untuk pelaksanaannya ditahun mendatang.

7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pagu Anggaran murni	: 2.839.045.00
Refocusing	: 47.744.346
Perubahan	: 2.791.302.754
Realisasi Anggaran	: 2.759.389.013.00
Sisa Anggaran	: 31.913.74
Persentase	: 98,86%

Catatan dan Rekomendasi

- secara umum program kegiatan sudah berjalan dengan baik,dan sesuai dengan rencana program

Jawaban :

Akan melaksanakan program kegiatan lebih baik lagi dan membuat inovasi sebagai kemajuan dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara khusus dan seluruh OPD di Kabupaten Pesawaran pada umumnya.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu Anggaran Murni	: 9.029.642.629
Refocusing	: -
Perubahan	: 9.029.642.629
Realisasi Anggaran	: 8.412.263.571
Sisa Anggaran	: 617.379.058
Persentase	: 93,16%

Catatan dan rekomendasi

Secara umum program kegiatan sudah berjalan dengan baik,dan sesuai dengan rencana program

Jawaban :

Akan melaksanakan program kegiatan lebih baik lagi dan membuat inovasi sebagai kemajuan dalam pelaksanaan program kegiatan.

9. Bagian Sumber Daya Alam

Pagu Anggaran Murni	: 763.358.400
Refocusing	: -
Perubahan	: -
Realisasi Anggaran	: 762.473.000
Sisa Anggaran	: 885.400
Persentase	: 99,88 %

Catatan dan rekomendasi

Agar kiranya pengawasan terhadap Sumber Daya Alam lebih di tingkatkan, baik di perkotaan, pemukiman, dan kawasan, atau hutan Register supaya tidak ada bencana alam

Jawaban :

Akan melaksanakan pengawasan terhadap Sumber Daya Alam di perkotaan, pemukiman, dan kawasan, atau hutan Register supaya tidak ada bencana alam

10. Bagian Administrasi Pembangunan

Pagu Anggaran Murni	: 1.125.000.000
Refocusing	: 220.000.000
Perubahan	: 905.000.000
Realisasi Anggaran	: 900.284.340
Sisa Anggaran	: 4.715.660
Persentase	: 99,47%

Catatan dan rekomendasi :

Secara umum program kegiatan sudah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan rencana program

Jawaban :

Akan melaksanakan pelaksanaan Program kegiatan yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Komisi IV

1. Dinas Kesehatan

Terealisasi	(88,08 %)
Pagu	Rp.145.886.354.035
Realisasi	Rp.128.498.100.800

Catatan Rekomendasi :

- Untuk menjadi perhatian penting terkait mengenai *Penambahan Tenaga Kesehatan* agar dapat di Akomodir, supaya maximal pelayanan kesehatan sampai ketingkat desa agar dapat dirasakan masyarakat baik sarana dan prasarananya karena untuk saat ini perbandingan fasien dan tenaga kesehatan tidak sesuai,jauh dari kata ideal.
- Adanya penambahan dokter umum di puskesmas-puskesmas di wilayah Kabupaten Pesawaran, usulan penambahan dokter umum ini penting jika melihat jumlah dokter umum di Pesawaran masih sangat kurang atau terbatas.
- Anggaran untuk Program JKN (Jamkesda), untuk ditambahkan dan menjadi prioritas utama, supaya dapat mengcover masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Jawaban :

- Akan melaksanakan penataan pegawai dan untuk lebih maksimal pelayanan terhadap pasien yang ada di Kabupaten Pesawaran
- Akan mengusulkan penempatan dan penambahan Dokter

umum .

- Akan melaksanakan penambahan untuk Program JKN (Jamkesda) sebagai prioritas utama dalam pelayanan kesehatan.

2. Dinas Pendidikan

Pada Dinas Pendidikan :

- Pengangkatan ASN Guru melalui formasi PPPK di Kabupaten Pesawaran, bagi yang sudah lolos Passanggrade masuk dalam kategori P1, agar diperhatikan peluang penerimaan dan penempatannya untuk tahap berikutnya mengingat jumlah guru yang lolos passanggrade tersebut tidaklah sedikit yaitu sebanyak lebih kurang 250 orang dan berkaitan juga dengan jumlah anggaran untuk pembayaran gaji, agar gaji untuk PPPK tersebut harus benar benar juga di siapkan dan dihitung jangan samapai ada kurang bayar dalam penggajiannya.

Kabupaten Pesawaran sudah menganggarkan belanja transport bagi guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri dan Honorer Swasta dalam jumlah yang lumayan besar, mengingat jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, oleh sebab itu agar Bupati Pesawaran harus benar-benar memperhatikan dan mengevaluasi .output dan kinerja dari guru honorer tersebut.

Jawaban :

Dinas Pendidikan Kebudayaan akan menata ulang dalam perencanaan Pengangkatan ASN Guru melalui formasi PPPK di Kabupaten Pesawaran serta menghitung dengan kemampuan anggaran dana yang ada pada Kabupaten Pesawaran terhadap pembayaran gaji dan kesejahteraan serta akan mengevaluasi output kinerja guru honorer.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara Standar Opersional Prosedur sudah berjalan dengan baik.

Jawaban : akan meningkatkan Kembali kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang

4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penambahan pegawai PNS / PPPK untuk meningkatkan kinerja pegawai, dibutuhkan pustakawan dan arsiparis

Jawaban : akan meningkatkan kinerja melalui penambahan PNS/PPPK di bidang pustakawan dan arsiparis.

5. Dinas Pemuda dan Olahraga

Terealisasi Rp. 97,00 %

Pagu Rp. 7.841.436.857

Realisasi Rp. 7.605.994.748

- Agar Alokasi Anggaran Reward pada pelaksanaan Porprov Lampung IX Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran bisa ditambah dari Anggaran saat ini.
- Agar kiranya kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan pada Tahun anggaran 2022 bisa dialokasikan kembali pada tahun – tahun selanjutnya.

Jawaban :

Akan mengalokasikan anggaran pada kegiatan pelaksanaan Porprov Lampung ditahun mendatang dan akan mengakomodir kegiatan ditahun 2022 menjadi program kegiatan tahunan.

6. Dinas Sosial

Terealisasi (97.11%)

Pagu Rp. 4.285.087.047.00

Realisasi Rp. 4.161.333.191.00

Sisa Anggaran Rp. 123.753.856.00

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial agar dialokasikan :

- Penambahan Anggaran untuk Sub Kegiatan Permakanan ditambah sebesar Rp. 160.000.000
- penambahan Anggaran untuk penyediaan Alat Bantu sebesar Rp40.000.000
- penambahan anggaran untuk penanganan khusus bagi untukkkelompok rentan sebesar Rp. 45.000.000
- Penambahan belanja alat tulis sebesar Rp. 15.000.000

Jawaban :

Akan mengalokasikan yang ada dalam rekomendasi diatas.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Terealisasi (94,29 %)

Pagu Rp. 15.933.188.700,-

Realisasi Rp. 14.013.351.762,-

Secara Standar Operasional Prosedur sudah berjalan dengan baik.

Jawaban : akan melaksanakan program kegiatan lebih baik lagi di tahun mendatang.

8. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Secara Standar Operasional Prosedur sudah berjalan dengan baik.

Jawaban : akan melaksanakan program kegiatan lebih baik lagi di tahun mendatang.



PESAWARAN

BAB IV

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN DAN

PENUGASAN

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA

4.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Dalam pengertian lain, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, dan mengembangkan demokrasi lokal.

Terdapat empat aspek yang melatarbelakangi otonomi daerah. Yaitu aspek fisik kewilayahan, aspek legal konstitusional, aspek penduduk, dan aspek pemerintahan yang baik. Adanya otonomi daerah akan membuat pemerintah daerah lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, kreatif dan inovatif, Pemerintah pusat juga akan memiliki organisasi yang lebih ramping dan beban yang lebih ringan.

4.2 Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pada dasarnya ada empat, yaitu:

a. Asas Sentralisasi,

Asas Sentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

b. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

d. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

4.3 Perbandingan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Terdapat beberapa perbedaan dalam ciri-ciri ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Perbedaan dalam ciri-ciri asas penyelenggaraan pemerintahan daerah

NO	ASAS PEMERINTAHAN	CIRI-CIRI PELAKSANAAN
1	DESENTRALISASI (Desentralisasi Politik/Ketatanegaraan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Transfer kewenangan b. Kewenangan sepenuhnya menjadi hak & tanggung jawab institusi penerima kewenangan c. Diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber-sumber dana d. Personil pelaksana adalah dari institusi penerima transfer kewenangan
2	DEKONSENTRASI (Desentralisasi Administratif)	<ul style="list-style-type: none"> a. Delegasi kewenangan b. Kewenangan tetap melekat pada institusi/pejabat pemberi delegasi kewenangan c. Disediakan dana dari institusi pemberi tugas d. Personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas tetapi ditugaskan di luar pusat

3	TUGAS PEMBANTUAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional b. Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas c. Disediakan dana, saran dan prasarana, serta personil yang diperlukan d. Personil pelaksanaan sebagian besar adalah dari institusi pemberi tugas
---	-------------------------	---

4.4 Pengertian Tugas Pembantuan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan disebutkan pengertian dari tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Secara lebih sederhana dapat diartikan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintah pusat atau pemerintah dengan jenjang lebih tinggi dan disertai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja atau pelaksanaannya kepada pemerintah atau instansi yang menugaskannya.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan:

- a. bupati/wali kota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada gubernur yang

- menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- b. laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
 - c. gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a melaporkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5 Tujuan Tugas Pembantuan

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah. Tugas Pembantuan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah, sementara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut

4.6 Ketentuan dalam Tugas Pembantuan

Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;

- b. Daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. Daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan;
- f. Bukan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat; dan
- g. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota.

4.7 Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Adapun mekanisme pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

- a. Penugasan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga yang memberi penugasan setelah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri (UU no.23 tahun 2014, Pasal 19)
- b. Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga tersebut disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Bappenas.
- c. Adapun penugasan dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
- d. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang menerima tugas pembantuan bisa membentuk peraturan daerah mengenai mekanisme atau tata cara pelaksanaan sesuai kriteria tugas pembantuan
- e. Keputusan Kepala Daerah mengenai teknik pelaksanaan tugas pembantuan adalah termasuk di dalamnya menetapkan perangkat daerah

4.8 Tugas Pembantuan di Kabupaten Pesawaran

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak menerima dan tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

4.9 Kerjasama Antar Daerah

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesawaran melaksanakan Kerjasama Antar Daerah sebagai berikut :

- a. Memorandum of Understanding (MoU) / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Nomor : 03/MoU/KS.I/04/2023 tentang Pengendalian Inflasi Daerah.
- b. Memorandum of Understanding (MoU) / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Pemerintah Kabupaten Mesuji Nomor : 04/MoU/KS.I/04/2023 tentang Pengendalian Inflasi Daerah.

4.10 Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesawaran melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagai berikut :

- a. *Memorandum of Understanding* (MoU) / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran Nomor : 02/MoU/KS.I/04/2023 tentang Pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Ramah Anak dan Layanan Konseling.
- b. *Memorandum of Understanding* (MoU) / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung Nomor : 05/MoU/KS.I/04/2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pembangunan Daerah.
- c. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 01/PKS/KS.I/04/2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 02/PKS/KS.I/04/2023 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Sebagai *Intermediate* Penghimpunan Dana Setoran Pajak Penghasilan (pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (ppn) dari Pihak Ketiga.
- e. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan BTN Nomor : 016/BA-PKS/KS.I/04/2023 tentang Berita Acara Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023.

4.11 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Pesawaran

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesawaran melaksanakan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

- a. *Memorandum of Understanding (MoU)* / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran Nomor : 07/MoU/KS.I/04/2023 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran untuk Pembangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima.
- b. *Memorandum of Understanding (MoU)* / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor : 08/MoU/KS.I/04/2023 tentang Legalitas Aset Lanal Lampung Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pesertifikatan Hak Atas Tanah Diseluruh Wilayah Kabupaten Pesawaran.
- c. *Memorandum of Understanding (MoU)* / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor : 011/MOU/KS.I/04/2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.
- d. *Memorandum of Understanding (MoU)* / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor : 012/MoU/KS.1.04/2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.
- e. *Memorandum of Understanding (MoU)* / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Balai Pelatihan Pertanian Lampung Nomor : 013/MoU/ks1.04/2021 tentang Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Bidang Pertanian.
- f. *Memorandum of Understanding (MoU)* / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor : 014/MoU/KS.1.04/2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran.
- g. *Memorandum of Understanding (MoU)* / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor : 015/MoU/KS/2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.
- h. *Memorandum of Understanding (MoU)* / Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nomor : 016/MoU/KS/2023 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Pesawaran.

- i. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor : 01/PKS/KS.I/04/2023 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran kepada Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk Pembangunan Lahan Parkir dan Lapangan Tennis.
- j. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran Nomor : 02/PERJ/HK/2023 tentang Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran.
- k. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran Nomor : 03/BAST/PP/V.02/2023 tentang Berita Acara Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
- l. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pringsewu Nomor : 04/PKS/KS.I/04/2023 tentang Pelaksanaan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petugas Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
- m. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 05/PKS/KS.I/04/2023 tentang Berita Acara Serah terima hibah.
- n. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran Nomor : 06/HIBAH/KS/1.04/2023 tentang Berita Acara Serah Terima Hibah dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Pesawaran kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran.
- o. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 07/HIBAH/KS.I/04/2023 tentang Berita Acara Serah Terima Hibah.
- p. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 08/PKS/KS.I/04/2023 tentang Berita Acara Serah Terima Hibah.
- q. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara ASET BPKAD Kabupaten Pesawaran dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran Nomor : 09/PKS/KS.I/04/2023 tentang Berita Acara Serah Terima Hibah.

- r. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran dengan Kepolisian Nomor : 010/PKS/KS.I/04/2023 tentang Berita Acara Serah Terima Hibah.
- s. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran dengan Kepolisian Nomor : 012/PKS/KS.I/04/2023 tentang Tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.
- t. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 014/BA-PKS/KS.I/04/2023 tentang Berita Acara Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- u. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan BPKAD Nomor : 015/BA-PKS/KS.I/04/2023 tentang Berita Acara Kebijakan Umum APBD dan Priorits Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.
- v. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran Nomor : 018/PKS/KS.I/04/2023 tentang Pelaksanaan dana Hibah Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
- w. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 019/PKS/KS.I/04/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- x. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 020/PKS/KS.I/04/2023 tentang Hasil pembahasan atas usulan hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024.
- y. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 021/PKS/KS.I/04/2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2024.
- z. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 025/PKS/KS.I/04/2023 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu atas tenaga listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesawaran Tahun 2023, merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah dan wujud pengawasan DPRD yang pada dasarnya memuat gambaran tentang kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, mencakup pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.

Sesuai dengan Pedoman tersebut di atas, maka untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan tolok ukur Renstra ditetapkan sasaran dan indikatornya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023.

Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 masih ada masalah/kendala, namun dapat diatasi seoptimal mungkin sehingga secara umum Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Pesawaran dapat dilaksanakan secara baik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan DPRD Kabupaten Pesawaran dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan juga dukungan dari pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Sedangkan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah pada tahun yang akan datang telah dilakukan beberapa langkah-langkah antisipatif. Dalam pencapaian sasaran sesuai Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah telah berupaya secara optimal. Beberapa sasaran yang belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, akan menjadi perhatian kami untuk memperbaikinya dimasa mendatang.

Kami menyadari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik pada tahun 2023 masih banyak yang harus kita benahi bersama. Untuk itu kami mengharapkan masukan dan pemikiran yang konstruktif dari semua pihak dan berbagai elemen masyarakat. Dengan kebersamaan Kabupaten Pesawaran akan lebih mampu memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat dimasa mendatang.



NO	OPD	EVALUASI
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	Dinas Kesehatan	DINAS KESEHATAN
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	Dinas Sosial	DINAS SOSIAL
7	Dinas Koperasi, Dan Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	OPD	EVALUASI
1	2	3
f	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
g	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
h	Bagian Umum	BAGIAN UMUM
i	Bagian Perlengkapan	BAGIAN PERLENGKAPAN
j	Bagian Organisasi	BAGIAN ORGANISASI
k	Bagian Kerjasama	BAGIAN KERJASAMA
l	Bagian Sumber Daya Alam	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
24	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD

NO	OPD	EVALUASI
9	Dinas Ketahanan Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
18	Dinas Perikanan	DINAS PERIKANAN
19	Dinas Pariwisata	DINAS PARIWISATA

NO	OPD	EVALUASI
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
27	Kecamatan Gedong Tataan	KECAMATAN GEDONG TATAAN
28	Kecamatan Negeri Katon	KECAMATAN NEGERI KATON
29	Kecamatan Tegineneng	KECAMATAN TEGINENENG
30	Kecamatan Way Lima	KECAMATAN WAY LIMA
31	Kecamatan Padang Cermin	KECAMATAN PADANG CERMIN
32	Kecamatan Punduh Pidada	KECAMATAN PUNDUH PIDADA
33	Kecamatan Kedondong	KECAMATAN KEDONDONG
34	Kecamatan Marga Punduh	KECAMATAN MARGA PUNDUH
35	Kecamatan Way Khilau	KECAMATAN WAY KHILAU

NO	OPD	EVALUASI
20	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
23	Sekretariat Daerah Kabupaten	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
a	Bagian Tata Pemerintahan	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
b	Bagian Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
c	Bagian Hukum	BAGIAN HUKUM
d	Bagian Perekonomian	BAGIAN PEREKONOMIAN
e	Bagian Administrasi Pembangunan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	OPD	EVALUASI
36	Kecamatan Teluk Pandan	KECAMATAN TELUK PANDAN
37	Kecamatan Way Ratai	KECAMATAN WAY RATAI
38	Inspektorat	INSPEKTORAT
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
41	Badan Pendapatan Daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PENGEMBANGA
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	269,052,016,073	261,641,771,782	7,686,629,886	97.25%	100%	97.25%
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp	265,096,831,073	258,042,892,336	7,634,104,919	97.34%	100%	97.34%
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	268,347,896,464	261,063,871,545	7,634,104,919	97.29%	100%	97.29%
1.01.01.2.02.01.5.1.01.01.01.000	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp	137,843,551,280	137,713,231,980	130,319,300	99.91%	100%	99.91%
1.01.01.2.02.01.5.1.01.01.02.000	Tunjangan Keluarga	Rp	12,581,905,834	12,573,598,110	8,307,724	99.93%	100%	99.93%
1.01.01.2.02.01.5.1.01.01.03.000	Tunjangan Jabatan	Rp	161,710,000	161,710,000	-	100.00%	100%	100.00%
1.01.01.2.02.01.5.1.01.01.04.000	Tunjangan Fungsional	Rp	11,098,274,000	11,098,140,000	134,000	100.00%	100%	100.00%
1.01.01.2.02.01.5.1.01.01.05.000	Tunjangan Fungsional Umum	Rp	900,710,000	895,495,000	5,215,000	99.42%	100%	99.42%
1.01.01.2.02.01.5.1.01.01.06.000	Tunjangan Beras	Rp	6,926,393,640	6,918,427,440	7,966,200	99.88%	100%	99.88%
1.01.01.2.02.01.5.1.01.01.07.000	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	247,122,686	246,594,183	528,503	99.79%	100%	99.79%
1.01.01.2.02.01.5.1.01.01.08.000	Pembulatan Gaji	Rp	1,736,344	1,731,908	4,436	99.74%	100%	99.74%
1.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.000	Belanja Tunjangan Khusus	Rp	1,281,790,000	817,372,600	464,417,400	63.77%	100%	63.77%
1.01.01.2.02.05.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp	807,704,136	737,051,204	70,652,932	91.25%	100%	91.25%
1.01.01.2.02.05.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp	23,515,700	20,951,000	2,564,700	89.09%	100%	89.09%
1.01.01.2.02.05.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Rp	148,004,844	133,976,988	14,027,856	90.52%	100%	90.52%
1.01.01.2.02.05.1.01.03.02.0014	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp	618,421,000	565,860,100	52,560,900	91.50%	100%	91.50%
1.01.01.2.02.05.1.01.03.03.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	800,000	800,000	-	100.00%	100%	100.00%
1.01.01.2.02.05.1.01.03.05.0001	Belanja TPG PNSD	Rp	94,293,257,000	87,451,541,032	6,841,715,968	92.74%	100%	92.74%
1.01.01.2.02.05.1.01.03.07.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	Rp	1,413,000,000	1,377,310,000	35,690,000	97.47%	100%	97.47%
1.01.01.2.02.05.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp	350,080,000	350,080,000	-	100.00%	100%	100.00%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp	487,346,000	440,240,551	47,105,449	90.33%	100%	90.33%
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Rp	60,000,000	57,215,000	2,785,000	95.36%	100%	95.36%
	Masukan	Rp	60,000,000					

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		95.36%					
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	96,045,000	91,213,300	4,831,700	94.97%	100%	94.97%
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telpn		6,000,000	-	6,000,000	0.00		
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik		33,600,000	33,600,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.12	Belanja TV Kabel, Internet dan Multimedia		18,000,000	18,000,000	-	100.00	100	100
	Masukan		96,045,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		94.97%					
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	15,400,000	15,400,000	-	100.00%	100%	100.00%
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Tdk tetap		1,656,000,000	1,618,000,000	38,000,000	97.71		
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03	Tunjangan Tim/Panitia		90,600,000	72,500,000	18,100,000	80.02		
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.06.06	Tunjangan Bendahara dan Pembantu Bendahara		116,400,000	112,800,000	3,600,000	96.91	100	100
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		511,000	511,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.56.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		-	-	-			
	Masukan		15,400,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		100.00%					
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	122,795,000	114,600,000	8,195,000	93.33%	100%	93.33%
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		23,550,000	23,550,000	-	100.00	100	100
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		3,900,000	3,900,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.09	Bahan Yang berkaitan dgn Komputer		2,550,000	2,550,000	-	100.00		
	Masukan		122,795,000					

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		93.33%					
1.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	24,721,000	22,172,000	2,549,000	89.69%	100%	89.69%
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak		22,060,000	22,060,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy, Penjilidan dan Kliping		7,940,000	7,940,000	-	100.00	100	100
	Masukan		24,721,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		89.69%					
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Rp	50,000,000	35,000,000	15,000,000	70.00%	100%	70.00%
1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan		20,000,000	20,000,000	-	100.00		
	Masukan		50,000,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		70.00%					
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	118,385,000	104,640,251	13,744,749	88.39%	100%	88.39%
1.01.1.01.01.01.15.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah		30,000,000	30,000,000	-	100.00		
	Masukan		118,385,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		88.39%					
1.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	415,747,000	369,364,200	46,382,800	88.84%	100%	88.84%
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	415,747,000	369,364,200	46,382,800	88.84%	100%	88.84%
	Masukan	Rp	415,747,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		88.84%					
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Rp	2,462,600,000	2,419,649,495	42,950,505	98.26%	100%	98.26%
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai		45,000,000	45,000,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat		33,790,000	33,790,000	-	100.00	100	100
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu		2,760,000	2,760,000	-	100.00		
1.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp	60,600,000	55,149,495	5,450,505	91.01%	100%	91.01%
	Masukan	Rp	60,600,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		91.01%					
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	2,402,000,000	2,364,500,000	37,500,000	98.44%	100%	98.44%
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		50,000,000	50,000,000	-	100.00		
	Masukan	Rp	2,402,000,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil		98.44%					
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	566,592,000	346,725,200	219,866,800	61.19%	100%	61.19%
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	224,592,000	216,429,200	8,162,800	96.37%	100%	96.37%
	Masukan	Rp	120,740,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		96.37%					
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp	12,000,000	7,119,000	4,881,000	59.33%	100%	59.33%
1.01.1.01.01.01.27.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battery Kering)		20,000,000	20,000,000	-	100.00		
	Masukan	Rp	12,000,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		12 Bulan					
	Hasil		59.33%					
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp	330,000,000	123,177,000	206,823,000	37.33%	100%	37.33%
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Meja Rapat Pejabat		15,000,000	14,941,000	59,000	99.61		
	Masukan	Rp	330,000,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		1 set					
	Hasil		37.33%					
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	592,000,000	559,052,000	32,948,000	94.43%	100%	94.43%
2.22.02.2.02	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Rp	592,000,000	559,052,000	32,948,000	94.43%	100%	94.43%
	Masukan	Rp	592,000,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		100 Peserta					
	Hasil		94.43%					
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp	614,858,900	500,121,900	114,737,000	81.34%	100%	81.34%

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
2.22.05.2.01	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Rp	36,300,000	27,160,000	9,140,000	74.82%	100%	74.82%
1.01.1.01.01.16. 102.5.2.1.01.03	Honorarium TIM/Panitia	Rp	1,500,000	1,500,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.16. 102.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	225,000	225,000	-	100.00	100	100
1.01.1.01.01.16. 102.5.2.2.02.10	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan	Rp	4,600,000	4,600,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.16. 102.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Rp	500,000	500,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.16. 102.5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	Rp	475,000	475,000	-	100.00	100	100
1.01.1.01.01.16. 102.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	Rp	9,200,000	9,200,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.16. 102.5.2.2.15.04	Belanja Tambahan Transport, Akomodasi dan Konsumsi	Rp	10,500,000	10,500,000	-	100.00	100	100
1.01.1.01.01.16. 102.5.2.2.23.15	Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur / Narasumber	Rp	3,000,000	3,000,000	-	100.00		
	Masukan	Rp	36,300,000					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		100 Peserta					
	Hasil		74.82%					
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Rp	578,558,900	472,961,900	105,597,000	81.75%	100%	81.75%
	Masukan		578,558,900					
	Lokasi		Dinas Pendidikan					
	Keluaran		100 Peserta					
	Hasil		81.75%					
1.01.1.01.01.26. 02.5.2.1.01.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		1,850,000	1,850,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.26. 02.5.2.1.02.02	Honorarium Guru Tidak Tetap		693,000,000	693,000,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.26. 02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		480,000	480,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.26. 02.5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan		730,000	730,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.26. 02.5.2.2.11.02	Belanja Makan Minum Rapat		840,000	840,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.26. 02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		23,100,000	23,100,000	-	100.00		
1.01.1.01.01.26. 02.5.2.2.15.04	Belanja Jasa Tambahan Transport Akomodasi dan konsumsi		12,100,000	12,050,000	50,000	99.59		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		35,243,377,588	25,316,864,077		71.83		
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		11,521,593,000	11,395,847,784		98.91		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		3,104,145,000	2,991,280,000		96.36		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		1 unit	1 unit				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengadaan Obat, Vaksin		2,906,014,662	2,738,441,429		94.23		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah obat dan vaksin yang disediakan		1 paket	1 paket				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		1,775,153,138	1,652,744,474		93.10		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah bahan habis pakai yang disediakan		1 paket	1 paket				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		23,446,984,588	13,747,946,293		58.63		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		167,568,000	159,625,000		95.26		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		9253 orang	9253 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		372,430,000	109,950,000		29.52		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		8823 orang	8823 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		482,673,000	445,214,000		92.24		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		8832 orang	8832 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		533,481,000	484,740,000		90.86		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		53760 orang	53760 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		87,300,000	-		-		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		96064 orang	-				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	-				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Produktif		502,836,000	481,518,000		95.76		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		289999 orang	289999 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		10,000,000	-		-		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		31451 orang	31451 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		10,000,000	-		-		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		95602 orang	95602 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		12,460,000	12,460,000		100.00		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah penderita diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		3427 orang	3427 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		49,000,000	49,000,000		100.00		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		7777 orang	7777 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		10,000,000	-		-		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah orang terduga tuberculosis yang							
	mendapatkan pelayanan sesuai standar		1332 orang	1332 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM		100 persen	100 persen				
	dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV		140,000,000	130,000,000		92.86		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		9589 org	9589 org				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		6,750,000	6,750,000		100.00		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan		1 dok	1 dok				
	kesehatan gizi masyarakat							
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan		100 persen	100 persen				
	UKP rujukan Kabupaten Pesawaran							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		153,572,000	47,366,600		30.84		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1 dok	1 dok				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		200,000,000	200,000,000		100.00		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Tersedianya dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus		4 dok	4 dok				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM		100 persen	100 persen				
	dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran							
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		36,000,000	36,000,000		100.00		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran : Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan		3 dok	3 dok				
	penyakit menular dan tidak menular							
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinkes)		19,419,994,588	10,441,655,643		53.77		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		3 dok	3 dok				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM		100 persen	100 persen				
	dan UKP rujukan Kabupaten							
	Pesawaran							
	Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinkes)		292,290,000	288,894,000		98.84		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran			3 dok				
	Keluaran : Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas		3 dok					
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM		100 persen	100 persen				
	dan UKP rujukan Kabupaten							
	Pesawaran							
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		138,312,000	66,095,000		47.79		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kab/kota		4 unit	4 unit				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Investigasi Awal Kejadian Tidak di Harapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)		18,000,000	18,000,000		100.00		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran : Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)		121 lap	121 lap				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		74,400,000	74,400,000		100.00		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah		12 dok	12 dok				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis		104,209,250	98,972,500		94.97		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah orang dengan tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1332 org/kasus	1332 org/kasus				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)		10,000,000	-		-		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100 orang	-				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria		615,708,750	597,305,550		97.01		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		450 orang	450 orang				
	Hasil : Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota		2,748,000,000	173,070,000		62.98		
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		274,800,000	173,070,000		62.98		
	masukan : Jumlah Dana							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan		15 unit	15 unit				
	Hasil : Terlaksananya penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D di fasilitas kesehatan Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		6,409,000,000	58,830,000,000		91.79		
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia		6,409,000,000	58,830,000,000		91.79		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		6,409,000,000	5,883,000,000		91.79		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standard di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)		443 orang	443 orang				
	Hasil : Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM		100 persen	100 persen				
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		406,572,000	406,572,000		100.00		
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		406,572,000	406,572,000		100.00		
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan, Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		406,876,000	406,876,000		100.00		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industry rumah		3 dok	3 dok				
	Hasil : Terlaksananya penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk		100 persen	100 persen				
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		1,051,400,000	658,037,500		62.59		
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		180,020,000	160,940,000		89.40		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		180,020,000	160,940,000		89.40		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		2 dok	2 dok				
	Hasil : Terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah Kabupaten Pesawaran		100 persen	100 persen				
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		197,380,000	164,097,500		83.14		
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		197,380,000	164,097,500		83.14		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		2 dok	2 dok				
	Hasil : Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia		100 persen	100 persen				
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		674,000,000	333,000,000		49.41		
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		674,000,000	333,000,000		49.41		
	masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervise upaya kesehatan Bersumber		12 dok	12 dok				
	Daya Masyarakat (UKBM)							
	Hasil : Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber		100 persen	100 persen				
	daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah							
	Kabupaten Pesawaran							

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	BELANJA LANGSUNG							
1 3 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp.	158,078,785,497	119,950,089,078	38,128,696,419	75.88%	100.00%	
1 3	URUSAN WAJIB	Rp.	158,078,785,497	119,950,089,078	38,128,696,419	75.88%	100.00%	
1	BELANJA LANGSUNG	Rp.						
1 3 1 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	7,451,904,807	7,040,117,610	411,787,197	94.47%		
1 3 1 2 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	194,973,200	193,999,000	974,200	99.50%		
1 3 1 2 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	43,219,000	43,219,000	-	100.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100.00%	100.00%
1 3 1 2 1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	114,420,200	113,446,000	974.200	99.15%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						100.00%	100.00%
1 3 1 2 1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	37,334,000	37,334,000	0	100.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	1	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.00%	100.00%
1 3 1 2 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4,788,557,207	4,398,008,161		91.84%		
1 3 1 2 2	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan <i>(Input)</i> Dana yang dibutuhkan	Rp.	4,747,092,207	4,356,543,161	390.549.046	91.77%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran <i>(output)</i> Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	0		100.00%	100.00%
	Hasil <i>(outcome)</i> Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						100.00%	100.00%
1 3 1 2 2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Masukan <i>(Input)</i> Dana yang dibutuhkan	Rp.	41,465,000	41,465,000	0	100.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran <i>(output)</i> Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	2	2	0		100.00%	100.00%
	Hasil <i>(outcome)</i> Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						100.00%	100.00%
1 3 1 2 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	94,320,000	94,320,000	0	100.00%		
1 3 1 2 5	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
	Masukan <i>(Input)</i> Dana yang dibutuhkan		94,320,000	94,320,000	0	100.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran <i>(output)</i> Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	48	48	0		100.00%	100.00%
	Hasil <i>(outcome)</i> Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						100.00%	100.00%
1 3 1 2 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	434,875,300	434,055,835	819.465	99.81%		
1 3 1 2 6	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Masukan <i>(Input)</i> Dana yang dibutuhkan	Rp.	247,086,300	247,070,800	15.500	99.99%		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran <i>(output)</i> Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	60	0		100.00%	100.00%
	Hasil <i>(outcome)</i> Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.00%	100.00%
1 3 1 2 6	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Masukan <i>(Input)</i> Dana yang dibutuhkan	Rp.	30,001,000	30,000,000	1.000	100.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran <i>(output)</i> Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	7	0		100.00%	100.00%
	Keluaran <i>(output)</i>							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (outcome) Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						100.00%	100.00%
1 3 1 2 6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	0	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0		0.00%	0.00%
	Keluaran (output)							
	Hasil (outcome) Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0.00%	0.00%
1 3 1 2 6	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	0	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu						0.00%	0.00%
1 3 1 2 6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	157,788,000	156,985,035	802.965	99.49%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	43	43	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.00%	100.00%
1 3 1 2 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	37,740,000	37,000,000	740.000	98.04%		
1 3 1 2 7	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	0	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	0	0	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana						100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
1 3 1 2 7	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	37,740,000	37,000,000	740.000	98.04%		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	12	12	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.00%	100.00%
1 3 1 2 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	1,671,884,100	1,654,487,414	17.396.686	98.96%		
1 3 1 2 8	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan		129,000,000	113,607,414	15.392.586	88.07%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.00%	100.00%
1 3 1 2 8	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	1,542,884,100	1,540,880,000	2.004.100	99.87%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	206	206	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.00%	100.00%
1 3 1 2 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	229,555,000	228,247,200	1.307.800	99.43%		
1 3 1 2 9	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	207,555,000	206,247,200	1.307.800	99.37%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	7	7	0		100.00%	100,00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan						100.00%	100,00%
1 3 1 2 9	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	22,000,000	22,000,000	0	100.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12	12	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.00%	100.00%
1 3 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp.	14,821,093,602	10,692,022,491	4.129.071.111	72.14%		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
1 3 2 2 1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	10,053,796,024	7,140,891,082	2.912.904.942	71.03%		
1 3 2 2 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	274,320,478	48,657,000	225.663.478	17.74%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan	Dokumen	2	3	-1		100.00%	150,00%
	Hasil (outcome) Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi						100.00%	150,00%
1 3 2 2 1	Sub Kegiatan : Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	-	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Embung dan Penampung air lainnya yang di bangun	Unit	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (outcome) Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya						0,00%	0,00%
1 3 2 2 1	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Tanggul Sungai							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	5,402,111,546	2,737,681,719	2.664.429.827	50.68%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Panjang Tanggul sungai yang direhabilitasi	KM	0.65	3.33	-2,68		100.00%	512.31%
	Hasil (outcome) Terehabilitasinya tanggul sungai						100.00%	512.31%
1 3 2 2 1	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	4,377,364,000	4,354,552,363	22.811.637	99.48%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Panjang Tanggul dan tebing sungai yang dipelihara	KM	0.65	2.9	-2,25		100.00%	446,15%
	Hasil (outcome) Beroperasi dan terpeliharanya tanggul dan tebing sungai						100.00%	446,15%
1 3 2 2 2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1	Rp.	4,767,297,578	3,551,131,409	1.216.166.169	74.49%		
1 3 2 2 2	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	2,531,657,000	1,556,315,548	975.341.452	61.47%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	KM	3.38	0.77	2,61		100.00%	22,78%

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (<i>outcome</i>) Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan						100.00%	22,78%
1 3 2 2 2	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	2,000,000,000	1,981,777,861	18.222.139	99.09%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1.43	1	0,43		100.00%	69,93%
	Hasil (<i>outcome</i>) Beroperasi dan terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan						100.00%	69,93%
1 3 2 2 2	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	235,640,578	13,038,000	222.602.578	5.53%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	25	22	3		100.00%	88,00%
	Keluaran (<i>output</i>)							
	Hasil (<i>outcome</i>) Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air						100.00%	88,00%
1 3 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp.	9,159,856,000	5,010,681,127	4.149.174.873	54.70%		
1 3 3 2 1	Kegiatan Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	9,159,856,000	5,010,681,127	4.149.174.873	54.70%		
1 3 3 2 1	Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	3,416,650,000	1,557,389,154	1.859.260.846	45.58%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Kapasitas SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	4	4	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terbangunnya SPAM IKK/ Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu						100.00%	100.00%
1 3 3 2 1	Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	5,743,206,000	3,453,291,973	2.289.914.027	60.13%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	8	8	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Meluasnya jaringan SPAM IKK/ Pedesaan atau SPAM Tematik tertentu terbangun melalui						100.00%	100.00%
1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp.	1,421,605,000	1,243,510,000	178.095.000	87.47%		
1 3 5 2 1	Kegiatan Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	1,421,605,000	1,243,510,000	178.095.000	87.47%		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
1 3 5 2 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah							
	Masukan <i>(Input)</i> Dana yang dibutuhkan	Rp.	195,000,000	24,000,000	171.000.000	12.31%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran <i>(output)</i> Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	0		100.00%	100,00%
	Hasil <i>(outcome)</i> yang Disusun							
	Hasil <i>(outcome)</i> Tersusunnya rencana, Kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik						100.00%	100,00%
1 3 5 2 1	Sub Kegiatan : Pembangunan/ Penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman							
	Masukan <i>(Input)</i> Dana yang dibutuhkan	Rp.	1,226,605,000	1,219,510,000	7.095.000	99.42%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran <i>(output)</i> Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	9	9	0		100.00%	100,00%
	Hasil <i>(outcome)</i> Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat						100.00%	100,00%
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp.	18,614,338,213	9,056,519,679	9.557.818.534	48.65%		
1 3 8 2 1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Rp.	18,614,338,213	9,056,519,679	9.557.818.534	48.65%		
1 3 8 2 1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan							
	Masukan <i>(Input)</i> Dana yang dibutuhkan	Rp.	249,000,000	226,500,000	22.500.000	90.96%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran <i>(output)</i> Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungs	Dokumen	1	1	0		100.00%	100,00%
	Hasil <i>(outcome)</i> Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungs (SLF), peran						100.00%	100,00%
	Sub Kegiatan : (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Perencanaan, Implementasi SIMBG							
1 3 8 2 1	Sub Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota							
	Masukan <i>(Input)</i> Dana yang dibutuhkan	Rp.	18,365,338,213	8,830,019,679	9.535.318.534	48.08%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran <i>(output)</i> Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung	Dokumen	34	34	0		100.00%	100,00%
	Hasil <i>(outcome)</i> Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung						100.00%	100,00%
1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp.	1,357,956,600	1,314,722,078	43.234.522	96.82%		
1 3 9 2 1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	1,357,956,600	1,314,722,078	43.234.522	96.82%		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
1 3 9 2 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan		-	-	-	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan	Dokumen	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan						0.00%	0.00%
	Sub Kegiatan : Lingkungan di Kabupaten/Kota Pemeliharaan							
1 3 9 2 1	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	1,000,000,000	958,380,000	41.620.000	95.84%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah,	Kawasan	5	5	0		100.00%	100,00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terpeliharanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan						100.00%	100,00%
1 3 9 2 1	Sub Kegiatan : Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	357,956,600	356,342,078	1.614.522	99.55%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	1	1	0		100.00%	100.00%
	Keluaran (<i>output</i>)							
	Hasil (<i>outcome</i>) Terlaksannya Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan						100.00%	100.00%
1 3 10 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp.	104,553,619,775	84,966,770,333	19.586.849.442	81.27%		
1 3 10 2 1	Kegiatan Penyelenggaraan jalan kabupaten/ kota	Rp.	104,553,619,775	84,966,770,333	19.586.849.442	81.27%		
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	1,096,819,362	720,137,800	376.681.562	65.66%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis,	Dokumen	12	12	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis,						100.00%	100.00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	41,192,811,951	27,254,755,833	13.938.056.118	66.16%		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang Jalan yang dibangun	KM	3	3	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terbangunnya jalan						100.00%	100.00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	21,996,560,000	21,741,530,600	255.029.400	98.84%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi Jalan	KM	9.43	9.43	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terlaksananya Rekonstruksi jalan						100.00%	100.00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	-	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang Jalan yang direhabilitasi	KM	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terlaksananya rehabilitasi jalan						0.00%	0.00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	2,000,000,000	1,996,000,000	4.000.000	99.80%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	5	5	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terpeliharanya jalan secara berkala						100.00%	100.00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	4,071,404,000	4,045,185,000	26.219.000	99.36%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara rutin	KM	5	5	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terpeliharanya jalan secara rutin						100.00%	100.00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	32,244,780,000	28,882,043,400	3.362.736.600	89.57%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang Jembatan yang dibangun	Meter	6	6	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terbangunnya Jembatan						100.00%	100.00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	-	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	Meter	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terehabilitasinya Jembatan						0.00%	0.00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	-	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang jembatan yang dilakukan Pemeliharaan secara rutin	Meter	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terpeliharanya jembatan secara rutin						0,00%	0,00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jembatan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	-	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang jembatan yang dilakukan Pemeliharaan secara berkala	Meter	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terpeliharanya jembatan secara berkala						0,00%	0,00%
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	-	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	KM	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terehabilitasinya/ Terekonstruksinya Jalan						0,00%	0,00%
	Sub Kegiatan : dan Jembatan Akibat Bencana Pengawasan							
1 3 10 2 1	Sub Kegiatan : Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	1,951,244,462	327,117,700	1.624.126.762	16.76%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (output) Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Teknis penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Dokumen	12	12	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Pengawasan Teknis penyelenggaraan Jalan/Jembatan						100.00%	100.00%
1 3 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp.	223,271,500	196,635,760	26.635.740	88.07%		
1 3 11 2 1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp.	101,267,000	75,189,000	26.078.000	74.25%		
1 3 11 2 1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan		101,267,000	75,189,000	26.078.000	74.25%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang	Orang	50	50	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						100.00%	100.00%
1 3 11 2 4	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp.	122,004,500	121,446,760	557.740	99.54%		
1 3 11 2 4	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	78,913,300	78,355,560	557.740	99.29%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan	Orang	30	30	0		100.00%	100.00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan						100.00%	100.00%
	Sub Kegiatan : Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pengawasan dan							
1 3 11 2 4	Sub Kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	43,091,200	43,091,200	-	100.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (output) Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Dokumen	1	1	0		100.00%	100,00%
	Hasil (outcome) Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib						100.00%	100,00%
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp.	475,140,000	429,110,000	46.030.000	90.31%		
1 3 12 2 1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota	Rp.	272,599,500	242,620,000	29.979.500	89.00%		
1 3 12 2 1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota							
	Masukan (Input) Dana yang dibutuhkan	Rp.	272,599,500	242,620,000	29.979.500	89.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota						100.00%	100.00%
1 3 12 2 1	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	-	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota						0.00%	0.00%
1 3 12 2 3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	202,540,500	186,490,000	16.050.500	92.08%		
1 3 12 2 3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	202,540,500	186,490,000	16.050.500	92.08%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan	Dokumen	1	1	0		100.00%	100.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan						100.00%	100.00%
1 3 12 2 4	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	-	-	-	0.00%		
1 3 12 2 4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang							
	Masukan (<i>Input</i>) Dana yang dibutuhkan	Rp.	-	-	-	0.00%		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran (<i>output</i>) Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Dokumen	0	0	0		0.00%	0.00%
	Hasil (<i>outcome</i>) Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						0.00%	0.00%

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,921,573,049.00	3,604,039,403.00	92.04			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		47,100,000.00	47,090,000.00	99.98			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		8,100,000.00	8,100,000.00	100.00			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen				
	Hasil (Outcome) tersusunnya dokumen Renstra dan Renja							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		10,000,000.00	9,990,000.00	99.90			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Hasil (Outcome) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Hasil (Outcome) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		11,000,000.00	11,000,000.00	100.00			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan		4 Laporan	4 Laporan				
	Hasil (Outcome) Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja, laporan evaluasi renja, laporan LKPJ							
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		8,000,000.00	8,000,000.00	100.00			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Tersusunnya Lakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
	Hasil (Outcome) Tersusunnya laporan LAKIP							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,602,594,249.00	2,406,048,953.00	92.45			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		2,555,673,749.00	2,365,643,553.00	92.56			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Jumlah Gaji dan Tunjangan Jabatan ASN		14 Bulan	14 Bulan				
	Hasil (Outcome) Tersedianya Gaji dan Tunjangan Jabatan ASN							
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		10,000,000.00	8,295,000.00	82.95			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan					
	Hasil (Outcome) Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		79,960,000.00	61,526,000.00	76.95			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		36,920,500.00	32,110,400.00	86.97			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Jumlah Alat Tulis Kantor, peralatan dan perlengkapan kantor		3 Paket	3 Paket				
	Hasil (Outcome) Jumlah Alat Tulis Kantor, peralatan dan perlengkapan kantor							
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		35,670,000.00	29,800,000.00	83.54			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		192 blok	192 blok				
	Hasil (Outcome) tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		20,390,000.00	11,890,000.00	58.31			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran Tersedianya Makanan dan Minuman tamu (Output)		210 kotak	210 kotak				
	Hasil (Outcome) tersedianya Makanan dan Minuman tamu							
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		23,900,000.00	19,836,000.00	83.00			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi (Output)		192 Kali	192 Kali				
	Hasil (Outcome) terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi							
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		38,400,000.00	30,068,922.00	78.30			
	Urusan Pemerintah Daerah							
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		38,400,000.00	30,068,922.00	78.30			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Output)		12 Laporan	12 Laporan				
	Hasil (Outcome) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		832,807,500.00	773,520,100.00	92.88			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		832,807,500.00	773,520,100.00	92.88			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Output)		12 Laporan	12 Laporan				
	Hasil (Outcome) Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		282,311,300.00	255,716,506.00	90.58			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		282,311,300.00	255,716,506.00	90.58			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran jumlah Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Output)		4 Unit	4 Unit				
	Hasil (Outcome) terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional							
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		100,000,000.00	-				
	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100,000,000.00	-				
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		100,000,000.00	-				
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Output)		1 Laporan	1 Laporan				
	Hasil (Outcome) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi							
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		1,659,043,000.00	909,487,550.00	54.82			
	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		400,000,000.00	283,605,750.00	70.90			
	Sub Kegiatan : Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		400,000,000.00	283,605,750.00	70.90			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Output)		1 Laporan	1 Laporan				
	Hasil (Outcome) Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh							
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1,259,043,000.00	625,881,800.00	49.71			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		225,000,000.00	89,060,200.00	39.58			
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran (Output)		2 Dokumen	2 Dokumen				
	Hasil (Outcome) Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)							
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni							
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		1,259,043,000.00	625,881,800.00	49.71			
	Lokasi Kab.Pesawaran							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR					SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
							PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2					3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (Output)	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				36 Unit Rumah	36 Unit Rumah					
		Huni										
	Hasil (Outcome)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki										
	PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						2,494,920,000.00	904,562,660.00	36.26			
	Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						2,494,920,000.00	904,562,660.00	36.26			
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar											
	Masukan (Input)	Dana yang di butuhkan					2,494,920,000.00	904,562,660.00	36.26			
	Lokasi	Kab.Pesawaran										
	Keluaran (Output)	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan				110 Unit Rumah	110 Unit Rumah					
	Hasil (Outcome)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap tumbuh dan Berkembangnya										
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA						21,904,875,300.00	16,105,272,130.00				
	DAN UTILITAS UMUM (PSU)								73.52			
	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						21,904,875,300.00	16,105,272,130.00	73.52			
	Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan											
	Masukan (Input)	Dana yang di butuhkan					238,000,000.00	218,017,800.00	91.60			
	Lokasi	Kab.Pesawaran										
	Keluaran (Output)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen					
	Hasil (Outcome)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU										
	Perumahan											
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian											
	Masukan (Input)	Dana yang di butuhkan					21,666,875,300.00	15,887,254,330.00	73.33			
	Lokasi	Gedong Tataan										
	Keluaran (Output)	Tersedianya PSU Perumahan				101 Lokasi	101 Lokasi					
	Hasil (Outcome)	Peningkatan Kualitas PSU Perumahan										
	JUMLAH						30,042,011,349.00	21,493,292,821.00	71.54			

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		2,617,663,431	2,444,785,605	172,877,826.00	93.40		
	Keluaran : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai	Bulan	12	12	-	100		
	Hasil : Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran		12	12	-	100		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		124,510,000	124,510,000	-	100		
	Keluaran : Terbayarnya honorarium Pegawai Tenaga Kontrak dan Penatausahaan Keuangan (PA, P2K, PPK, PPTK,	orang	20	20	-	100		
	Bendahara pengeluaran, Bendahara Barang, Staf Bendahara dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa)				-			
	Hasil : Terwujudnya kinerja Pegawai Tenaga Kontrak dan Terlaksananya administrasi penatausahaan keuangan		20	20	-	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		23,940,000	22,920,662	1,019,338.00	95.74		
	Keluaran : Terbayarnya listrik dinas sosial kabupaten pesawaran	Bulan	12	12	-	100		
	Hasil : Listrik untuk Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran		12	12	-	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		169,000,000	169,000,000	-	100		
	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PTK	13	13	-	100		
	Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13	13	-	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas				-			
	Operasional atau Lapangan				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		214,481,300	214,368,260	113,040.00	99.95		
	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	unit	7	7	-	100		
	Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops		7	7	-	100		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten / kota				-			
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		70,000,000	70,000,000	-	100		
	Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan KapasitasnyaKewenangan Kabupaten/Kota	LKS	5	5	-	100		
	Hasil : Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasismasyarakat(WKBSM)/lembaga kesejahteraan sosial		5	5	-	100		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan				-			
	Keluarga (LK3)				-			
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		120,000,000	120,000,000.00	-	100		
	Keluaran : Jumlah karang taruna peserta Bulan Bhakti dan Peserta lomba desa	orang	33	33	-	100		
	Hasil : Kesiapan warga karang taruna peserta Bulan Bhakti dan Peserta lomba desa		33	33	-	100		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				-			
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		14,950,000	14,950,000.00	-	100		
	Keluaran : Jumlah TAGANA di Kabupaten Pesawaran	Paket	24	24	-	100		
	Hasil : Penanggulangan bencana alam dan Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Pesawaran		24	24	-	100		
JUMLAH			3,354,544,731	3,180,534,527	174,010,204.00	94.81		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
II	BELANJA DAERAH							
2.17.01.2.02.01.5.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Rp	4,019,784,941	3,853,023,048	166,761,893	95.85	100	98.81
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	Rp	4,019,784,941	3,853,023,048	166,761,893	95.85	100	98.81
5.1	BELANJA OPERASI	Rp	4,019,744,941	3,838,323,048	181,421,893	95.49	100	98.81
2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	3,230,844,941	3,070,015,048	160,829,893	95.02	100	100
2.17.01.2.02	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2,749,733,641	2,579,683,231	149,578,410	93.82	100	100
02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Rp	2,550,383,641	2,405,485,231	144,898,410	94.32	100	100
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedung Tataan							
	Keluaran : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN							
	Hasil : Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14 Bulan	14 Bulan
02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	199,390,000	194,710,000	4,680,000	97.65	100	100
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedung Tataan							
	Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Hasil : Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak dan Pejabat Penatausahaan Keuangan yang terbayar selama 12 bulan						12 Bulan	12 Bulan
2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	54,140,000	52,925,930	1,214,070	97.76	100	100
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	11,889,400	11,789,000	100,400	99.16	100	100
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedung Tataan							
	Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan							
	Hasil : Optimalisasi Kinerja Pegawai dalam administrasi						12 Bulan	12 Bulan
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	7,663,600	7,660,000	3,600	99.95	100	100

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan							
	Hasil : Meningkatnya kinerja pegawai						15000 lembar	15000 lembar
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	34,587,000	33,476,930	1,110,070	96.79	100	100
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Keluaran : Terlaksananya rakor konsultasi dan koordinasi							
	Hasil : Meningkatnya kinerja pegawai						250 kali	250 kali
2.17.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	247,000,000	241,395,877	5,604,123	97.73	100	100
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Rp	13,000,000	7,395,877	5,604,123	56.89	100	100
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Keluaran : Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar selama 12 bulan							
	Hasil : Terbayarnya langganan jasa listrik, tv dan telpon						12 Bulan	12 Bulan
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	234,000,000	234,000,000	0	100.00	100	100
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Keluaran : Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dibayar selama 13 bulan							
	Hasil : Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi						13 Bulan	13 Bulan
2.17.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	179,931,300	175,578,010	4,353,290	97.58	100	100
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	179,931,300	175,578,010	4,353,290	97.58	100	100
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Keluaran : Jumlah pajak kendaraan dinas roda 2 dan kendaraan dinas roda 4						4 motor	4 motor
	Hasil : Terbayar pajak kendaraan dinas roda 2 dan kendaraan dinas roda 4						2 mobil	2 mobil

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
2.17.05.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	457,770,000	457,770,000	0	100.00	100	0.00
2.17.05.2.01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	457,770,000	457,770,000	0	100.00	100	0.00
01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp	457,770,000	457,770,000	0	100.00	100	0.00
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Keluaran : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
	Hasil : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian						10 orang	10 orang
2.17.06.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	118,650,000	118,650,000	0	100.00	100	0.00
2.17.06.2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	118,650,000	118,650,000	0	100.00	100	0.00
01.01	Pemberdayaan, Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Rp	118,650,000	118,650,000	0	100.00	100	0.00
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Keluaran : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM							
	Hasil : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Perkoperasian						10 Koperasi	10 Koperasi
2.07.08.	Program Pengembangan UMKM	Rp	212,520,000	212,320,000	200,000	99.91	100	100
2.07.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp	212,520,000	212,320,000	200,000	99.91	100	100
01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp	212,520,000	212,320,000	200,000	99.91	100	100
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Keluaran : Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta							
	Hasil : Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta						2 kali	2 kali

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	BELANJA OPERASI		4.539.321.082	4.183.558.846	355.762.236	92,16%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.061.887.482	2.839.495.926	222.391.556	92,74%		
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.576.886.182	2.374.210.026	202.676.156	92,13%		
1.1.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		2.414.666.782	2.233.280.626	181.386.156	92,49%		
1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		152.219.400	140.929.400	11.290.000	92,58%		
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		10.000.000	-	10.000.000	0,00%		
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		21.100.000	10.550.000	10.550.000	50,00%		
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.250.000	7.250.000	-	100,00%		
1.2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.300.000	3.300.000	-	100,00%		
1.2.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10.550.000	-	10.550.000	0,00%		
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		252.000.000	246.622.650	5.377.350	97,87%		
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		18.000.000	13.622.650	4.377.350	75,68%		
1.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		234.000.000	233.000.000	1.000.000	99,57%		
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		211.901.300	208.113.250	3.788.050	98,21%		
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		191.901.300	188.113.250	3.788.050	98,03%		
1.4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		20.000.000	20.000.000	-	100,00%		
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1.477.433.600	1.344.062.920	133.370.680	90,97%		
2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1.477.433.600	1.344.062.920	133.370.680	90,97%		
2.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		55.000.000	-	55.000.000	0,00%		
2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		1.382.433.600	1.304.062.920	78.370.680	94,33%		
2.1.3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		40.000.000	40.000.000	-	100,00%		
JUMLAH BELANJA OPERASI			4.539.321.082	4.183.558.846	355.762.236	92,16%		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		25,000,000	25,000,000	-	100.00		
	Kegiatan penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam satu Kabupaten/kota		25,000,000	25,000,000	-	100.00		
	Sub Kegiatan Mediasi Pynelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/Kabupaten		25,000,000	25,000,000	-	100.00		
	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota		3,539,957,820	3,338,930,517	201,027,303	94.32		
	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5,000,000	5,000,000	-	100.00		
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5,000,000	5,000,000	-	100.00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.		2,576,296,520	2,407,215,444	169,081,076	93.44		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,383,716,520	2,218,239,444	165,477,076	93.05		
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		187,580,000	183,920,000	3,660,000	98.05		
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5,000,000	5,000,000	-	100.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		49,112,000	48,049,053	1,062,947	97.84		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7,126,000	6,970,000	156,000	97.81		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		41,986,000	41,079,053	906,947	97.84		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		465,158,000	458,470,500	6,687,500	98.56		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		18,600,000	12,162,500	6,437,500	63.50		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		31,558,000	31,308,000	250,000	99.21		
	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		415,000,000	415,000,000	-	100.00		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan		444,391,300	420,195,520	24,195,780	94.55		
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		444,391,300	420,195,520	24,195,780	94.55		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		441,754,000	418,640,330	23,113,670	94.77		
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab./Kota		441,754,000	418,640,330	23,113,670	94.77		
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		441,754,000	418,640,330	23,113,670	94.77		
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		274,250,000	274,226,000	24,000	99.99		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota		274,250,000	274,226,000	24,000	99.99		
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		274,250,000	274,226,000	24,000	99.99		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		15,000,000	12,850,000	2,150,000	85.67		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota		15,000,000	12,850,000	2,150,000	85.67		
	Sub Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		15,000,000	12,850,000	2,150,000	85.67		
	Program Pengelolaan Persampahan		838,500,000	838,230,100	269,900	99.97		
	Kegiatan Pengelolaan Persampahan		838,500,000	838,230,100	269,900	99.97		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		838,500,000	838,230,100	269,900	99.97		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
2.18.0.00.0.00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2.18.01.2.02	Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	2,394,915,126	2,233,301,534	161,613,592	93.25	19 org/bln	19 org/bln
	Masukan : 2,394,915,126							
	Lokasi : DPMPPTSP							
	Keluaran : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
	Hasil : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.18.01.2.02.03	Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	201,885,000	192,353,400	9,531,600	95.28	18 dok	17 dok
	Masukan : 201,885,000							
	Lokasi : DPMPPTSP							
	Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD							
	Hasil : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.18.01.2.01.01	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	33,757,500	23,157,500	10,600,000	68.60	3 dok	3 dok
	Masukan : 33,757,500							
	Lokasi : DPMPPTSP							
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Hasil : Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.18.01.2.01.07	Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	10,000,000	10,000,000	0	100.00	5 dok	5 dok
	Masukan : 10,000,000							
	Lokasi : DPMPPTSP							
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Hasil : Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran							

2.18.01.2.06.11	Kegiatan :	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	18,712,400	17,115,500	1,596,900	91.47	16 paket	15 paket
	Masukan :	18,712,400							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.18.01.2.06.02	Kegiatan :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	37,627,700	35,838,700	1,789,000	95.25	40 paket	39 paket
	Masukan :	37,627,700							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.18.01.2.06.03	Kegiatan :	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	20,785,400	18,730,900	2,054,500	90.12	28 paket	27 paket
	Masukan :	20,785,400							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.18.01.2.06.05	Kegiatan :	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	28,748,000	24,673,100	4,074,900	85.83	11 paket	10 paket
	Masukan :	28,748,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.18.01.2.06.06	Kegiatan :	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	22,800,000	22,800,000	0	100.00	200 dok	200 dok
	Masukan :	22,800,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.18.01.2.06.09	Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	135,182,000	94,548,742	40,633,258	69.94	127 lap	100 lap
	Masukan :	135,182,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							

	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyelegaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.18.01.2.07.06	Kegiatan :	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	61,419,500	0	61,419,500	0.00	6 unit	0
	Masukan :	61,419,500							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan							
	Hasil :	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah							
2.18.01.2.07.10	Kegiatan :	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	Rp.	91,000,000	0	91,000,000	0.00	5 unit	0
	Masukan :	91,000,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang disediakan							
	Hasil :	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah							
2.18.01.2.07.11	Kegiatan :	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	10,475,000	0	10,475,000	0.00	3 unit	0
	Masukan :	10,475,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang							
	Hasil :	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah							
2.18.01.2.08.04	Kegiatan :	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	60,600,000	47,702,119	12,897,881	78.72	3 lap	3 lap
	Masukan :	60,600,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor							
2.18.01.2.08.04	Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	255,000,000	255,000,000	0	100.00	20 lap	20 lap
	Masukan :	255,000,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kator yang disediakan							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor							
2.18.01.2.09.02	Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp.	238,500,000	234,462,505	4,037,495	98.31	3 unit	3 unit

	Masukan :	238,500,000							
	Lokasi :	DPMPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor							
2.18.01.2.09.09	Kegiatan :	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	276,000,000	184,953,500	91,046,500	67.01	6 paket	4 paket
	Masukan :	276,000,000							
	Lokasi :	DPMPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dan direhab							
	Hasil :	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor							
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
2.18.02.2.01.02	Kegiatan :	Evaluasi Pelaksanaan Pemerian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp.	74,829,000	65,933,775	8,895,225	88.11	2 keg usaha	2 keg usaha
	Masukan :	74,829,000							
	Lokasi :	DPMPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di							
	Hasil :	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemerian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
2.18.02.2.02.02	Kegiatan :	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp.	318,458,000	177,630,200	140,827,800	55.78	5 dok	5 dok
	Masukan :	318,458,000							
	Lokasi :	DPMPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota							
	Hasil :	Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi dan Promosi Penanaman Modal							
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
2.18.04.2.01.01	Kegiatan :	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Rp.	73,945,000	67,945,000	6,000,000	91.89	473 pelaku usaha	473 pelaku usaha
	Masukan :	73,945,000							
	Lokasi :	Gedong Tataan							
	Keluaran :	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem							
	Hasil :	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							
2.18.04.2.01.02	Kegiatan :	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp.	81,615,000	78,385,000	3,230,000	96.04	473 pelaku usaha	473 pelaku usaha
	Masukan :	81,615,000							

	Lokasi :	11 Kecamatan							
	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen							
	Hasil :	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							
2.18.04.2.01.03	Kegiatan :	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadp Pelayanan Terpadu	Rp.	50,022,500	48,822,500	1,200,000	97.60	7 org	4 org
	Masukan :	50,022,500							
	Lokasi :	11 Kecamatan							
	Keluaran :	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap							
	Hasil :	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							
2.18.04.2.01.04	Kegiatan :	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp.	50,431,000	50,431,000	0	100.00	126 keg usaha	126 keg usaha
	Masukan :	50,431,000							
	Lokasi :	11 Kecamatan							
	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan							
	Hasil :	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
2.18.05.2.01	Kegiatan :	Koordinasi dan Sinkroniasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	17,267,000	13,877,000	3,390,000	80.37	20 keg usaha	20 keg usaha
	Masukan :	17,267,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan							
	Hasil :	Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal serta data dan informasi perizinan dan non perizinan							
2.18.05.2.02	Kegiatan :	Koordinasi dan Sinkroniasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	295,250,000	287,112,200	8,137,800	97.24	210 pelaku usaha	210 pelaku usaha
	Masukan :	295,250,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan penanaman modal							
	Hasil :	Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal serta data dan informasi perizinan dan non perizinan							
2.18.05.2.03	Kegiatan :	Koordinasi dan Sinkroniasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	153,450,000	129,000,000	24,450,000	84.07	40 keg usaha	40 keg usaha
	Masukan :	153,450,000							
	Lokasi :	DPMPPTSP							
	Keluaran :	Jumlah pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan							

	Hasil : Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal serta data dan informasi perizinan dan non perizinan							
	JUMLAH	Rp.	5,012,675,126	4,313,774,175	698,900,951	86.06		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,689,905,592	2,542,279,387	147,626,205	95.00		
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,297,224,792	2,158,768,792	138,456,000	94.00		
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	2,188,064,792	2,049,608,792	138,456,000	93.67	14	100.00
2 19 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	109,160,000	109,160,000	-	100.00	12	100.00
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		17,410,800	17,410,800	-	100.00		
2.19.01.2.06.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	17,410,800	17,410,800	-	100.00	8	100.00
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		168,000,000	160,000,000	8,000,000	95.00		
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	168,000,000	160,000,000	8,000,000	95.24	182	87.91
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		207,270,000	206,099,795	1,170,205	99.44		
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	177,270,000	176,099,795	1,170,205	99.34	5	100.00
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	30,000,000	30,000,000	-	100.00	1	100.00
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		682,000,000	566,777,000	115,223,000	83.11		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha		300,000,000	299,577,000	423,000	99.86		
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	orang	300,000,000	299,577,000	423,000	99.86	80	100.00
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		382,000,000	267,200,000	114,800,000	69.95		
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	organisasi	382,000,000	267,200,000	114,800,000	69.95	3	100.00
	Kabupaten/Kota							
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	2,234,000,000	1,165,100,000	1,068,900,000	154.00	-	-
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		25,000,000	25,000,000	-	100.00		
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	organisasi	25,000,000	25,000,000	-	100.00	1	100.00
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2,129,000,000	1,140,100,000	988,900,000	53.55		
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi	event	2,129,000,000	1,140,100,000	988,900,000	53.55	4	100.00

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		80,000,000	-	80,000,000	-		
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	organisasi	80,000,000	-	80,000,000	-	1	-
JUMLAH			5,605,905,592	4,274,156,387	1,331,749,205	76.24		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,419,795,972	3,076,458,147		89.96		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,923,795,972	2,640,775,817		90.32		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		2,709,795,972	2,492,407,817		91.98		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		2,709,795,972	2,492,407,817		91.98		
	Keluaran (output) Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	tahun	1	1				
	Hasil (Outcome) Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		1	1				
	Sub Kegiatan Pelaksanaa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		214,000,000	148,368,000		69.33		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		214,000,000	148,368,000		69.33		
	Keluaran (output) Terbayarnya Penerima Honorarium Pegawai dan Pejabat Penatausahaan Keuangan	bulan	12	12				
	Hasil (Outcome) Tercapainya pembayaran Penerima Honorarium Pegawai dan Pejabat Penatausahaan Keuangan		12	12				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		273,500,000	267,565,910		97.83		
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik		13,500,000	9,565,910		70.86		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		13,500,000	9,565,910		70.86		
	Keluaran (output) Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12				
	Hasil (Outcome) Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		260,000,000	258,000,000		99.23		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		260,000,000	258,000,000		99.23		
	Keluaran (output) Penerima Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak	orang	20	20				
	Hasil (Outcome) Tercapainya Penerima Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak		20	20				
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		222,500,000	168,116,420		75.56		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak		197,500,000	150,491,420		76.20		
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan							
	Lokasi Gedong Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		197,500,000	150,491,420		76.20		
	Keluaran (output) Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	unit	9	9				
	Hasil (Outcome) Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan		9	9				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		25,000,000	17,625,000		70.50		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		25,000,000	17,625,000		70.50		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (output)	Terpeliharanya Aquarium di Kantor Pemda sebagai Ikon Pemkab Pesawaran	bulan	12	12				
	Hasil (Outcome)	Tercapainya Pemeliharaan Aquarium di Kantor Pemda sebagai Ikon Pemkab Pesawaran		12	12				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			125,000,000	101,580,000		81.26		
	Kegiatan	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		125,000,000	101,580,000		81.26		
	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		105,000,000	89,580,000		85.31		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		105,000,000	89,580,000		85.31		
	Keluaran (output)	1. Jumlah Nelayan Kecil yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan bantuan Asuransi	orang	200	200				
	Hasil (Outcome)	1. Jumlah Nelayan Kecil yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan bantuan Asuransi		200	200				
	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		20,000,000	12,000,000		60.00		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		20,000,000	12,000,000		60.00		
	Keluaran (output)	Jumlah kelompok nelayan yang terfasilitasi pengembangan kelembagaannya	Kelompok	6	6				
	Hasil (Outcome)	Jumlah kelompok nelayan yang terfasilitasi pengembangan kelembagaannya		6	6				
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			46,810,000	14,860,000		31.75		
	Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		46,810,000	14,860,000		31.75		
	Sub Kegiatan	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		46,810,000	14,860,000		31.75		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		46,810,000	14,860,000		31.75		
	Keluaran (output)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Izin Usaha Perikanan	dokumen	1	1				
	Hasil (Outcome)	Tercapainya Dokumen Hasil Monitoring Izin Usaha Perikanan		1	1				
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			100,000,000	56,042,800		56.04		
	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		100,000,000	56,042,800		56.04		
	Sub Kegiatan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100,000,000	56,042,800		56.04		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		100,000,000	56,042,800		56.04		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (output) 1. Jumlah Peserta Sosialisasi GEMARIKAN 2. Ketersediaan Data Angka Konsumsi Ikan (Nilai B dan C)	orang & dokumen	300 & 1	300 & 1				
	Hasil (Outcome) 1. Jumlah Peserta Sosialisasi GEMARIKAN 2. Ketersediaan Data Angka Konsumsi Ikan (Nilai B dan C)		300 & 1	300 & 1				

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	DINAS PARIWISATA							
	URUSAN PILIHAN PARIWISATA							
I.	Belanja Daerah		5,007,803,518	4,446,623,178	561,180,340	88.79		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,534,086,518	3,298,198,578	235,887,940	93.33		
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,923,386,518	2,709,130,436	214,256,082			
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,721,856,518	2,530,798,818	191,057,700			
	Masukan: 2.721.856.518							
	Lokasi: Way Layap Kec. Gedong Tataan							
	Keluaran: Tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan ASN						14 Bulan	14 Bulan
	Hasil: Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN						100	100
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		201,530,000	178,331,618	23,198,382			
	Masukan: 201.503.000							
	Lokasi: Way Layap Kec. Gedong Tataan							
	Keluaran: Tersedianya anggaran jasa administrasi keuangan						12 Bulan	12 Bulan
	Hasil: Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan						100	100
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		410,700,000	400,000,557	10,699,443			
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36,100,000	34,774,357	1,325,643			
	Masukan: 36.100.000							
	Lokasi: Way Layap Kec. Gedong Tataan							
	Keluaran: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 Bulan	12 Bulan
	Hasil: Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100	100
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		374,600,000	365,226,200	9,373,800			
	Masukan: 374.600.000							
	Lokasi: Way Layap Kec. Gedong Tataan							
	Keluaran: Tersedianya Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 Bulan	12 Bulan
	Hasil: Tebayarnya Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor						100	100
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200,000,000	189,067,585	10,932,415			
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		200,000,000	189,067,585	10,932,415			
	Masukan: 200.000.000							
	Lokasi: Way Layap Kec. Gedong Tataan							
	Keluaran: Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12 Bulan	12 Bulan
	Hasil: Tebayarnya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100	100
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		705,457,000	699,457,000	6,000,000	99.15		
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		705,457,000	699,457,000	6,000,000			
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		705,457,000	699,457,000	6,000,000			
	Masukan: 705.457.000							
	Lokasi: Kab.Pesawaran							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran: Pelaksanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						5 Kegiatan Pelatihan/Bimtek 100	5 Kegiatan Pelatihan/Bimtek 100
	Hasil: Terlaksananya pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota							
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		292,800,000	84,760,000	208,040,000	28.95		
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		292,800,000	84,760,000	208,040,000			
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		292,800,000	84,760,000	208,040,000			
	Masukan: 292.800.000							
	Lokasi: Kab.Pesawaran							
	Keluaran: Tersedianya anggaran Event Promosi Pemasaran Pariwisata						2 Event	2 Event
	Hasil: Terlaksananya Event Promosi Pemasaran Pariwisata						100	100
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		475,460,000	364,207,600	111,252,400	76.60		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		475,460,000	364,207,600	111,252,400			
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		475,460,000	364,207,600	111,252,400			
	Masukan:475.460.000							
	Lokasi: Kab.Pesawaran							
	Keluaran: Tersedianya anggaran Pemilihan Muli- Mekhanai						60 Orang	60 Orang
	Hasil: Terlaksananya Pemilihan Muli- Mekhanai						100	100
	JUMLAH		5,007,803,518	4,446,623,178	561,180,340	88.79		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.496.500	24.510.500	80,37%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.476.500	11.076.500	88,78%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		18.020.000	13.434.000	74,55%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.696.746.769	3.303.072.199	89,35%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		3.455.725.169	3.118.530.599	90,24%			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		219.240.000	165.810.000	75,63%			
	Koordinas dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		11.781.600	8.731.600	74,11%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		10.000.000	10.000.000	100%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		228.141.900	193.301.330	84,73%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.810.000	5.810.000	100,00%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		35.054.300	34.650.800	98,85%			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9.475.600	9.475.600	100,00%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25.425.000	25.037.500	98,48%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10.069.000	10.069.000	100,00%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12.110.000	12.110.000	100,00%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		130.198.000	96.148.430	73,85%			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		18.600.000	8.500.000	45,70%			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		18.600.000	8.500.000	45,70%			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		672.000.000	669.000.000	99,55%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		48.000.000	48.000.000	100,00%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		624.000.000	621.000.000	99,52%			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		390.730.000	385.937.200	98,77%			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		384.930.000	380.237.200	98,78%			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5.800.000	5.700.000	98,28%			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		690.152.590	485.662.400	70,37%			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		520.152.590	319.262.400	61,38%			
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		274.391.190	192.670.000	70,22%			
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		245.761.400	126.592.400	51,51%			
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Pedagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		170.000.000	166.400.000	97,88%			
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		170.000.000	166.400.000	97,88%			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		61.547.400	49.547.400	80,50%			
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		61.547.400	49.547.400	80,50%			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		30.000.000	18.000.000	60,00%			
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		31.547.400	31.547.400	100,00%			
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		165.500.000	108.165.000	65,36%			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		165.500.000	108.165.000	65,36%			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		80.000.000	47.820.000	59,78%			
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		80.000.000	57.545.000	71,93%			
	Penyidikan Metrologi Legal		5.500.000	2.800.000	50,91%			
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		1.099.158.900	473.611.300	43,09%			
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		1.099.158.900	473.611.300	43,09%			
	Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		979.158.900	407.340.300	41,60%			
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		120.000.000	66.271.000	55,23%			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		1.188.752.400	1.052.599.740	88,55%			
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		1.188.752.400	1.052.599.740	88,55%			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Peyebaran dan Perwilayahan Industri		55.000.000	23.793.000	43,26%			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		109.780.000	82.409.900	75,07%			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan		170.000.000	163.335.700	96,08%			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		853.972.400	783.061.140	91,70%			

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Rp.	200,000,000	192,430,000	7,570,000	96	100	96
	URUSAN WAJIB	Rp.	200,000,000	192,430,000	7,570,000	96	100	96
	BELANJA LANGSUNG	Rp.	200,000,000	192,430,000	7,570,000	96	100	96
4 01 4 01 01 19	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	200,000,000	192,430,000	7,570,000	96	100	96
4 01 4 01 01 19 01	Sub KEGIATAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN							
	MASUKAN : JUMLAH DANA	Rp.	68,000,000	67,930,000	70,000	100	100	100
	LOKASI : KABUPATEN PESAWARAN							
	KELUARAN : TERLAKSANANYA RAPAT KOORDINASI PEJABAT						1 Rapat	1 Rapat
	: TERFASILITASINYA PELAKSANAAN APKASI KAB.PESAWARAN						1 Kegiatan	1 Kegiatan
	HASIL : MENINGKATNYA TAT KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						1 Laporan dan Kegiatan	1 Laporan dan Kegiatan
4 01 4 01 01 19 02	SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				-			
	MASUKAN : JUMLAH DANA	Rp.	68,000,000	60,500,000	7,500,000	89	100	89
	LOKASI : KABUPATEN PESAWARAN							
	KELUARAN : JUMLAH DOKUMEN BATAS WILAYAH						5 Laporan	5 Laporan
	: JUMLAH PETA DASAR						1 Peta Dasar	1 Peta Dasar
	HASIL : MENINGKATNYA TAT KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						5 Laporan dan Kegiatan	5 Laporan dan Kegiatan
4 01 4 01 01 19 03	SUB KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH							
	MASUKAN : JUMLAH DANA	Rp.	64,000,000	64,000,000	-	100	100	100
	LOKASI : DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI							
	KELUARAN : TERSUSUNNYA BUKU LPPD DAN SPM						4 Buku	4 Buku
	HASIL : MENINGKATNYA TAT KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						4 Laporan dan Kegiatan	4 Laporan dan Kegiatan

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEREKONOMIAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4	BELANJA LANGSUNG							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	Rp.	192,500,000	188,567,148	3,932,852	97.96	100.00	100.00
4.	Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Rp.	192,500,000	188,567,148	3,932,852	97.96	100.00	100.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	Rp.	192,500,000	188,567,148	3,932,852	97.96		
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	192,500,000	188,567,148	3,932,852	97.96		
4 01 03 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	50,000,000	50,000,000	-	100.00		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BUMD						100%	100%
	Hasil : Terpenuhinya Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BUMD						100%	100%
4 01 03 2 01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	67,500,000	63,567,148	3,932,852	94.17		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Data Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Harga Bahan Pokok						100%	100%
	Hasil : Terpenuhinya Dokumen Laporan Data Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Harga Bahan Pokok						100%	100%
4 01 03 2 01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	75,000,000	75,000,000	-	100.00		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah BUMDes dan UMKM yang Mendapa Akses Keuangan Daerah						100%	100%
	Hasil : Terpenuhinya BUMDes dan UMKM yang Mendapa Akses Keuangan Daerah						100%	100%
JUMLAH			Rp 192,500,000	Rp 188,567,148	Rp 3,932,852	97.96		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4.01.4.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	18,695,066,200	18,370,300,680	324,765,520	98.26		
4 01 4 01 01 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1,970,230,000	1,949,451,000	20,779,000	98.95		
4 01 4 01 01 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	1,871,830,000	1,851,108,000	20,722,000	98.89		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Honorarium dan Tunjangan						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhinyan Honorarium dan Tunjangan						100.00	100.00
4 01 4 01 01 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	98,400,000	98,343,000	57,000	99.94		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhinya Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan						100.00	100.00
4 01 4 01 01 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	2,954,905,400	2,946,380,215	8,525,185	99.71		
4 01 4 01 01 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	520,726,000	518,190,300	2,535,700	99.51		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor						100.00	100.00
4 01 4 01 01 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	832,250,000	826,858,900	5,391,100	99.35		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kantor						100.00	100.00

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 01 4 01 01 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	539,309,400	538,812,675	496,725	99.91		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Barang Cetakan dan Penggandaan						100.00	100.00
4 01 4 01 01 06 05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	1,062,620,000	1,062,518,340	101,660	99.99		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Rapat- Rapat koordinasi Yang Baik Untuk Penyelenggaraan						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Rapat- Rapat koordinasi Yang Baik Untuk Penyelenggaraan						100.00	100.00
4 01 4 01 01 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1,364,894,000	1,361,555,500	3,338,500	99.76		
4 01 4 01 01 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	1,364,894,000	1,361,555,500	3,338,500	99.76		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor KDH / WKDH						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor KDH / WKDH						100.00	100.00
4 01 4 01 01 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	5,765,328,000	5,629,423,697	135,904,303	97.64		
4 01 4 01 01 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	90,000,000	89,980,000	20,000	99.98		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Jasa Surat Menyurat						100.00	100.00
4 01 4 01 01 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Masukan : Jumlah Dana		1,330,000,000	1,226,785,697	103,214,303	92.24		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 bulan	12 bulan

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil : Terpenuhiya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.00	100.00
4 01 4 01 01 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Masukan : Jumlah Dana		258,098,000	257,945,000	153,000	99.94		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.00	100.00
4 01 4 01 01 08 03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Masukan : Jumlah Dana		4,087,230,000	4,054,713,000	32,517,000	99.20		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.00	100.00
4 01 4 01 01 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	1,207,000,000	1,205,663,000	1,337,000	99.89		
4 01 4 01 01 09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Masukan : Jumlah Dana		600,000,000	599,199,500	800,500	99.87		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor						100.00	100.00
4 01 4 01 01 09 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya							
	Masukan : Jumlah Dana		607,000,000	606,463,500	536,500	99.91		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor						100.00	100.00
4 01 4 01 01 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1,127,074,000	1,018,416,200	108,657,800	90.36		
4 01 4 01 01 11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana		150,000,000	42,561,100	107,438,900	28.37		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran : Tersedianya Kesehatan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Tugas						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Kesehatan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Tugas						100.00	100.00
4 01 4 01 01 11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana		977,074,000	975,855,100	1,218,900	99.88		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala						100.00	100.00
4 01 4 01 01 12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		4,305,634,800	4,259,411,068	46,223,732	98.93		
4 01 4 01 01 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana		909,916,800	891,272,000	18,644,800	97.95		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						100.00	100.00
4 01 4 01 01 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana		713,106,500	686,591,200	26,515,300	96.28		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						100.00	100.00
4 01 4 01 01 12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana		2,682,611,500	2,681,547,868	1,063,632	99.96		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						12 bulan	12 bulan
	Hasil : Terpenuhiya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						100.00	100.00

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PERLENGKAPAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4.01.0.00.0.00.0.1.0012	BAGIAN PERLENGKAPAN	Rp.	11,769,868,593	11,008,467,610.0	761,400,983.0	93.53	100.00	85.67
0.167361111111111111	URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp.	11,769,868,593	11,008,467,610.0	761,400,983.0	93.53	100.00	85.67
I	BELANJA LANGSUNG	Rp.	11,769,868,593	11,008,467,610	761,400,983	93.53	100.00	
4 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	337,017,300	336,921,214	96,086	99.97	100.00	100
4 01 01 2 03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	152,209,000	152,119,914	89,086	99.94		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersusunnya kebutuhan 2022						4 dok	4 dok
	Hasil : tersusunnya RKB dan RKPBU 2022						100.00	100.00
4 01 01 2 03 02	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	184,808,300	184,801,300	7,000	100.00		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Terdistribusi dan tersimpannya barang milik daerah						1562 unit/stell	438 unit/stell
	Hasil : Terdistribusi dan tersimpannya barang milik daerah secara baik						100.00	28.00
4 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	716,590,000	27,200,000	689,390,000	3.80	100.00	-
4 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	716,590,000	27,200,000	689,390,000	3.80		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai Setdakab						1124 stell	0 stell
	Hasil : Tertibnya pemakaian pakaian dinas dilingkungan Setdakab						100.00	100
4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	5,579,792,700	5,540,404,700	39,388,000	99.29	100.00	100
4 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100	100
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	1,390,810,900	1,383,310,900.0	7,500,000.0	99.46		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional						12 unit	12 unit
	Hasil : Terlaksananya kegiatan dinas secara efektif dan efisien						100.00	100.00
4 01 01 2 07 05	Pengadaan Meubel							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	2,546,810,000	2,520,272,000	26,538,000	98.96		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya meubeler						329 unit	329 unit
	Hasil : meningkatnya kinerja aparatur						100.00	100.00
4 01 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	1,642,171,800	1,636,821,800	5,350,000	99.67		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Peralatan gedung kantor						95 unit	95 unit
	Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur						100.00	100.00
4 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	5,136,468,593	5,103,941,696	32,526,897	99.37	100.00	100
4 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	5,136,468,593	5,103,941,696	32,526,897	99.37		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya BBM dan pelumas, accu, ban, servis & suku cadang						171 unit	171 unit
	Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2						100.00	100.00

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	BELANJA LANGSUNG							
	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	Rp.	192,500,000	192,500,000	-	100.00		
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Rp.	192,500,000	192,500,000	-	100.00		
	BELANJA LANGSUNG	Rp.	192,500,000	192,500,000	-	100.00		
24	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	192,500,000	192,500,000	-	100.00		
24 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan		98,990,000	98,990,000	-	100.00		
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							
	Hasil : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan						12 Dokumen	12 Dokumen
24 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		50,000,000	50,000,000	-	100.00		
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah Koordinasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
	Hasil : Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						12 Dokumen	12 Dokumen
24 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		43,510,000	43,510,000	-	100.00		
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah Koordinasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							
	Hasil : Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						12 Dokumen	12 Dokumen

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH		52,020,118,978	46,719,791,616	5,300,327,362	89.81		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		34,120,107,878	32,464,098,518	1,656,009,360	95.15		
4 02 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		176,078,400	129,522,000	46,556,400	73.56		
4 02 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		49,875,000	39,125,000	10,750,000	78.45		
4 02 01 2 01 01 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor		6,390,000	6,140,000	250,000	96.09		
4 02 01 2 01 01 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,675,000	4,565,000	110,000	97.65		
4 02 01 2 01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		3,500,000	3,500,000	-	100.00		
4 02 01 2 01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		7,500,000	7,500,000	-	100.00		
4 02 01 2 01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		27,810,000	17,420,000	10,390,000	62.64		
	Masukan 49,875,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD						2	2
	Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD							
4 02 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		126,203,400	90,397,000	34,710,000	71.63		
4 02 01 2 01 06 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor		15,460,400	14,364,000		92.91		
4 02 01 2 01 06 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5,000,000	4,500,000	500,000	90.00		
4 02 01 2 01 06 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,155,000	1,155,000	-	100.00		
4 02 01 2 01 06 5 1 02 02 12	Belanja Bimbingan Teknis		25,000,000	25,000,000	-	100.00		
4 02 01 2 01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		79,588,000	45,378,000	34,210,000	-		
	Masukan 126,203,400							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersedianya Laporan Triwulan						4 Laporan	4 Laporan

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil Tersusunnya Laporan Triwulan							
4 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		3,103,499,278	2,878,505,509	224,993,769	92.75		
4 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,511,994,678	2,339,016,909	172,977,769	93.11		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok PNS		1,146,830,120	1,143,801,520	3,028,600	99.74		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		114,511,904	114,481,946	29,958	99.97		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		97,650,000	97,650,000	-	100.00		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 01 04	Belanja Fungsional PNS		79,380,000	79,380,000	-	100.00		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 01 05	Belanja Fungsional Umum PNS		13,705,000	13,520,000	185,000	98.65		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras PNS		64,743,480	64,671,060	72,420	99.89		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 01 07	Belanja PPh/ Tunjangan Khusus PNS		2,239,238	2,239,238	-	100.00		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji PNS		16,586	16,445	141	99.15		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 02 01	Belanja Tambahan Penghasilan Beban Kerja PNS		557,416,850	476,748,700	80,668,150	85.53		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 02 03	Belanja Tambahan Penghasilan Kondisi Kerja PNS		35,736,750	27,352,750	8,384,000	76.54		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 02 04	Belanja Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi PNS		73,184,450	57,911,550	15,272,900	79.13		
4 02 01 2 02 01 5 1 01 02 05	Belanja Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja PNS		326,580,300	261,243,700	65,336,600	79.99		
	Masukan 2,511,994,678							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN						336 Org	336 Org
	Hasil Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN							
4 02 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		582,919,600	531,038,600	51,881,000	91.10		
4 02 01 2 02 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		231,300,000	231,300,000	-	100.00		
4 02 01 2 02 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		60,660,000	38,940,000	21,720,000	64.19		
4 02 01 2 02 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		77,111,600	77,100,600	11,000	99.99		
4 02 01 2 02 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		36,148,000	35,848,000	300,000	99.17		
4 02 01 2 02 03 5 1 02 02 01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana		100,000,000	93,500,000	6,500,000	93.50		
4 02 01 2 02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		14,700,000	3,500,000	11,200,000	23.81		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 01 2 02 03 5 1 02 04 01	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		63,000,000	50,850,000	12,150,000	-		
	Masukan 582,919,600							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Terbayarnya Pengelola Administrasi Keuangan						116 Org	116 Org
	Hasil Terbayarnya Pengelola Administrasi Keuangan							
4 02 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6,330,000	6,230,000	100,000	98.42		
4 02 01 2 02 05 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		830,000	830,000	-	100.00		
4 02 01 2 02 05 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1,000,000	1,000,000	-	100.00		
4 02 01 2 02 05 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4,500,000	4,400,000	100,000	97.78		
	Masukan 6,330,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersedianya Laporan Prognosis						1 Laporan	1 Laporan
	Hasil Tersusunnya Laporan Prognosis							
4 02 01 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2,255,000	2,220,000	35,000	98.45		
4 02 01 2 02 08 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		830,000	830,000	-	100.00		
4 02 01 2 02 08 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		290,000	290,000	-	100.00		
4 02 01 2 02 08 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,135,000	1,100,000	35,000	96.92		
	Masukan 2,255,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersedianya Laporan Akhir Tahun						4	4
	Hasil Tersusunnya Laporan Akhir Tahun							
4 02 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		130,150,000	128,360,000	1,790,000	98.62		
4 02 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		130,150,000	128,360,000	1,790,000	98.62		
4 02 01 2 05 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)		7,750,000	7,675,000	75,000	99.03		
4 02 01 2 05 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		59,050,000	58,445,000	605,000	98.98		
4 02 01 2 05 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)		24,800,000	24,650,000	150,000	99.40		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 01 2 05 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Olahraga		38,550,000	37,590,000	960,000	97.51		
	Masukan 130,150,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersediannya Pakaian dan Atribut ASN sesuai dengan Peraturan						645 Stel	225 Stel
	Hasil Presentase Pengadaan Pakaian Dinas ASN							
4 02 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3,888,754,000	3,067,679,610	821,074,390	78.89		
4 02 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		38,220,000	37,365,000	855,000	97.76		
4 02 01 2 06 01 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		32,220,000	31,865,000	355,000	98.90		
4 02 01 2 06 01 5 1 02 03 02	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik		6,000,000	5,500,000	500,000	91.67		
	Masukan 38,220,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Berfungsinya Penerangan Gedung Kantor						12 Bulan	12 Bulan
	Hasil Berfungsinya Penerangan Gedung Kantor							
4 02 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		44,351,000	44,302,300	48,700	99.89		
4 02 01 2 06 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		32,471,000	32,422,300	48,700	99.85		
4 02 01 2 06 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		11,880,000	11,880,000	-	100.00		
	Masukan 44,351,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersediannya ATK dan Bahan Komputer						35	35
	Hasil Tersediannya ATK dan Bahan Komputer							
4 02 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		142,217,000	133,817,000	8,400,000	94.09		
4 02 01 2 06 03 5 1 02 01 01	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas		20,592,000	20,592,000	-	100.00		
4 02 01 2 06 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		9,982,700	9,982,700	-	100.00		
4 02 01 2 06 03 5 1 02 02 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		57,642,300	57,642,300	-	100.00		
4 02 01 2 06 03 5 1 02 03 02	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		8,000,000	-	8,000,000.00	-		
4 02 01 2 06 03 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		31,000,000	30,700,000				

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 01 2 06 03 5 2 02 05 02	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		15,000,000	14,900,000	100,000.00	99.33		
	Masukan 142,217,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga						35	35
	Hasil Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga							
4 02 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		106,000,000	102,556,500	3,443,500	96.75		
4 02 01 2 06 04 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		106,000,000	102,556,500	3,443,500	96.75		
	Masukan 106,000,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Terpuhinya kebutuhan Logistik Kantor						1489	1489
	Hasil Terpuhinya kebutuhan Logistik Kantor							
4 02 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		42,232,000	41,613,200	618,800	98.53		
4 02 01 2 06 05 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		30,232,000	29,613,200	618,800	97.95		
4 02 01 2 06 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		12,000,000	12,000,000	-	100.00		
	Masukan 42,232,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersedianya Barang Kebutuhan Cetak						1363	1363
	Hasil Tersedianya Barang Kebutuhan Cetak							
4 02 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1,310,136,000	1,309,800,000	336,000	99.97		
4 02 01 2 06 06 5 1 02 02 01	Belanja Langganan Jurnal/SuratKabar/majalah		1,310,136,000	1,309,800,000	336,000	99.97		
	Masukan 1,310,136,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersedia Bahan Bacaan						35	35
	Hasil Tersedia Bahan Bacaan							
4 02 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		96,000,000	94,325,000	1,675,000	98.26		
4 02 01 2 06 08 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		96,000,000	94,325,000	1,675,000	98.26		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan 96,000,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Terpenuhiya Konsumsi Kunjungan Tamu						115	115
	Hasil Terpenuhiya Konsumsi Kunjungan Tamu							
4 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2,109,598,000	1,303,900,610	805,697,390	61.81		
4 02 01 2 06 09 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		83,509,200	83,263,000	246,200	99.71		
4 02 01 2 06 09 5 1 02 01 01	Belanja Bahan yang Berkaitan dengan Komputer		14,592,800	14,552,000	40,800	99.72		
4 02 01 2 06 09 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7,560,000	7,560,000	-	100.00		
4 02 01 2 06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1,984,136,000	1,191,490,610	792,645,390	60.05		
4 02 01 2 06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		19,800,000	7,035,000	12,765,000	35.53		
	Masukan 2,109,598,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Pendampingan DPRD						60	60
	Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Pendampingan DPRD							
4 02 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		152,000,000	137,695,000	14,305,000	90.59		
4 02 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		152,000,000	137,695,000	14,305,000	90.59		
4 02 01 2 07 06 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		152,000,000	137,695,000	14,305,000	90.59		
	Masukan 152,000,000.00							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Bagi Pegawai						35	35
	Hasil Terfasilitasnya Kebutuhan Kesekretariatan							
4 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,972,310,000	1,928,911,628	43,398,372	97.80		
4 02 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7,200,000	6,800,000	400,000	94.44		
4 02 01 2 08 01 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		7,200,000	6,800,000	400,000	94.44		
	Masukan 7,200,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran Tersedianya Kebutuhan Materai Kantor						1100	1100
	Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Materai Kantor							
4 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		285,960,000	252,111,628	33,848,372	88.16		
4 02 01 2 08 02 5 1 02 01 01	Belanja Tagihan Telepon		6,960,000	3,221,950	3,738,050	46.29		
4 02 01 2 08 02 5 1 02 01 01	Belanja Tagihan Listrik		234,000,000	210,879,543	23,120,457	90.12		
4 02 01 2 08 02 5 1 02 01 01	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		45,000,000	38,010,135	6,989,865	84.47		
	Masukan 285,960,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersedianya Komunikasi, Listrik, dan Air						12 Bulan	12 Bulan
	Hasil Tersedianya Komunikasi, Listrik, dan Air							
4 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,679,150,000	1,670,000,000	9,150,000	99.46		
4 02 01 2 08 04 5 1 02 01 01	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1,209,800,000	1,209,800,000	-	100.00		
4 02 01 2 08 04 5 1 02 01 01	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		33,600,000	33,600,000	-	100.00		
4 02 01 2 08 04 5 1 02 01 01	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		189,750,000	189,000,000	750,000	99.60		
4 02 01 2 08 04 5 1 02 01 01	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		192,000,000	192,000,000				
4 02 01 2 08 04 5 1 02 01 01	Belanja Jasa Tenaga Supir		50,400,000	42,000,000	8,400,000	83.33		
4 02 01 2 08 04 5 1 02 01 01	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik		3,600,000	3,600,000	-	100.00		
	Masukan 1,679,150,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Terbayarnya Honorarium Pelayanan Umum						1164	1164
	Hasil Terbayarnya Honorarium Pelayanan Umum							
4 02 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,121,650,000	947,464,892	174,185,108	84.47		
4 02 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		731,650,000	594,764,892	136,885,108	81.29		
4 02 01 2 09 01 5 1 02 01 01	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		18,000,000	-	18,000,000	-		
4 02 01 2 09 01 5 1 02 02 02	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah		50,000,000	49,972,720	27,280	99.95		
4 02 01 2 09 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		130,500,000	129,337,200				

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 01 2 09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		533,150,000	415,454,972	117,695,028	77.92		
	Masukan 731,650,000.00							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional						35	35
	Hasil Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional							
4 02 01 2 09 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		175,000,000	143,200,000	31,800,000	81.83		
4 02 01 2 09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)		15,000,000	13,750,000	1,250,000	91.67		
4 02 01 2 09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		66,500,000	56,500,000	10,000,000	84.96		
4 02 01 2 09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		17,000,000	17,000,000	-	100.00		
4 02 01 2 09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran		20,000,000	-	20,000,000	-		
4 02 01 2 09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		30,000,000	30,000,000	-	100.00		
4 02 01 2 09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		26,500,000	25,950,000	550,000	97.92		
	Masukan 175,000,000.00							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Terpeliharanya Peralatan dan Mesin kantor Lainnya						35	35
	Hasil Terpeliharanya Peralatan dan Mesin kantor Lainnya							
4 02 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		215,000,000	209,500,000	5,500,000	97.44		
4 02 01 2 09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan GedungBangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		215,000,000	209,500,000	5,500,000	97.44		
	Masukan -							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor						35	35
	Hasil Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor							
4 02 01 2 15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		21,494,034,000	21,200,658,679	293,375,321	98.64		
4 02 01 2 15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		20,958,074,000	20,691,599,179	266,474,821	98.73		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 01	Belanja Uang Representasi DPRD		1,004,010,000	1,004,010,000	-	100.00		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD		140,561,400	120,164,100	20,397,300	85.49		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 03	Belanja Tunjangan Beras DPRD		145,800,000	139,263,660	6,536,340	95.52		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 04	Belanja Uang Paket DPRD		86,058,000	86,058,000	-	100.00		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD		1,455,814,500	1,455,814,500	-	100.00		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD		180,507,600	134,101,800	46,405,800	74.29		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD		13,702,500	-	13,702,500	-		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 08	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD		3,402,000,000	3,402,000,000	-	100.00		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 09	Belanja Tunjangan Reses DPRD		850,500,000	850,500,000	-	100.00		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		152,000,000	88,729,995	63,270,005	58.37		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 12	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD		192,000,000	88,575,456	103,424,544	46.13		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD		9,000,000	1,893,376	7,106,624	21.04		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 12	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi DPRD		12,000,000	6,368,292	5,631,708	53.07		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 12	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD		5,658,000,000	5,658,000,000	-	100.00		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 04 13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD		7,515,000,000	7,515,000,000	-	100.00		
4 02 01 2 15 01 5 1 01 06 01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD		141,120,000	141,120,000	-	100.00		
	Masukan 20,958,074,000.00							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Pembayaran dan Tunjangan Anggota DPRD						630 Org	630 Org
	Hasil Pembayaran dan Tunjangan Anggota DPRD							
4 02 01 2 15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		468,460,000	454,725,000	13,735,000	97.07		
4 02 01 2 15 02 5 1 02 01 01	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2,760,000	-	2,760,000	-		
4 02 01 2 15 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlangkapan Dinas		19,200,000	12,700,000	6,500,000	66.15		
4 02 01 2 15 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH		57,000,000	56,740,000	260,000	99.54		
4 02 01 2 15 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)		3,500,000	3,480,000	20,000	-		
4 02 01 2 15 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		126,000,000	124,530,000	1,470,000	98.83		
4 02 01 2 15 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		52,500,000	51,240,000	1,260,000	97.60		
4 02 01 2 15 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)		105,000,000	103,740,000	1,260,000	98.80		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 01 2 15 02 5 1 02 01 01	Belanja Pakaian Adat Daerah		102,500,000	102,295,000	205,000	99.80		
	Masukan 468,460,000.00							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tesedinya Pakaian Dinas Anggota DPRD						45 Stel	45 Stel
	Hasil Tesedinya Pakaian Dinas Anggota DPRD							
4 02 01 2 15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		67,500,000	54,334,500	13,165,500	80.50		
4 02 01 2 15 03 5 1 02 02 01	Belanja Medical Check Up		67,500,000	54,334,500	13,165,500	80.50		
	Masukan 67,500,000.00							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Medical Check Up Anggota DPRD						45 Org	0
	Hasil Medical Check Up Anggota DPRD							
4 02 01 2 16	Layanan Administrasi DPRD		2,081,632,200	2,045,301,200	36,331,000	98.25		
4 02 01 2 16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		902,632,200	888,161,200	14,471,000	98.40		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		108,904,200	108,904,200	-	100.00		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		72,074,000	72,073,000	1,000	100.00		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		20,940,000	20,865,000	75,000	99.64		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 01 01	Belanja Natura dan Pakan-Natura		14,214,000	14,214,000				
4 02 01 2 16 03 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		585,250,000	585,105,000	145,000	99.98		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		58,950,000	58,900,000	50,000	99.92		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli		4,800,000	3,100,000	1,700,000	64.58		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		9,000,000	9,000,000	-	100.00		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		10,000,000	5,000,000	5,000,000	50.00		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		9,000,000	6,000,000	3,000,000	66.67		
4 02 01 2 16 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya		9,500,000	5,000,000	4,500,000	52.63		
	Masukan 902,632,200							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran Terfasilitasinya Rapat dan Konsultasi DPRD						265 x rapat	265 x rapat
	Hasil Terfasilitasinya Rapat dan Konsultasi DPRD							
4 02 01 2 16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		1,179,000,000	1,157,140,000	21,860,000	98.15		
4 02 01 2 16 04 5 1 02 01 01	Belanja Natura dan Pakan-Natura		600,000,000	592,140,000	7,860,000	98.69		
4 02 01 2 16 04 5 1 02 02 01	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya		579,000,000	565,000,000	14,000,000	97.58		
	Masukan 1,179,000,000							
	Lokasi Desa Waylayap, Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran Tersedianya Rumah Jabatan dan Kebutuhan Rumah Jabatan				4 Rumah Pimpinan, makan minuman 3 l			
	Hasil Tersedianya Rumah Jabatan dan Kebutuhan Rumah Jabatan							
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNSI DPRD		17,900,011,100	14,255,693,098	3,644,318,002	79.64		
4 02 02 2 01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		1,872,332,300	1,863,545,100	8,787,200	99.53		
4 02 02 2 01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1,330,416,800	1,323,020,000	7,396,800	99.44		
4 02 02 2 01 01 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9,807,800	9,807,800	-	100.00		
4 02 02 2 01 01 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		3,095,000	3,095,000	-	100.00		
4 02 02 2 01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli		600,000,000	593,000,000	7,000,000	98.83		
4 02 02 2 01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		717,514,000	717,117,200	396,800	99.94		
	Masukan 1,330,416,800							
	Lokasi Kab. Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Penyusunan Pembentukan Perda Inisiatif						17 Perda	12 Perda
	Hasil Presentase Perda dan Perda Prakarsa yang Disahkan							
4 02 02 2 01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		541,915,500	540,525,100	1,390,400	99.74		
4 02 02 2 01 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		14,970,100	14,070,100	900,000	93.99		
4 02 02 2 01 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5,605,000	5,605,000	-	100.00		
4 02 02 2 01 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		2,640,400	2,250,000	390,400	85.21		
4 02 02 2 01 02 5 1 02 01 01	Belanja Natura dan Pakan-Natura		27,600,000	27,500,000				
4 02 02 2 01 02 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2,100,000	2,100,000	-	100.00		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 02 2 01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli		480,000,000	480,000,000	-	100.00		
4 02 02 2 01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		9,000,000	9,000,000	-	100.00		
	Masukan 541,915,500							
	Lokasi Kab. Pesawaran, Way Lima, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						4 Perda	4 Perda
	Hasil Presentase Perda dan Perda Prakarsa yang Disahkan							
4 02 02 2 02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		221,065,000	214,145,000	6,920,000	96.87		
4 02 02 2 02 01	Pembahasan KUA dan PPAS		20,000,000	20,000,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,450,000	1,450,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		600,000	600,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		17,600,000	17,600,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 01 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		350,000	350,000	-	100.00		
	Masukan 20,000,000							
	Lokasi Kab. Pesawaran, Way Lima, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Pembahasan KUA-PPAS						1 Perda	1 Perda
	Hasil Pembahasan dan Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan yang Tepat Waktu							
4 02 02 2 02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		20,000,000	18,625,000	1,375,000	93.13		
4 02 02 2 02 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,600,000	1,600,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		250,000	250,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 02 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		18,150,000	16,775,000	1,375,000	92.42		
	Masukan 20,000,000							
	Lokasi Kab. Pesawaran, Way Lima, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Pembahasan KUA- Perubahan PPAS						1 Perda	1 Perda
	Hasil Pembahasan dan Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan yang Tepat Waktu							
4 02 02 2 02 03	Pembahasan APBD		126,065,000	125,070,000	995,000	99.21		
4 02 02 2 02 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2,830,000	2,830,000	-	100.00		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 02 2 02 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		500,000	500,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 03 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		122,735,000	121,740,000	995,000	99.19		
	Masukan 126,065,000							
	Lokasi Kab. Pesawaran, Way Lima, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Pembahasan APBD						1 Perda	1 Perda
	Hasil Pembahasan dan Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan yang Tepat Waktu							
4 02 02 2 02 04	Pembahasan APBD Perubahan		35,000,000	30,450,000	4,550,000	87.00		
4 02 02 2 02 04 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		875,000	875,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 04 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		500,000	475,000	25,000	95.00		
4 02 02 2 02 04 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		33,625,000	29,100,000	4,525,000	86.54		
	Masukan 35,000,000							
	Lokasi Kab. Pesawaran, Way Lima, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Pembahasan Perubahan APBD						1 Perda	1 Perda
	Hasil Pembahasan dan Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan yang Tepat Waktu							
4 02 02 2 02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		20,000,000	20,000,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 06 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,550,000	1,550,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 06 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		500,000	500,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 06 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		17,600,000	17,600,000	-	100.00		
4 02 02 2 02 06 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		350,000	350,000	-	100.00		
	Masukan 20,000,000							
	Lokasi Kab. Pesawaran, Way Lima, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						1 Perda	1 Perda
	Hasil Pembahasan dan Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan yang Tepat Waktu							
4 02 02 2 03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		24,620,300	24,620,300	-	100.00		
4 02 02 2 03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		24,620,300	24,620,300	-	100.00		
4 02 02 2 03 08 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1,120,300	1,120,300	-	100.00		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 02 2 03 08 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		500,000	500,000	-	100.00		
4 02 02 2 03 08 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		14,175,000	14,175,000	-	-		
4 02 02 2 03 08 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		8,825,000	8,825,000	-	100.00		
	Masukan 24,620,300							
	Lokasi Kab. Pesawaran, Way Lima, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah						1 Perda	1 Perda
	Hasil Presentase Pembahasan dan Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan yang Tepat Waktu							
4 02 02 2 04	Peningkatan Kapasitas DPRD		2,938,507,000	2,899,401,828	39,105,172	98.67		
4 02 02 2 04 02	Orientasi DPRD		2,204,447,000	2,169,921,828	34,525,172	98.43	180 org	180 org
4 02 02 2 04 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7,891,400	7,891,400	-	100.00		
4 02 02 2 04 02 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		3,052,000	3,052,000	-	100.00		
4 02 02 2 04 02 5 1 02 01 01	Belanja Bahan yang Berkaitan dengan Komputer		2,272,600	2,272,600	-	100.00		
4 02 02 2 04 02 5 1 02 01 01	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1,104,000	1,080,000				
4 02 02 2 04 02 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		19,200,000	19,200,000	-	100.00		
4 02 02 2 04 02 5 1 02 02 01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara		15,600,000	14,300,000	1,300,000	91.67		
4 02 02 2 04 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli		300,000	300,000	-	100.00		
4 02 02 2 04 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		10,000,000	10,000,000	-	100.00		
4 02 02 2 04 02 5 1 02 02 12	Belanja Bimbingan Teknis		1,355,000,000	1,353,500,000	1,500,000	99.89		
4 02 02 2 04 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		790,027,000	758,325,828	31,701,172	95.99		
	Masukan 2,204,447,000.00							
	Lokasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Orientasi dan Bimtek Anggota DPRD						180 org	180 org
	Hasil Presentase Anggota DPRD yang Mengikuti Bimbingan Teknis							
4 02 02 2 04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		734,060,000	729,480,000	4,580,000	99.38		
4 02 02 2 04 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan ATK		15,450,000	15,450,000	-	100.00		
4 02 02 2 04 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		119,450,000	117,470,000	1,980,000	98.34		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 02 02 2 04 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		2,400,000	2,400,000	-	100.00		
4 02 02 2 04 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		7,200,000	7,200,000	-	100.00		
4 02 02 2 04 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		3,960,000	3,960,000	-	100.00		
4 02 02 2 04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		2,550,000	-	2,550,000	-		
4 02 02 2 04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		5,550,000	5,500,000	50,000	1.00		
4 02 02 2 04 03 5 1 02 02 01	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		577,500,000	577,500,000	-	100.00		
	Masukan 2,204,447,000.00							
	Lokasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
	Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan						4039	4039
	Hasil Tersedianya Bahan Bacaan							
4 02 02 2 05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		3,140,935,000	3,025,235,000	115,700,000	96.32		
4 02 02 2 05 01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		1,491,000,000	1,375,300,000	115,700,000	92.24		
4 02 02 2 05 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,491,000,000	1,375,300,000	115,700,000	92.24		
	Masukan 1,491,000,000							
	Lokasi Kab.Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Dalam Daerah Anggota DPRD						540 org	540 org
	Hasil Presentase Penyerapan dan Penghimpuna Aspirasi Masyarakat							
4 02 02 2 05 03	Pelaksanaan Reses		1,649,935,000	1,649,935,000	-	100.00		
4 02 02 2 05 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		17,182,600	17,182,600	-	100.00		
4 02 02 2 05 03 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		61,912,500	61,912,500	-	100.00		
4 02 02 2 05 03 5 1 02 01 01	Belanja Bahan yang Berkaitan dengan Komputer		4,839,900	4,839,900	-	100.00		
4 02 02 2 05 03 5 1 02 01 01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,485,000,000	1,485,000,000	-	100.00		
4 02 02 2 05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		81,000,000	81,000,000	-	100.00		
	Masukan 1,649,935,000							
	Lokasi Kab.Pesawaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasi Kegiatan Reses						3 x Pertemuan	3 x Pertemuan

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
4 02 02 2 08	Fasilitasi Tugas DPRD		9,702,551,500	6,228,745,870	3,473,805,630	64.20		
4 02 02 2 08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		9,702,551,500	6,228,745,870	3,473,805,630	64.20		
4 02 02 2 08 01 5 1 02 01 01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		8,850,500	8,850,000	500	99.99		
4 02 02 2 08 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		9,615,401,000	6,169,365,870	3,446,035,130	64.16		
4 02 02 2 08 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		78,300,000	50,530,000	27,770,000	64.53		
	Masukan 9,702,551,500							
	Lokasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
	Keluaran Terfasilitasinya Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi serta Kerjasama antar Anggota DPRD Lintas						540 org	540 org
	Hasil Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Eksternal Anggota DPRD							

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp.	3,197,226,895	2,902,945,235	294,281,660	90.80	100.00	100.00
1.05	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.	3,197,226,895	2,902,945,235	294,281,660	90.80	100.00	100.00
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2,852,876,895	2,643,554,035	209,322,860	92.66	100.00	100.00
1.05.01.2.02	1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Masukan :	Rp.	2,220,411,895	2,045,387,359	175,024,536	92.12	100.00	100.00
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Prosentase Layanan Administrasi Keuangan							
	Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang ada							
	Hasil : Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan							
	Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang ada							
1.05.01.2.06	2. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Masukan :	Rp.	34,350,000	29,100,000	5,250,000	84.72	100.00	100.00
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Prosentase Layanan Administrasi Umum							
	Perangkat Daerah tepat Waktu							
	Hasil : Meningkatnya Layanan Administrasi Umum							
	Perangkat Daerah tepat Waktu							
1.05.01.2.08	3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan							
	Pemerintahan Daerah							
	Masukan :	Rp.	239,750,000	239,413,576	336,424	99.86	100.00	100.00
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang							
	Urusan Pemerintahan Daerah							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil : Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang							
	Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.09	4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang							
	Urusan Pemerintahan Daerah							
	Masukan :	Rp.	358,365,000	329,653,100	28,711,900	91.99	100.00	100.00
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang							
	Urusan Pemerintahan Daerah							
	Hasil : Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang							
	Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Rp.	344,350,000	259,391,200	84,958,800	75.33	100.00	100.00
1.05.03.2.01	1. Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kot							
	Masukan :	Rp.	10,000,000	8,800,000	1,200,000	88.00	100.00	100.00
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Prosentase Pelayanan Informasi Rawan							
	Bencana Kabupaten/Kota							
	Hasil : Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan							
	Bencana Kabupaten/Kota							
1.05.03.2.02	2. Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
	Terhadap Bencana							
	Masukan :	Rp.	194,350,000	126,341,200	68,008,800	65.01	100.00	100.00
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Prosentase Kesiapsiagaan terhadap							
	Penanggulangan Bencana							
	Hasil : Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap							
	Penanggulangan Bencana							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
1.05.03.2.03	3. Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi							
	Korban Bencana							
	Masukan :	Rp.	140,000,000	124,250,000	15,750,000	88.75	100.00	100.00
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Prosentase Penanganan Penyelamatan dan							
	Evakuasi Korban Bencana							
	Hasil : Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi							
	Korban Bencana							

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NEGERI KATON

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		1,779,593,187.00	1,693,748,863.00	85,844,324.00	95.18%	100%	95.18%
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) tersedianya dokumen perencanaan perangkat Daerah		1 dokumen	1 dokumen				
	Hasil (Outcome) Peningkatan Laporan dokumen perencanaan							
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,344,803,187.00	1,262,323,863.00	82,479,324.00	93.87%	100%	93.87%
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		1,307,723,187.00	1,225,243,863.00	82,479,324.00	93.69%	100%	93.69%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		14 orang/bulan	14 orang/bulan				
	Hasil (Outcome) Peningkatan capaian kinerja ASN kec. Negeri Katon							
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		37,080,000.00	37,080,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		2 dokumen	2 dokumen				
	Hasil (Outcome) Peningkatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD							
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		81,220,000.00	77,935,000.00	3,285,000.00	95.96%	100%	95.96%
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	paket						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		11,323,000.00	11,323,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Negeri Katon							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (Output) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan Negeri Katon		1 paket	1 paket				
	Hasil (Outcome) Peningkatan persediaan peralatan dan perlengkapan kantor kec. Negeri Katon							
	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga	paket						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		-	0.00	-	0.00%	100%	0.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga							
	Hasil (Outcome) Peningkatan persediaan peralatan rumah tangga di kantor kecamatan Negeri Katon							
	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	paket						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		20,855,000.00	20,855,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) tersedianya bahan logistik kantor		1 paket	1 paket				
	Hasil (Outcome) peningkatan bahan logistik kantor di kecamatan Negeri Katon							
	Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	paket						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		3,002,000.00	3,002,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12 dokumen	12 dokumen				
	Hasil (Outcome) Peningkatan tersedianya barang cetak kantor kec. Negeri Katon							
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		4,440,000.00	4,440,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 laporan	1 laporan				
	Hasil (Outcome) Peningkatan persediaan bahan bacaan dan peraturan per undang -undangan di kantor kec. Negeri Katon							
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		41,600,000.00	38,315,000.00	3,285,000.00	92.10%	100%	92.10%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 kali	70 kali				

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (Outcome) Peningkatan Capaian penyelenggaraan rapat koordinasi di Kec. Negeri Katon							
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		230,000,000.00	230,000,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat	laporan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		-	-	-	#DIV/0!	100%	#DIV/0!
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		75 dokumen	75 Dokumen				
	Hasil (Outcome) Peningkatan tersedianya jasa surat menyurat							
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	laporan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 web, 1 item	1 Web, 1 item				
	Hasil (Outcome) Peningkatan teredianya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik							
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		221,000,000.00	221,000,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		17 orang	17 orang				
	Hasil (Outcome) Peningkatan Capaian kinerja kec. Negeri Katon dengan penyediaan jasa pelayanan umum kantor							
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		121,070,000.00	120,990,000.00		99.93%	100%	99.93%
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	unit						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		121,070,000.00	120,990,000.00	80,000.00	99.93%	100%	99.93%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		3 item	3 item				
	Hasil (Outcome) Peningkatan keterawatan kendaraan dinas operasional atau lapasnagn dengan Penyediaan jasa pemeliharaan,							
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		-	-	-	0.00%	100%	0.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Negeri Katon							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (Output) Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		4 unit	4 unit				
	Hasil (Outcome) Peningkatan keterawatan peralatan dan mesin lainnya							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15,100,000.00	15,100,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		12,200,000.00	2,900,000.00		23.77%	100%	23.77%
	Sub Kegiatan : Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		2,900,000.00	2,900,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Negeri Katon							
	Keluaran (Output) Terlaksananya Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan		8 item	8 item				
	Hasil (Outcome) Peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi							
	pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		17,220,000.00	17,216,100.00	3,900.00	99.98%	100%	99.98%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		17,220,000.00	17,216,100.00	3,900.00	99.98%	100%	99.98%
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (Outcome) Meningkatnya pelayanan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha							
	Hasil (Outcome) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Dengan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan							
	JUMLAH		1,794,693,187.00	1,708,848,863.00	85,844,324.00	95.22%	100%	95.22%

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TEGINENENG

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		1,781,398,355.00	1,681,272,355.00	100,126,000.00	94.38%	100%	94.38%
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		7,660,800.00	7,660,800.00	-	100.00%	100%	100.00%
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		7,660,800.00	7,660,800.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) tersedianya dokumen perencanaan perangkat Daerah		1 dokumen	1 dokumen				
	Hasil (Outcome) Peningkatan Laporan dokumen perencanaan							
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,297,290,555.00	1,197,681,255.00	99,609,300.00	92.32%	100%	92.32%
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		1,245,645,955.00	1,146,042,155.00	99,603,800.00	92.00%	100%	92.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		14 orang/bulan	14 orang/bulan				
	Hasil (Outcome) Peningkatan capaian kinerja ASN kec. Tegineneng							
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		51,644,600.00	51,639,100.00	5,500.00	99.99%	100%	99.99%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		2 dokumen	2 dokumen				
	Hasil (Outcome) Peningkatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD							
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		80,325,500.00	80,299,900.00	25,600.00	99.97%	100%	99.97%
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	paket						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		16,073,000.00	16,063,000.00	10,000.00	99.94%	100%	99.94%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Tegineneng							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (Output) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan tegineneng		1 paket	1 paket				
	Hasil (Outcome) Peningkatan persediaan peralatan dan perlengkapan kantor kec. Tegineneng							
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga	paket						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		6,197,500.00	6,196,900.00	600.00	99.99%	100%	99.99%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga							
	Hasil (Outcome) Peningkatan persediaan peralatan rumah tangga di kantor kecamatan tegineneng							
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	paket						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		22,000,000.00	21,985,000.00	15,000.00	99.93%	100%	99.93%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) tersedianya bahan logistik kantor		1 paket	1 paket				
	Hasil (Outcome) peningkatan bahan logistik kantor di kecamatan tegineneng							
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	paket						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		12 dokumen	12 dokumen				
	Hasil (Outcome) Peningkatan tersedianya barang cetak kantor kec. Tegineneng							
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		4,400,000.00	4,400,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 laporan	1 laporan				
	Hasil (Outcome) Peningkatan persediaan bahan bacaan dan peraturan per undang -undangan di kantor kec. Tegineneng							
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		26,155,000.00	26,155,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 kali	70 kali				

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (Outcome) Peningkatan Capaian penyelenggaraan rapat koordinasi di Kec. Tegineneng							
7.01.01.2.08	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		258,151,500.00	257,964,020.00	187,480.00	99.93%	100%	99.93%
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat	laporan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		190,000.00	190,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		75 dokumen	75 Dokumen				
	Hasil (Outcome) Peningkatan tersedianya jasa surat menyurat							
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	laporan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		7,000,000.00	6,812,520.00	187,480.00	97.32%	100%	97.32%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 web, 1 item	1 Web, 1 item				
	Hasil (Outcome) Peningkatan teredianya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik							
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		250,961,500.00	250,961,500.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		18 orang	18 orang				
	Hasil (Outcome) Peningkatan Capaian kinerja kec. Tegineneng dengan penyediaan jasa pelayanan umum kantor							
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		137,970,000.00	137,666,380.00		99.78%	100%	99.78%
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	unit						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		125,970,000.00	125,666,380.00	303,620.00	99.76%	100%	99.76%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		3 item	3 item				
	Hasil (Outcome) Peningkatan keterawatan kendaraan dinas operasional atau lapanagn dengan Penyediaan jasa pemeliharaan,							
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Tegineneng							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (Output) Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		4 unit	4 unit				
	Hasil (Outcome) Peningkatan keterawatan peralatan dan mesin lainnya							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		51,459,300.00	43,250,400.00	8,208,900.00	84.05%	100%	84.05%
7.01.02.2.01	koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		17,779,300.00	17,779,300.00		100.00%	100%	100.00%
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan : Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		17,779,300.00	17,779,300.00	-	100.00%	100%	100.00%
	Lokasi Kab.Pesawaran,Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Terlaksananya Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan		8 item	8 item				
	Hasil (Outcome) Peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi							
7.01.02.2.04	pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		33,680,000.00	25,471,100.00	8,208,900.00	75.63%	100%	75.63%
7.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		17,220,000.00	17,216,100.00	3,900.00	99.98%	100%	99.98%
	Lokasi Kab.Pesawaran							
	Keluaran (Output) Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (Outcome) Meningkatnya pelayanan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha							
7.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nin perizinan	dokumen						
	Masukan (Input) Dana yang di butuhkan		16,460,000.00	8,255,000.00	8,205,000.00	50.15%	100%	50.15%
	Lokasi Kab.Pesawaran, Kec Tegineneng							
	Keluaran (Output) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (Outcome) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Dengan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan							
JUMLAH			1,832,857,655.00	1,724,522,755.00	108,334,900.00	94.09%	100%	94.09%

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PUNDUH PIDADA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	BELANJA DAERAH		1,424,363,913	1,336,779,682	93.85			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		989,941,413	910,463,421	91.97			
	BELANJA PEGAWAI		1,021,741,413	942,263,421	92.22			
	BELANJA LANGSUNG		434,422,500	426,316,261	98.13			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		1,389,553,913	1,215,644,782	87.48			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,021,741,413	942,263,421	91.97			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		989,941,413	910,463,421	91.97			
	Lokasi Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		989,941,413	910,463,421	91.97			
	Keluaran (output) Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		14 Bulan	14 Bulan				
	Hasil (outcome) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		14 Bulan	14 Bulan				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		31,800,000	31,800,000	100.00			
	Lokasi Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		31,800,000	31,800,000	100.00			
	Keluaran (output) Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Hasil (outcome) Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6,337,600	6,037,600	95.27			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,599,600	1,599,600	100.00			
	Lokasi Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input) Jumlah Anggran		1,599,600	1,599,600	100.00			
	Keluaran (output) Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Hasil (outcome) Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pemyusunan Dokumen RKA - SKPD		1,160,000	1,160,000	100.00			
	Lokasi Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input) Jumlah Anggran		1,160,000	1,160,000	100.00			
	Keluaran (output) Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Hasil (outcome) Tersedianya Laporan dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pemyusunan Dokumen DPA - SKPD		1,062,500	762,500	71.76			
	Lokasi Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input) Jumlah Anggran		1,062,500	762,500	71.76			
	Keluaran (output) Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (outcome)	Trsedianya Laporan dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pemyusunan Perubahan DPA - SKPD		1,154,000	1,154,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggran		1,154,000	1,154,000	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Hasil (outcome)	Tersedianya Laporan dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Pemyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		1,361,500	1,361,500	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggran		1,361,500	1,361,500	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah laporan dan Penyusunan laporan Capaia Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Hasil (outcome)	Tersedianya Laporan dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		92,604,900	86,324,900	93.22			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2,095,000	2,095,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		2,095,000	2,095,000	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Paket	12 Paket				
	Hasil (outcome)	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Paket	12 Paket				
	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		26,369,300	20,145,300	76.40			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		26,369,300	20,145,300	76.40			
	Keluaran (output)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor		12 Paket	12 Paket				
	Hasil (outcome)	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor		12 Paket	12 Paket				
	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9,338,100	9,300,000	99.59			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		9,338,100	9,300,000	99.59			
	Keluaran (output)	Jumlah paket peralatan rumah tangga		12 Paket	12 Paket				
	Hasil (outcome)	Tersediannya peralatan rumah tangga		12 Paket	12 Paket				
	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15,110,000	15,110,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		15,110,000	15,110,000	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah paket bahan logistik kantor		12 Paket	12 Paket				
	Hasil (outcome)	Tersediannya bahan logistik kantor		12 Paket	12 Paket				
	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11,472,500	11,454,600	99.84			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		11,472,500	11,454,600	99.84			
	Keluaran (output)	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan		12 Paket	12 Paket				
	Hasil (outcome)	Tersediannya barang cetakan dan pengadaan		12 Paket	12 Paket				
	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1,320,000	1,320,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		1,320,000	1,320,000	100.00			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (output)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Hasil (outcome)	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Dokumen	1 Dokumen				
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26,900,000	26,900,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		26,900,000	26,900,000	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan				
	Hasil (outcome)	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan				
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		132,200,000	130,883,751	81.72			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,200,000	1,200,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		1,200,000	1,200,000	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Paket	12 Paket				
	Hasil (outcome)	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 Paket	12 Paket				
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7,200,000	5,883,751	81.72			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		7,200,000	5,883,751	81.72			
	Keluaran (output)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 Laporan	12 Laporan				
	Hasil (outcome)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	12 Laporan				
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor		123,800,000	123,800,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		123,800,000	123,800,000	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor		12 Laporan	12 Laporan				
	Hasil (outcome)	Tersedianya Jasa Pelayan Umum Kantor		12 Laporan	12 Laporan				
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		136,670,000	136,460,010	99.85			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		124,230,000	124,020,010	99.83			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		124,230,000	124,020,010	99.83			
	Keluaran (output)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	1 Unit				
	Hasil (outcome)	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan		1 Unit	1 Unit				
	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		12,440,000	12,440,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		12,440,000	12,440,000	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 Unit	2 Unit				

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (outcome)	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan		2 Unit	2 Unit				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN			34,810,000	34,810,000	100.00			
	Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		34,810,000	34,810,000				
	Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		23,079,000	23,079,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		23,079,000	23,079,000	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan	1 Laporan				
	Hasil (outcome)	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan	1 Laporan				
	Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan di Tingkat kecamatan		11,731,000	11,731,000	100.00			
	Lokasi	Kecamatan Punduh Pedada							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		11,731,000	11,731,000	100.00			
	Keluaran (output)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan di Tingkat kecamatan		1 Dokomen	1 Dokumen				
	Hasil (outcome)	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan di Tingkat kecamatan		1 Dokomen	1 Dokumen				

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEDONDONG

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
II.	Belanja Langsung							
7	Unsur Kewilayahan	Rp.	Rp1,688,339,096	Rp1,590,502,101	Rp97,836,995	94.21%	100%	100%
7.01	Kecamatan	Rp.	Rp1,688,339,096	Rp1,590,502,101	Rp97,836,995	94.21%	100%	100%
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	Rp1,667,997,096	Rp1,570,178,601	Rp97,818,495	94.14%	100%	100%
7.01.01.2.01	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Masukan : Rp. 4.266.000,-	Rp.	Rp4,266,000	Rp4,237,000	Rp29,000	99.32%		
	Lokasi : Seluruh Desa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100%	100%
	Hasil: Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100%	100%
7.01.01.2.02	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Masukan : Rp. 1.139.168.812,-	Rp.	Rp1,221,350,196	Rp1,139,168,812	Rp82,181,384	93.27%		
	Lokasi : Seluruh Desa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran: Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah						100%	100%
	Hasil: Presentase ketercapaian Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah						100%	100%
7.01.01.2.06	3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Masukan : Rp. 94.598.900,-	Rp.	Rp94,548,900	Rp82,440,249	Rp12,108,651	87.19%		
	Lokasi : Seluruh Desa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						100%	100%
	Hasil: Presentase ketercapaian Pengelolaan Administrasi Umum						100%	100%
7.01.01.2.07	4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Masukan : Rp.2.342.000,-	Rp.	Rp2,342,000	Rp620,200	Rp1,721,800	26.48%		
	Lokasi : Seluruh Desa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%	100%

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil: Presentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%	100%
7.01.01.2.08	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Masukan : Rp. 200.510.000,-	Rp.	Rp200,510,000	Rp199,483,846	Rp1,026,154	99.49%		
	Lokasi : Seluruh Desa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	100%
	Hasil: Presentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	100%
7.01.01.2.09	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Masukan : Rp. 144.980.000	Rp.	Rp144,980,000	Rp144,228,494	Rp751,506	99.48%		
	Lokasi : Seluruh Desa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	100%
	Hasil: Presentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Rp20,342,000	Rp20,323,500	Rp18,500	99.91%		
7.01.02.01	7. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
	Masukan : Rp.18.821.000	Rp.	Rp18,821,000	Rp18,804,500	Rp16,500	99.91%		
	Lokasi : Seluruh Desa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran: Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						100%	100%
	Hasil: Presentase ketercapaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						100%	100%
7.01.02.04	8. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
	Masukan : Rp. 1.521.000	Rp.	Rp1,521,000	Rp1,519,000	Rp2,000	99.87%		
	Lokasi : Seluruh Desa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran: Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						100%	100%
	Hasil: Presentase ketercapaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						100%	100%

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Belanja Daerah		9,539,931,952	8,873,191,168	93.01			
	Belanja Tidak Langsung		8,683,740,652	8,020,541,316	92.36			
	Belanja Pegawai		8,683,740,652	8,020,541,316	92.36			
	Belanja Langsung		856,191,300	852,649,852	99.58			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,683,740,652	8,020,541,316	92.36			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8,246,180,652	7,583,741,316	99.31			
	Lokasi Gedung Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		8,246,180,652	7,583,741,316	99.31			
	Keluaran (output) Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan		14 bulan	14 bulan				
	Hasil (outcome) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan		14 bulan	14 bulan				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD		437,560,000	436,800,000	99.82			
	Lokasi Gedung Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		437,560,000	436,800,000	99.82			
	Keluaran (output) Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan		12 bulan	12 bulan				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		163,075,500	162,918,214	99.9			
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan perlengkapan kantor		30,023,500	30,023,500	100			
	Lokasi Gedung Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		30,023,500	30,023,500	100			
	Keluaran (output) Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tersedia		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome) Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	12 bulan				
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor		10,000,000	10,000,000	100			
	Lokasi Gedung Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		10,000,000	10,000,000	100			
	Keluaran (output) Jumlah logistik kantor yang tersedia		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome) Tercapainya Pelayanan Logistik Perkantoran		12 bulan	12 bulan				
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		25,194,000	25,194,000	100			
	Lokasi Gedung Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		25,194,000	25,194,000	100			
	Keluaran (output) Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome) Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	12 bulan				
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		25,000,000	25,000,000	100			
	Lokasi Gedung Tataan							
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		25,000,000	25,000,000	100			
	Keluaran (output) Jumlah surat kabar harian yang tersedia		12 bulan	12 bulan				

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (outcome)	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	12 bulan				
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		72,858,000	72,700,714	99.78			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		72,858,000	72,700,714	99.78			
	Keluaran (output)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi urusan perkantoran		12 bulan	12 bulan				
	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		210,144,500	209,618,000	99.74			
	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya		15,000,000	15,000,000	100			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		15,000,000	15,000,000	100			
	Keluaran (output)	Jumlah Peralatan Mesin Gedung Kantor yang tersedia		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah		12 bulan	12 bulan				
	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		195,144,500	194,618,000	99.73			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		195,144,500	194,618,000	99.73			
	Keluaran (output)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tercapainya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		12 bulan	12 bulan				
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		36,000,000	36,000,000	100			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36,000,000	36,000,000	100			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		36,000,000	36,000,000	100			
	Keluaran (output)	Jumlah Jasa Kantor (Listrik, air) yang terbayar		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tercapainya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		12 bulan	12 bulan				
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		202,471,300	200,393,630	98.97			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		202,471,300	200,393,630	98.97			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		202,471,300	200,393,630	98.97			
	Keluaran (output)	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tercapainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		12 bulan	12 bulan				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			244,500,000	244,500,000	100			
	Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan internal		177,300,000	177,300,000	100			
	Sub Kegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		36,000,000	36,000,000	100			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		36,000,000	36,000,000	100			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (output)	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tercapainya pengawasan kinerja pemerintah daerah		12 bulan	12 bulan				
	Sub Kegiatan	Pengawasan Desa		69,300,000	69,300,000	100			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		69,300,000	69,300,000	100			
	Keluaran (output)	Jumlah Pengawasan Desa		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tercapainya pengawasan desa se-Kabupaten Pesawaran		12 bulan	12 bulan				
	Sub Kegiatan	Reviu Laporan Kinerja		460,431,000	460,320,504	100			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		460,431,000	460,320,504	100			
	Keluaran (output)	Jumlah Pengawasan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tercapainya pengawasan Reviu Laporan kinerja pemerintah daerah		12 bulan	12 bulan				
	Sub Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		72,000,000	72,000,000	100			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		72,000,000	72,000,000	100			
	Keluaran (output)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tercapainya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		12 bulan	12 bulan				
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		67,200,000	67,200,000	100			
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		67,200,000	67,200,000	100			
	Keluaran (output)	Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		12 bulan	12 bulan				
	Hasil (outcome)	Tercapainya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		12 bulan	12 bulan				

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5 02	KEUANGAN		268,281,994,546	254,479,853,173	13,802,141,373	94.86		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	28,295,628,136	23,745,351,541	4,550,276,595	83.92		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		156,198,100	156,106,138	91,962	99.94		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	30,161,000	30,069,038	91,962	99.70		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen	3 Dokumen
	Hasil Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						100%	100%
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	Masukan Jumlah dana	Rp	20,905,000	20,905,000	-	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen
	Hasil Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						100%	100%
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	Masukan Jumlah dana	Rp	16,759,000	16,759,000	-	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen
	Hasil Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						100%	100%
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
	Masukan Jumlah dana	Rp	14,533,000	14,533,000	-	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen
	Hasil	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						100%	100%
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	13,000,000	13,000,000	-	100.00		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen
	Hasil	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						100%	100%
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	45,840,100	45,840,100	-	100.00		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6 Laporan	6 Laporan
	Hasil	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100%	100%
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	15,000,000	15,000,000	-	100.00		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2 Laporan	2 Laporan
	Hasil	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100%	100%
5 02 01 2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25,660,459,536	21,124,371,950	4,536,087,586	82.32		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	24,944,907,936	20,409,320,350	4,535,587,586	81.82		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						420 Orang	420 Orang

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						100%	100%
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
	Masukan Jumlah dana	Rp	120,100,000	120,100,000	-	100.00		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12 Dokumen	12 Dokumen
	Hasil Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						100%	100%
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD							
	Masukan Jumlah dana	Rp	553,451,600	552,951,600	500,000	99.91		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	12 Dokumen
	Hasil Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						100%	100%
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
	Masukan Jumlah dana	Rp	30,000,000	30,000,000	-	100.00		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan						1 Laporan	1 Laporan
	Hasil Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						100%	100%
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
	Masukan Jumlah dana	Rp	12,000,000	12,000,000	-	100.00		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan						1 Laporan	1 Laporan
	Hasil Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						100%	100%
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		78,508,650	78,452,150	56,500	99.93		
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan	Jumlah dana	Rp	56,350,000	56,293,500	56,500	99.90		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket	1 Paket
	Hasil	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						100%	100%
5 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	22,158,650	22,158,650	-	100.00		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						12 Dokumen	12 Dokumen
	Hasil	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						100%	100%
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,506,874,650	1,497,718,353	9,156,297	99.39		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	65,000,000	64,996,400	3,600	99.99		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket
	Hasil	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100%	100%
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	474,382,800	471,209,900	3,172,900	99.33		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket
	Hasil	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100%	100%
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	124,929,500	119,640,301	5,289,199	95.77		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	1 Paket
	Hasil	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						100%	100%

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Masukan Jumlah dana	Rp	70,000,000	70,000,000	-	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket
	Hasil Tersedianya Bahan Logistik Kantor						100%	100%
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Masukan Jumlah dana	Rp	140,958,350	140,957,250	1,100	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	1 Paket
	Hasil Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						100%	100%
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- undangan							
	Masukan Jumlah dana	Rp	77,200,000	77,200,000	-	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						6 Dokumen	6 Dokumen
	Hasil Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						100%	100%
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
	Masukan Jumlah dana	Rp	195,905,000	195,681,000	224,000	99.89		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan	12 Laporan
	Hasil Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu						100%	100%
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Masukan Jumlah dana	Rp	358,499,000	358,033,502	465,498	99.87		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	12 Laporan
	Hasil Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100%	100%
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	0.00		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel							
	Masukan Jumlah dana	Rp	-	-	-	0.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						5 Unit	0 Unit
	Hasil Tersedianya Mebel						100%	100%
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		539,960,000	535,705,750	4,254,250	99.21		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	Masukan Jumlah dana	Rp	3,960,000	3,960,000	-	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan
	Hasil Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100%	100%
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Masukan Jumlah dana	Rp	23,000,000	20,745,750	2,254,250	90.20		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan
	Hasil Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100%	100%
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Masukan Jumlah dana	Rp	513,000,000	511,000,000	2,000,000	99.61		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan
	Hasil Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						100%	100%
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		353,627,200	352,997,200	630,000	99.82		
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Masukan Jumlah dana	Rp	231,327,200	231,197,200	130,000	99.94		
	Lokasi Gedung Tataan							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan						9 Unit	9 Unit
	Hasil	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100%	100%
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	102,300,000	101,800,000	500,000	99.51		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						46 Unit	46 Unit
	Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100%	100%
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	20,000,000	20,000,000	-	100.00		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit
	Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100%	100%
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			238,890,588,210	229,752,083,093	9,138,505,117	96.17		
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			3,045,264,500	2,958,808,701	86,455,799	97.16		
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	235,078,400	231,787,400	3,291,000	98.60		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun						2 Dokumen	2 Dokumen
	Hasil	Tersusunnya KUA dan PPAS						100%	100%
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	154,772,200	148,880,500	5,891,700	96.19		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun						2 Dokumen	2 Dokumen
	Hasil	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						100%	100%
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan	Jumlah dana	Rp	51,569,000	51,549,000	20,000	99.96		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi						57 Dokumen	57 Dokumen
	Hasil	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD						100%	100%
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	98,517,000	98,441,000	76,000	99.92		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi						57 Dokumen	57 Dokumen
	Hasil	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						100%	100%
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	112,733,500	112,733,500	-	100.00		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi						57 Dokumen	57 Dokumen
	Hasil	Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD						100%	100%
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	134,088,000	129,380,081	4,707,919	96.49		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi						57 Dokumen	57 Dokumen
	Hasil	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						100%	100%
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	1,390,950,000	1,333,901,420	57,048,580	95.90		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						3 Dokumen	3 Dokumen
	Hasil	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						100%	100%
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan								

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan	Jumlah dana	Rp	294,171,700	289,359,300	4,812,400	98.36		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						3 Dokumen	3 Dokumen
	Hasil	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						100%	100%
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	153,778,400	153,676,000	102,400	99.93		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						2 Dokumen	2 Dokumen
	Hasil	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						100%	100%
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	67,581,400	67,415,400	166,000	99.75		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						4 Dokumen	4 Dokumen
	Hasil	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						100%	100%
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	101,890,600	91,594,000	10,296,600	89.89		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						4 Dokumen	4 Dokumen
	Hasil	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						100%	100%
5 02 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
	Masukan	Jumlah dana	Rp	72,662,500	72,641,100	21,400	99.97		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						2 Dokumen	2 Dokumen
	Hasil	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						100%	100%
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan Jumlah dana	Rp	177,471,800	177,450,000	21,800	99.99		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						45 Orang	45 Orang
	Hasil Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						100%	100%
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1,043,567,000	1,042,318,000	1,249,000	99.88		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	626,250,000	626,250,000	-	100.00		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						43 Dokumen	43 Dokumen
	Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						100%	100%
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
	Masukan Jumlah dana	Rp	96,110,000	96,110,000	-	100.00		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						172 Dokumen	172 Dokumen
	Hasil Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						100%	100%
5 02 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	56,402,100	56,194,100	208,000	99.63		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah						12 Dokumen	12 Dokumen
	Hasil Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah						100%	100%
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
	Masukan Jumlah dana	Rp	64,164,000	63,241,000	923,000	98.56		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring,						45 Dokumen	45 Dokumen

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						100%	100%
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
	Masukan Jumlah dana	Rp	134,310,900	134,310,900	-	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						24 Laporan	24 Laporan
	Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						100%	100%
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas							
	Masukan Jumlah dana	Rp	66,330,000	66,212,000	118,000	99.82		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						60 Dokumen	60 Dokumen
	Hasil Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						100%	100%
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1,118,994,000	1,107,181,500	11,812,500	98.94		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	40,000,000	40,000,000	-	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						24 Laporan	24 Laporan
	Hasil Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						100%	100%
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
	Masukan Jumlah dana	Rp	185,900,000	185,900,000	-	100.00		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						17 Laporan	17 Laporan
	Hasil Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						100%	100%
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	252,331,000	248,831,000	3,500,000	98.61		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi						2 Laporan	2 Laporan
	Hasil Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						100%	100%
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
	Masukan Jumlah dana	Rp	211,850,000	205,187,500	6,662,500	96.86		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						4 Dokumen	4 Dokumen

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						100%	100%
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	428,913,000	427,263,000	1,650,000	99.62		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						3 Dokumen	3 Dokumen
	Hasil Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						100%	100%
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Aset Daerah		233,682,762,710	224,643,774,892	9,038,987,818	96.13		
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	5,000,000,000	4,491,189,320	508,810,680	89.82		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						12 Laporan	12 Laporan
	Hasil Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						100%	100%
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							
	Masukan Jumlah dana	Rp	220,054,801,960	214,390,573,849	5,664,228,111	97.43		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						8 Laporan	8 Laporan
	Hasil Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						100%	100%
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
	Masukan Jumlah dana	Rp	500,000,000	463,375,000	36,625,000	92.68		
	Lokasi Gedong Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						3 Laporan	3 Laporan
	Hasil Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak						100%	100%

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota							
	Masukan Jumlah dana	Rp	8,127,960,750	5,298,636,723	2,829,324,027	65.19		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						2 Laporan	2 Laporan
	Hasil Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						100%	100%
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1,095,778,200	982,418,539	113,359,661	89.65		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1,095,778,200	982,418,539	113,359,661	89.65		
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	90,997,600	88,420,000	2,577,600	97.17		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen
	Hasil Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						100%	100%
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	24,940,200	22,460,200	2,480,000	90.06		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						12 Dokumen	12 Dokumen
	Hasil Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						100%	100%
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	151,750,000	136,312,139	15,437,861	89.83		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah						43 Laporan	43 Laporan
	Hasil Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah						100%	100%
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	24,453,700	24,203,700	250,000	98.98		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah						43 Laporan	43 Laporan

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah						100%	100%
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	393,955,700	382,954,500	11,001,200	97.21		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah						60 Laporan	60 Laporan
	Hasil Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah						100%	100%
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	48,736,000	48,663,000	73,000	99.85		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah						1 Laporan	1 Laporan
	Hasil Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah						100%	100%
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	136,705,000	97,575,000	39,130,000	71.38		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						1 Dokumen	1 Dokumen
	Hasil Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						100%	100%
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
	Masukan Jumlah dana	Rp	159,040,000	129,980,000	29,060,000	81.73		
	Lokasi Gedung Tataan							
	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						57 Laporan	57 Laporan
	Hasil Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						100%	100%
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan	Jumlah dana	Rp	65,200,000	51,850,000	13,350,000	79.52		
	Lokasi	Gedong Tataan							
	Keluaran	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun						43 Laporan	43 Laporan
	Hasil	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah						100%	100%

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Perencanaan							
5.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4,681,526,600	4,432,566,128	248,960,472	94,68		
5.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	20,000,000	19,966,000	34	99,83		
5.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedung Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	10,000,000	9,966,000	34	99,66		
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	7	7		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	7	7		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedung Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	10,000,000	10,000,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Lap	8	8		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Lap	8	8		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3,831,716,600	3,596,674,024	235,042,576	93,87		
5.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedung Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	3,688,996,600	3,461,764,024	227,232,576	93,84		
	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	30	30		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	30	30		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedung Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	137,720,000	129,910,000	7,810,000	94,33		
	Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	239	239		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	239	239		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.02.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedung Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	5,000,000	5,000,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	26	26		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap	26	26		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	28,060,000	27,880,000	180	99,36		
5.1.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedung Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	17,000,000	17,000,000	-	100.00		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	12	12		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	12	12		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	11,060,000	10,880,000	180	98,37		
	Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	11	11		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Org	11	11		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	158,949,850	148,867,842	10,082,008	93,66		
5.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	30,000,000	30,000,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	12		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	10,508,700	10,508,700	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	5	5		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	12,509,500	11,409,500	1,100,000	91,21		
	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	8	8		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	17,970,000	17,970,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	12	12		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	40,880,000	38,310,000	2,570,000	93,71		
	Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	1	1		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dok	1	1		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	47,081,650	40,669,642	6,412,008	86,38		
	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	75	75		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	75	75		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	23,587,500	23,500,000	875	99,63		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	23,587,500	23,500,000	875	99,63		
	Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	7		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	400,300,000	397,976,487	2,323,513	99,42		
5.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	147,500,000	145,176,487	2,323,513	98,42		
	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap	12	12		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	252,800,000	252,800,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	12	12		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	218,912,650	217,701,775	1,210,875	99,45		
5.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	213,940,000	212,729,125	1,210,875	99,43		
	Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	5		100.00	100.00	100.00
5.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	4,972,650	4,972,650	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	1	1		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1		100.00	100.00	100.00
5.1.2..	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	635,300,000	623,849,108	11,450,892	98,20		
5.1.2.2,01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	332,856,000	329,084,108	3,771,892	98,87		
5.1.2.2,01.2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	125,000,000	122,603,108	2,396,892	98,08		
	Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok	2	2		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Dok	2	2		100.00	100.00	100.00
5.1.2.2,01.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	30,000,000	30,000,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi	BA	1	1		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Konsultasi Publik	BA	1	1		100.00	100.00	100.00
5.1.2.2,01.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	30,000,000	30,000,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum	BA	2	2		100.00	100.00	100.00

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil : Terlaksananya Forum Perangkat	BA	1	1		100.00	100.00	100.00
5.1.2.2,01.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	70,000,000	70,000,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang	BA	1	1		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Musrenbang	BA	1	1		100.00	100.00	100.00
5.1.2.2,01.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	23,800,000	23,800,000	-	100.00		
	Keluaran yang : Jumlah Usulan Terverifikasi	Usulan	11	11		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersedianya Usulan-Usulan	Usulan	11	11		100.00	100.00	100.00
5.1.2.2,01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	54,056,000	52,681,000	1,375,000	97,46		
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok	2	2		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	2	2		100.00	100.00	100.00
5.1.2.2,02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Rp	201,500,000	197,946,000	3,554,000	98,24		
5.1.2.2,02.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	131,500,000	131,446,000	54	99,96		
	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dok	2	2		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok	2	2		100.00	100.00	100.00
5.1.2.2,02.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	70,000,000	66,500,000	3,500,000	95,00		
	Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan	Buku	1	1		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersusunnya Dokumen Profil	Buku	1	1		100.00	100.00	100.00
5.1.2.2,03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	100,944,000	96,819,000	4,125,000	95,91		
5.1.2.2,03.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	40,944,000	39,569,000	1,375,000	96,64		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Lap	4	4		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Lap	4	4		100.00	100.00	100.00
5.1.2.2,03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	60,000,000	57,250,000	2,750,000	95,42		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Lap	4	4		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Lap	4	4		100.00	100.00	100.00
5.1.3..	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Rp	834,396,167	808,653,268	25,742,899	96,91		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5.1.3.2,01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	245,046,167	231,283,061	13,763,106	94,38		
5.1.3.2,01.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	25,802,300	25,793,160	914	99,96		
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,01.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	8,695,700	8,695,700	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lap	4	4		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lap	4	4		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	10,382,000	10,382,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lap	3	3		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lap	3	3		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,01.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	68,056,767	67,832,801	223,966	99,67		
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	2	2		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	2	2		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,01.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	10,199,100	7,449,100	2,750,000	73,04		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lap	4	4		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lap	4	4		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,01.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	121,910,300	111,130,300	10,780,000	91,16		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lap	7	7		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lap	7	7		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp	344,350,000	336,497,700	7,852,300	97,72		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5.1.3.2,02.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	99,350,000	99,350,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lap	5	5		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Lap	5	5		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	71,906,500	71,905,800	700	100.00		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lap	2	2		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lap	2	2		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,02.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	66,999,000	66,649,000	350	99,48		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lap	5	5		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lap	5	5		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,02.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	56,109,500	48,607,900	7,501,600	86,63		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lap	5	5		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lap	5	5		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,02.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	49,985,000	49,985,000	-	100.00		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Lap	2	2		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Lap	2	2		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan	Rp	245,000,000	240,872,507	4,127,493	98,32		
5.1.3.2,03.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	54,797,750	53,395,930	1,401,820	97,44		
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dok	6	6		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dok	6	6		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,03.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	34,979,000	34,869,000	110	99,69		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lap	6	6		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lap	6	6		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,03.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	13,005,000	12,925,000	80	99,38		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lap	6	6		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lap	6	6		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	45,711,000	44,665,000	1,046,000	97,71		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Lap	2	2		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Lap	2	2		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,03.5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	33,231,500	33,125,327	106,173	99,68		
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	11	11		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	11	11		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,03.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	25,365,000	25,265,000	100	99,61		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lap	11	11		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lap	11	11		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2,03.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	23,535,100	22,297,600	1,237,500	94,74		
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lap	11	11		100.00	100.00	100.00

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lap	11	11		100.00	100.00	100.00
5.1.3.2.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Lokasi : Kab. Pesawaran, Gedong Tataan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	14,375,650	14,329,650	46	99,68		
	Keluaran : Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Kewilayahan	Lap	2	2		100.00	100.00	100.00
	Hasil : Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Lap	2	2		100.00	100.00	100.00
GRAND TOTAL		Rp	6,151,222,767	5,865,068,504	286,154,263	95,35	100.00	100.00

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5 02	KEUANGAN		9,635,108,234	8,773,458,665	861,649,569	91.06%	100%	100%
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8,038,725,134	7,230,190,665	808,534,469	89.94%	100%	100%
01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		59,653,900	58,086,500	1,567,400	97.37%	100%	100%
5 02 01 2 02 01 2 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8,025,000	8,025,000	-	100.00%	100%	100%
	Masukan 8,025,000							
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Hasil : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
5 02 01 2 02 01 2 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		8,179,000	8,179,000	-	100.00%	100%	100%
	Masukan 22,618,000							
	Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD							
	Hasil : Dokumen RKA-SKPD							
5 02 01 2 02 01 2 1 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4,963,000	3,395,600	1,567,400	68.42%	100%	100%
	Masukan 4,963,000							
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	Hasil : Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
5 02 01 2 02 01 2 1 05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6,830,000	6,830,000	-	100.00%	100%	100%
	Masukan 6,830,000							
	Keluaran : Jumlah DPA-SKPD							
	Hasil : DPA-SKPD							
5 02 01 2 02 01 2 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		6,617,900	6,617,900	-	100.00%	100%	100%
	Masukan 6,617,900							
	Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD							
	Hasil :Perubahan DPA-SKPD							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5 02 01 2 02 01 2 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		12,289,000	12,289,000	-	100.00%	100%	100%
	Masukan	12,289,000						
	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Hasil : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
5 02 01 2 02 01 2 1 06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12,750,000	12,750,000	-	100.00%	100%	100%
	Masukan	12,750,000						
	Keluaran :Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Hasil :Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
5 02 01 2 02 01	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,577,625,200	4,826,284,102	751,341,098	86.53%	100%	100%
5 02 01 2 02 01 5 1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5,521,075,200	4,770,123,702	750,951,498	86.40%	100%	100%
	Masukan	5,521,075,200						
	Keluaran : Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Hasil : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN							
5 02 01 2 02 01 5 1 02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		15,618,000	15,228,400	389,600	97.51%	100%	100%
	Masukan	22,618,000						
	Keluaran : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
	Hasil : Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
5 02 01 2 02 01 5 1 03	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		20,531,000	20,531,000	-	100.00%	100%	100%
	Masukan	20,531,000						
	Keluaran : Terlaksananya Penatusahaan dan Pengujian/verifikasi							
	Hasil : Tersedianya Penatusahaan dan Pengujian/verifikasi							
5 02 01 2 02 01 5 1 05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		10,000,000	10,000,000	-	100.00%	100%	100%
	Masukan	10,000,000						
	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir							
	Hasil : tersedianya laporan keuangan akhir							
5 02 01 2 02 01 5 1 06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/smesteran/triwulan		10,401,000	10,401,000	-	100.00%	100%	100%

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan 10,401,000							
	Keluaran :Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/smesteran/triwulan							
	Hasil :Tersedianya laporan keuangan/smesteran/triwulan							
					-			
5 02 01 2.04 04 01	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		5,000,000	5,000,000	-	100.00%		
5 02 01 2.04 04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		5,000,000	5,000,000	-	100.00%	12 Bulan	12 Bulan
	Masukan 5,000,000							
	Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan							
	Hasil : Terlaksananya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah							
5 02 01 2.05 05 02			15,545,000	15,545,000	-	100.00%		
5 02 01 2.05 05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		15,545,000	15,545,000	-	100.00%	5 Buku	5 Buku
	Masukan 15,545,000							
	Keluaran : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian							
	Hasil : Terlaksananya Laporan Administrasi Kepegawaian							
					-			
5 02 01 2.06 06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah		764,348,284	761,899,684	2,448,600	99.68%		
5 02 01 2.06 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		271,545,150	270,305,150	1,240,000	99.54%	12 Bulan	12 Bulan
	Masukan 271,545,150							
	Keluaran : Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Hasil : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
5 02 01 2.06 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		29,049,734	28,855,334	194,400	99.33%	12 Bulan	12 Bulan
	Masukan 29,049,734							
	Keluaran : Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli							
	Hasil : Tersedianya Peralatan Rumah tangga							
5 02 01 2.06 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		40,804,000	40,804,000	-	100.00%	11 Bulan	11 Bulan
	Masukan 40,804,000							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran : Jumlah Penyedia Bahan Logistik							
	Hasil : Tersedianya Bahan Logistik							
5 02 01 2.06 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		39,911,400	39,894,400	17,000	99.96%	12 Bulan	12 Bulan
	Masukan 39,911,400							
	Keluaran : Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan							
	Hasil : Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan							
5 02 01 2.06 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		42,840,000	42,540,000	300,000	99.30%	12 Bulan	12 Bulan
	Masukan 42,840,000							
	Keluaran : Terbayarnya Langganan Koran							
	Hasil : Jumlah Langganan Koran							
5 02 01 2.06 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		20,430,000	20,112,800	317,200	98.45%	11 Bulan	11 Bulan
	Masukan 20,430,000							
	Keluaran : Jumlah Makan dan Minum yang Tersedia							
	Hasil : Tersedianya Makan dan Minum Rapat Rapat							
5 02 01 2.06 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		68,163,000	67,783,000	380,000	99.44%	12 Bulan	12 Bulan
	Masukan 68,163,000							
	Keluaran : Jumlah rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar kabupaten							
	Hasil : Terlaksananya Rapat-rapat dan Konsultasi dalam dan Luar Kabupaten							
5 02 01 2.06 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis Umum Perangkat Daerah		14,210,000	14,210,000	-	100.00%	1 Laporan	1 Laporan
	Masukan 14,210,000							
	Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis							
	Hasil : Terpenuhinya Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis							
5 02 01 2.06 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		237,395,000	237,395,000	-	100.00%	4 System / Aplikasi	4 System / Aplikasi
	Masukan 237,395,000							
	Keluaran : Jumlah Sistem/Aplikasi							
	Hasil : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5 02 01 2.08 08 02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,201,942,750	1,150,066,239	51,876,511	95.68%		
5 02 01 2.08 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		167,000,000	166,276,864	723,136	99.57%	12 Bulan	12 Bulan
	Masukan 167,000,000							
	Keluaran : Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik							
	Hasil : Terbayarnya Jasa Langganan Listrik dan Air							
5 02 01 2.08 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,034,942,750	983,789,375	51,153,375	95.06%	12 Bulan	12 Bulan
	Masukan 1,034,942,750							
	Keluaran : Jumlah Penyediaan Jasa Umum Kantor							
	Hasil : Tersedianya Jasa Umum Kantor							
					-			
5 02 01 2.09 09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		414,610,000	413,309,140	1,300,860	99.69%		
5 02 01 2.09 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		364,610,000	363,398,140	1,211,860	99.67%	12 Bulan	12 Bulan
	Masukan 364,610,000							
	Keluaran : Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Yang terpelihara							
	Hasil : Tersedianya Jasa Umum Kantor							
5 02 01 2.01 09 06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		50,000,000	49,911,000	89,000	99.82%	2 Paket	2 Paket
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya							
	Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor							
	Hasil : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor							
					-			
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		18,969,500	18,969,500	-	100.00%		
5 02 03 2.01 01 03	Pengelolaan Barang Milik Daerah		18,969,500	18,969,500	-	100.00%		
5 02 03 2.01 01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		5,500,000	5,500,000	-	100.00%	1 Laporan	1 Laporan
	Masukan 5,500,000							
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							
	Hasil : Tercapainya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5 02 03 2.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah		13,469,500	13,469,500	-	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen
	Masukan	13,469,500						
	Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah							
	Hasil : Tercapainya Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah							
					-			
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1,577,413,600	1,524,298,500	53,115,100	96.63%		
5 02 04 2.01 01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1,577,413,600	1,524,298,500	53,115,100	96.63%		
5 02 04 2.01 01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		29,087,000	29,087,000	-	100.00%	7 Dokumen	7 Dokumen
	Masukan	29,087,000						
	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah							
	Hasil : Tercapainya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah							
5 02 04 2.01 01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		233,500,000	233,219,900	280,100	99.88%	8 Dokumen	8 Ddokumen
	Masukan	233,500,000						
	Keluaran : Jumlah Dokumen Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah							
	Hasil : Tercapainya Jumlah Dokumen Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah							
5 02 04 2.01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		32,300,000	32,300,000	-	100.00%	4 Dokumen	4 Dokumen
	Masukan	32,300,000						
	Keluaran : jumlah dokumen penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah							
	Hasil : Tercapainya jumlah dokumen penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah							
5 02 04 2.01	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		50,000,000	50,000,000	-	100.00%	376 Objek Pajak	376 Objek Pajak
	Masukan	50,000,000						
	Keluaran : jumlah pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah							
	Hasil : Tercapainya pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah							
5 02 04 2.01	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		90,000,000	88,000,000	2,000,000	97.78%	1 Dokumen	1 Dokumen
	Masukan	90,000,000						
	Keluaran : Jumlah dokumen pengolahan pemeliharaan, pelaporan basis data pajak daerah							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil : Tercapainya dokumen pengolahan pemeliharaan, pelaporan basis data pajak daerah							
5 02 04 2.01	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		411,089,100	410,674,100	415,000	99.90%	100 WP / 140.000 sppt	100 WP / 140.000 sppt
	Masukan 411,089,100							
	Keluaran : jumlah sppt dan jumlah BPHTB							
	Hasil : Tercapainya Objek Pajak Yang disesuaikan dengan NJOP							
5 02 04 2.01	Penetapan Wajib Pajak Daerah		30,000,000	30,000,000	-	100.00%	376 Objek Pajak	376 Objek Pajak
	Masukan 30,000,000							
	Keluaran : Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah							
	Hasil : Terwujudnya Penetapan Wajib Pajak Daerah							
5 02 04 2.01	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		71,500,000	71,500,000	-	100.00%	2 Dokumen	2 Dokumen
	Masukan 71,500,000							
	Keluaran : jumlah dokumen pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah							
	Hasil : Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah							
5 02 04 2.01	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		64,200,000	64,200,000	-	100.00%	19 Laporan	19 Laporan
	Masukan 64,200,000							
	Keluaran : jumlah laporan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah							
	Hasil : Tersusunnya Laporan Penelitian dan verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah							
5 02 04 2.01	Penagihan Pajak Daerah		60,000,000	60,000,000	-	100.00%	400 Objek Pajak	400 Objek Pajak
	Masukan 60,000,000							
	Keluaran : Jumlah Penagihan Objek Pajak							
	Hasil : Jumlah Penagihan Pajak Daerah							
5 02 04 2.01	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		130,423,500	130,423,500	-	100.00%	100 Wajib Pajak	100 Wajib Pajak
	Masukan 130,423,500							
	Keluaran : jumlah data penyelesaian keberatan pajak daerah							
	Hasil : Tercapainya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah							
5 02 04 2.01	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		198,250,000	197,830,000	420,000	99.79%	500 Objek Pajak	500 Objek Pajak

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan 198,250,000							
	Keluaran : Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Objek Pajak							
	Hasil : Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Objek Pajak							
5 02 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		62,064,000	62,064,000	-	100.00%	4 Laporan	4 Laporan
	Masukan 62,064,000							
	Keluaran : jumlah laporan pembinaan dan pengawasan							
	Hasil : Tersusun Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi							
5 02 04 2.01	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		115,000,000	65,000,000	50,000,000	56.52%	4 Laporan	4 Laporan
	Masukan 115,000,000							
	Keluaran : jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksib pemerintah daerah							
	Hasil : laporan perkembangan elektronifikasi transaksib pemerintah daerah							
			9,635,108,234	8,773,458,665	861,649,569	91.06%		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Lokasi : Gedung Tataan							
	Masukan (Input) : Jumlah Anggaran		1,882,947,469	1,771,887,688	94.10			
	Keluaran (Out Put) : Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	14 Bulan	100.00			
	Hasil (Out Come) : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	14 Bulan	100.00			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Lokasi : Gedung Tataan							
	Masukan (Input) : Jumlah Anggaran		196,155,000	169,655,000	86.49			
	Keluaran (Out Put) : Jumlah Penyediaan Honorarium Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	12 Bulan				
	Hasil (Out Come) : Terbayarnya Honorarium Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	12 Bulan	100.00			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Lokasi : Gedung Tataan							
	Masukan (Input) : Jumlah Anggaran		24,000,000	22,903,500	95.43			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (Out Put) : Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	100.00			
	Hasil (Out Come) Terbayarnya Jasa Langganan Listrik dan Air		12 Bulan	12 Bulan	100.00			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Masukan (Input) : Jumlah Anggaran		111,400,000	106,400,000	95.51			
	Keluaran (Out Put) Jumlah THL/Petugas Tenaga Kontrak yang dibayar		7 Orang	7 Orang	100.00			
	Hasil (Out Come) Terbayarnya Gaji THL/Petugas Tenaga Kontra		7 Orang	7 Orang	100.00			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Masukan (Input) : Jumlah Anggaran		180,975,900	178,809,900	98.80			
	Keluaran (Out Put) : Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Yang terpelihara		3 Unit	3 Unit	100.00			
	Hasil (Out Come) :Terpeliharanya Kendaraan / Operasional Dinas		3 Unit	3 Unit	100.00			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Masukan (Input) : Jumlah Anggaran		25,000,000	25,000,000	100.00			
	Keluaran (Out Put) : Jumlah Sewa Gedung Untuk Kantor		1 Unit	1 Unit	100.00			
	Hasil (Out Come) : Terbayarnya Sewa Gedung Untuk Kantor		1 Unit	1 Unit	100.00			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100%	100%	100%			
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		100%	100%	100%			
	Sub Kegiatan : Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Masukan (Input) : Jumlah Anggaran		50,000,000	49,620,000	99.24			
	Keluaran (Out Put) : Jumlah Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	1 Laporan	100.00			
	Hasil (Out Come) : Tersedianya Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	1 Laporan	100.00			
	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							
	Sub Kegiatan : Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi							
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Masukan (Input) : Jumlah Anggaran		80,000,000	47,247,500	59.06			
	Keluaran (Out Put) :Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi		1 Laporan	1 Laporan				

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (Out Come) : Tersedianya Laporan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi		1 Laporan	1 Laporan				
	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi							
	Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif							
	Lokasi : Gedung Tataan							
	Masukan (Input) : Jumlah Anggaran		188,582,000	183,328,961	97.21			
	Keluaran (Out Put) : Jumlah laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	1 Laporan	100.00			
	Hasil (Out Come) : Tersedianya laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	1 Laporan	100.00			

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUKUM

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	BAGIAN HUKUM	Rp.	300,000,000	229,747,081	70,252,919	76.58	100.00	100.00
	URUSAN WAJIB BAGIAN HUKUM	Rp.	300,000,000	229,747,081	70,252,919	76.58	100.00	100.00
	BELANJA LANGSUNG	Rp.	300,000,000	229,747,081	70,252,919	76.58		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	300,000,000	229,747,081	70,252,919	76.58		
4 01 02 2 03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	71,035,000	71,035,000	-	100.00		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun						342 Dokumen	342 Dokumen
	Hasil : Terbentuknya PHD Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan						100%	100%
4 01 02 2 03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	181,810,000	111,557,081	70,252,919	61.36		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Hukum						3 Kasus	2 Kasus
	Hasil : terselesainya Masalah Hukum Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran						100%	65.00%
4 01 02 2 03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	47,155,000	47,155,000	-	100.00		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi						342 Dokumen	342 Dokumen
	Hasil : Terpeliharanya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Web Site) Sebagai Sumber Informasi Untuk SKPD dan Masyarakat Kabupaten Pesawaran, serta Terciptanya Inventarisasi dan Kodifikasi Produk Hukum Daerah						100%	100%

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi							
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	175,000,000	144,760,000	30,240,000	82.72		
	Lokasi Gedong Tataan				-			
	Keluaran (output) Jumlah dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	dokumen	4	3	1	75.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial				-			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	54,350,000	53,092,000	1,258,000	97.69		
	Lokasi Gedong Tataan				-			
	Keluaran (output) Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	lembaga	7	7	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan				-			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	200,000,000	197,393,100	2,606,900	98.70		
	Lokasi Gedong Tataan				-			
	Keluaran (output) Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	orang	120	120	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan				-			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				-			
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	109,700,000.00	103,300,000	6,400,000	94.17		
	Lokasi Gedong Tataan				-			
	Keluaran (output) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	dokumen	7	7	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan				-			
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				-			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	12,000,000	9,800,000	2,200,000	81.67		
	Lokasi Gedong Tataan				-			
	Keluaran (output) Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan layanan pengaduan	orang	12	12	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan				-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	254,504,000	91,173,300	163,330,700	35.82		
	Lokasi Gedong Tataan				-			
	Keluaran (output) Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	layanan	12	12	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan				-			
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				-			
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	138,756,800	138,756,800	-	100.00		
	Lokasi Gedong Tataan				-			
	Keluaran (output) Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	dokumen	3	3	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga				-			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				-			
	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	270,000,000	269,500,000	500,000	99.81		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah organisasi pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, nonpemerintah , media dan dunia usaha	Organisasi	50	50	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha				-			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-			
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	75,000,000	55,600,000	19,400,000	74.13		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	anak	60	60	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya layanan peningkatan kualitas hidup anak				-			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	43,221,000	43,001,258	219,742	99.49		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	dokumen	2	2	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya KIE pemenuhan hak anak				-			
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				-			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	74,596,000	73,581,000	1,015,000	98.64		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah dokumen hasil koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	2	2	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terlaksananya koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak				-			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	3,075,628,996	2,896,735,848	178,893,148	94.18		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	27	27	-	100.00		
	Hasil (outcome) Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN				-			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	156,400,000	132,380,000	24,020,000	84.64		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12	12	-	100.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	6,000,000	5,500,000	500,000	91.67		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	12	-	100.00		
	Hasil (outcome) Tersedianya jasa listrik				-			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	390,000,000	335,000,000	55,000,000	85.90		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	12	-	100.00		
	Hasil (outcome) Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				-			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	301,381,300	252,015,750	49,365,550	83.62		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	21	21.00	-	100.00		
	Hasil (outcome) Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional				-			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	55,000,000	55,000,000	-	100.00		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output) Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	3	3.00	-	100.00		
	Hasil (outcome) Tersedianya bangunan gedung kantor dan sekertariat				-			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				-			
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				-			
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				-			
	Masukan (input) Dana yang dibutuhkan	Rp	5,037,355,000	4,844,050,000	193,305,000	96.16		
	Lokasi Kab.Pesawaran				-			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran (output)	Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	unit	11	11.00	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				-			
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	182,857,000	86,432,200	96,424,800	47.27		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah Laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan	11	11	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Terlaksananya Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK				-			
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	1,000,000,000	724,095,000	275,905,000	72.41		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakkan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	1047	1047	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Terlaksananya pergerakan kader IMP yang dibina				-			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					-			
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	450,000,000	422,618,600	27,381,400	93.92		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	2,600.00	2,600.00	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-			
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	150,000,000	140,892,500	9,107,500	93.93		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	11	11	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-			
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					-			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	257,695,000	257,695,000	-	100.00		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	2	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Terlaksananya penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pelayanan KB				-			
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	1,240,650,000	1,230,136,600	10,513,400	99.15		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung	148	148	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Terlaksananya pengelolaan program KKBPK di Kampung KB				-			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					-			
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					-			
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	161,000,000	161,000,000	-	100.00		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	unit	22	22	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Tersedianya pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				-			
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	254,684,200	254,684,200	-	100.00		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	109	109	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Terlaksananya pelatihan kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga				-			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	480,655,800	480,655,800	-	100.00		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	11	11	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Terlaksananya promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				-			
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan	Rp	95,000,000	95,000,000	-	100.00		
	Lokasi	Kab.Pesawaran				-			
	Keluaran (output)	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	laporan	11	11	-	100.00		
	Hasil (outcome)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana)				-			
JUMLAH				14,701,435,096	13,553,848,956	1,147,586,140			

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
2.23.2.24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		14,824,746,450	14,259,533,536	565,212,914	96.19		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		14,521,746,450	14,082,713,536	439,032,914	96.98	100	
2.23.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2,822,768,450	2,780,969,370	41,799,080	98.52		
2.23.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,535,317,150	2,507,325,410	27,991,740	98.90		
2.23.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Masukan Jumlah Dana		2,143,337,150	2,140,595,410	2,741,740	99.87		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan						100	
	Hasil Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan						100	
2.23.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Masukan Jumlah Dana		391,980,000	366,730,000	25,250,000	93.56		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan						100	
	Hasil Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan						100	
2.23.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		38,070,000	30,392,960	7,677,040			
2.23.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Masukan Jumlah Dana		5,630,000	5,552,000	78,000	98.61		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Tercapainya Penyediaan ATK Kantor						100	
	Hasil Terlaksananya Penyediaan ATK Kantor						100	
2.23.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Masukan Jumlah Dana		32,440,000	24,840,960	7,599,040	76.58		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100	
	Hasil Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi urusan perkantoran						100	
2.23.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		75,000,000	75,000,000	-			
2.23.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Masukan Jumlah Dana		75,000,000	75,000,000	-	100.00		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Jumlah sewa gedung kantor						100	
	Hasil Tersedianya gedung kantor						100	
2.23.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6,000,000	6,000,000	0			
2.23.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Masukan Jumlah Dana		6,000,000	6,000,000	-	100.00		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Jumlah Jasa Kantor (Listrik, air) yang terbayar						100	
	Hasil Tercapainya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik						100	

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
2.23.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		168,381,300	162,251,000	6,130,300			
2.23.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Masukan Jumlah Dana		168,381,300	162,251,000	6,130,300	96.36		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Jumlah Pembayaran Pajak kendaraan Operasional Dinas Perpustakaan						100	
	Hasil Tercapainya Pembayaran Pajak kendaraan Operasional Dinas Perpustakaan						100	
2.23.2..	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		11,698,978,000	11,301,744,166	397,233,834			
2.23.2.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,109,998,000	1,050,947,200	59,050,800			
2.23.2.2.01.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							
	Masukan Jumlah Dana		300,000,000	300,000,000	-	100.00		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Jumlah pengembangan layanan perpustakaan elektronik						100	
	Hasil Tercapainya layanan perpustakaan elektronik						100	
2.23.2.2.01.2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Masukan Jumlah Dana		500,000,000	499,386,000	614,000	99.88		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Jumlah pengembangan perpustakaan						100	
	Hasil Tercapainya pengembangan perpustakaan daerah						100	
2.23.2.2.01.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan							
	Masukan Jumlah Dana		70,000,000	34,572,400	35,427,600	49.39		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Jumlah pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah						100	
	Hasil Tercapainya pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah						100	
2.23.2.2.01.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka							
	Masukan Jumlah Dana		239,998,000	216,988,800	23,009,200	90.41		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Jumlah pemeliharaan Bahan pustaka						100	
	Hasil Tercapainya pemeliharaan bahan pustaka						100	
2.23.2.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10,588,980,000	10,250,796,966	338,183,034			
2.23.2.2.02.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat							
	Masukan Jumlah Dana		200,000,000	133,076,766	66,923,234	66.54		
	Lokasi Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran Jumlah pelayanan perpustakaan dan peserta lomba						100	
	Hasil Tercapainya pelayanan perpustakaan dan peserta lomba						100	
2.23.2.2.02.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
	Masukan Jumlah Dana		10,388,980,000	10,117,720,200	271,259,800	97.39		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran	Jumlah pembangunan gedung sarana perpustakaan daerah						100	
	Hasil	Tercapainya pembangunan gedung perpustakaan daerah						100	
2.24...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			303,000,000	176,820,000	126,180,000			
2.24.2..	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			303,000,000	176,820,000	126,180,000			
2.24.2.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			60,000,000	56,900,000	3,100,000			
2.24.2.2.01.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis								
	Masukan	Jumlah Dana		60,000,000	56,900,000	3,100,000	94.83		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran	Jumlah arsip dinamis OPD yang tertara						100	
	Hasil	Tercapainya arsip dinamis OPD yang tertara						100	
2.24.2.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			52,000,000	45,500,000	6,500,000			
2.24.2.2.02.2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis								
	Masukan	Jumlah Dana		52,000,000	45,500,000	6,500,000	87.50		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran	Jumlah OPS penghimpun dan pemeliharaan arsip statis						100	
	Hasil	Tercapainya penghimpun dan pemeliharaan arsip statis						100	
2.24.2.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			191,000,000	74,420,000	116,580,000			
2.24.2.2.03.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN								
	Masukan	Jumlah Dana		31,000,000	29,000,000	2,000,000	93.55		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran	JumlahPengelolaan informasi dan pengembangan website						100	
	Hasil	Terlaksananya Pengelolaan informasi dan pengembangan website						100	
2.24.2.2.03.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota								
	Masukan	Jumlah Dana		160,000,000	45,420,000	114,580,000	28.39		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran	Jumlah Penyusunan Draft Naskah Akademis Kearsipan dan pembinaan kearsipan OPD						100	
	Hasil	Tercapainya Penyusunan Draft Naskah Akademis Kearsipan dan pembinaan kearsipan OPD						100	

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	2,566,000,000	2,565,359,500	640,500	99.98	100.00	99.92
4 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
4 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	57,215,500	57,215,500	-	100.00		
	Lokasi : Kab. Pesawaran							
	Keluaran : Terlaksananya Audiensi Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Peran Serta Masyarakat						4 Laporan	4 Laporan
	Hasil : Jumlah Audiensi Kepala Daerah Dengan Tokoh Masyarakat, Agama, Pimpinan/Anggota Organisasi dan Media						100.00	100.00
4 01 01 2 14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							
4 01 01 2 14 01	Fasilitasi Keprotokolan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	1,174,971,000	1,174,541,000	430,000	99.96		
	Lokasi : Kab. Pesawaran							
	Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan acara dan Upacara Serta Bimbingan Teknis Guna Meningkatkan SDM ASN						4 Laporan	4 Laporan
	Hasil : Jumlah pelayanan Ketatalaksanaan Keprotokolan, pelaksanaan Upacara Rutin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran						100.00	100.00
4 01 01 2 14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	1,002,494,000	1,002,394,000	100,000	99.99		
	Lokasi : Kab. Pesawaran							
	Keluaran : Terlaksananya Agenda Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						4 Laporan	4 Laporan
	Hasil : Jumlah agenda harian kepala/wakil Daerah						100.00	100.00
4 01 01 2 14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	331,319,500	331,209,000	110,500	99.97		
	Lokasi : Kab. Pesawaran							
	Keluaran : Terlaksananya Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan						4 Laporan	4 Laporan
	Hasil : Jumlah peliputan terhadap agenda kegiatan pimpinan						100.00	100.00

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,436,718,772	3,142,436,716	294,282,056	91.44		
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,858,829,272	2,652,488,678	206,340,594	92.78		
	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		2,679,709,272	2,506,370,978	173,338,294	93.53		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran				-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan		2,679,709,272		2,679,709,272			
	Keluaran (output)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	36					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1		1			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		179,120,000	146,117,700	33,002,300	81.58		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang dibutuhkan		179,120,000		179,120,000			
	Keluaran (output)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1		1			
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		76,418,200	301,600	76,116,600	0.39		
	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		76,418,200	301,600	76,116,600	0.39		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		76,418,200		76,418,200			
	Keluaran (output)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1		1			
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		307,800,000	303,230,438	4,569,562	98.52		
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12,200,000	8,930,438	3,269,562	73.20		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		12,200,000		12,200,000			
	Keluaran (output)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1		1			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		295,600,000	294,300,000	1,300,000	99.56		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		295,600,000		295,600,000			
	Keluaran (output)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1		1			
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		193,671,300	186,416,000	7,255,300	96.25		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		193,671,300	186,416,000	7,255,300	96.25		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		193,671,300		193,671,300			
	Keluaran (output)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	3					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		1		1			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,045,486,088	852,779,970	192,706,118	51.45		
	Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		730,486,088	316,220,224	414,265,864	43.29		
	Sub Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi		585,236,088	171,470,224	413,765,864	29.30		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)			585,236,088		585,236,088			
	Keluaran (output)		Laporan	5					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		1		1			
	Sub Kegiatan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung		145,250,000	144,750,000	500,000	99.66		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		145,250,000		145,250,000			
	Keluaran (output)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	3					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		1		1			
	Kegiatan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		315,000,000	149,089,300	165,910,700	47.33		
	Sub Kegiatan	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		315,000,000	149,089,300	165,910,700	47.33		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		315,000,000		315,000,000			
	Keluaran (output)	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	1					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabuoaten/Kota		1		1			
	Kegiatan	Pembangunan Prasarana Pertanian		612,120,000	387,470,446	224,649,554	63.30		
	Sub Kegiatan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		612,120,000	387,470,446	224,649,554	63.30		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		612,120,000		612,120,000			
	Keluaran (output)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	6					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian		1		1			
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			649,945,000	524,838,130	125,106,870	80.75		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Kegiatan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		557,845,000	524,838,130	33,006,870	94.08		
			-			-			
	Sub Kegiatan	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		557,845,000	524,838,130	33,006,870	94.08		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		557,845,000		557,845,000			
	Keluaran (output)	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		1		1			
	Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota		92,100,000		92,100,000	-		
	Sub Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		92,100,000	-		-		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		92,100,000		92,100,000			
	Keluaran (output)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1					
	Hasil (Outcome)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota		1		1			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			115,800,000	67,345,000	115,800,000			
	Kegiatan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	115,800,000		115,800,000	100.00		
	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		115,800,000	67,345,000	48,455,000	58.16		
	Lokasi	Kabupaten Pesawaran	-			-			
	Masukan (input)	Dana yang Dibutuhkan		115,800,000		115,800,000			
	Keluaran (output)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan	4					

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WAY LIMA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	BELANJA DAERAH		1,745,492,175	1,745,412,175	80,000	100.00		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1,294,863,875	1,294,863,875	-	100.00		
	BELANJA PEGAWAI		1,027,266,025	922,037,303	105,228,722	89.76		
	BELANJA LANGSUNG		450,628,300	450,548,300	80,000	99.98		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		1,644,563,775	1,644,483,775	80,000	100.00		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,509,223,875	1,509,223,875	-	100.00		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1,294,863,875	1,294,863,875	-	100.00		
	Lokasi Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		1,294,863,875	1,294,863,875	-	100.00		
	Keluaran (output) Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14 Bulan	#VALUE!			
	Hasil (outcome) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14 Bulan	#VALUE!			
					-			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		214,360,000	214,360,000	-	100.00		
	Lokasi Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		214,360,000	214,360,000	-	100.00		
	Keluaran (output) Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	1 Dokumen	#VALUE!			
	Hasil (outcome) Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	1 Dokumen	#VALUE!			
					-			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2,500,000	2,500,000	-	100.00		
	Lokasi Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input) Jumlah Anggran		2,500,000	2,500,000	-	100.00		
	Keluaran (output) Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	1	1 Dokumen	#VALUE!			
	Hasil (outcome) Trsedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perang	Dokumen	1	1 Dokumen	#VALUE!			
					-			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22,900,000	22,900,000	-	100.00		
	Lokasi Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		22,900,000	22,900,000	-	100.00		
	Keluaran (output) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	12 Paket	#VALUE!			
	Hasil (outcome) Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	12 Paket	#VALUE!			
					-			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7,291,300	7,291,300	-	100.00		
	Lokasi Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input) Jumlah Anggaran		7,291,300	7,291,300	-	100.00		
	Keluaran (output) Jumlah paket peralatan rumah tangga	Paket	12	12 Paket	#VALUE!			
	Hasil (outcome) Tersediannya peralatan rumah tangga	Paket	12	12 Paket	#VALUE!			
					-			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		22,500,000	22,500,000	-	100.00		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi	Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		22,500,000	22,500,000	-	100.00		
	Keluaran (output)	Jumlah paket bahan logistik kantor	Paket	12	12 Paket	#VALUE!			
	Hasil (outcome)	Tersediannya bahan logistik kantor	Paket	12	12 Paket	#VALUE!			
						-			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3,312,100	3,312,100	-	100.00		
	Lokasi	Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		3,312,100	3,312,100	-	100.00		
	Keluaran (output)	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan	Paket	2	2 Paket	#VALUE!			
	Hasil (outcome)	Tersediannya barang cetakan dan pengadaan	Paket	2	2 Paket	#VALUE!			
						-			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3,000,000	3,000,000	-	100.00		
	Lokasi	Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		3,000,000	3,000,000	-	100.00		
	Keluaran (output)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan	Dokumen	2	2 Dokomen	#VALUE!			
	Hasil (outcome)	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	2	2 Dokomen	#VALUE!			
						-			
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15,625,000	15,625,000	-	100.00		
	Lokasi	Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		15,625,000	15,625,000	-	100.00		
	Keluaran (output)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1 Laporan	#VALUE!			
	Hasil (outcome)	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1 Laporan	#VALUE!			
						-			
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8,982,000	8,982,000	-	100.00		
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		8,982,000	8,982,000	-	100.00		
	Lokasi	Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		8,982,000	8,982,000	-	100.00		
	Keluaran (output)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Laporan	12	12 Laporan	#VALUE!			
	Hasil (outcome)	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12 Laporan	#VALUE!			
						-			
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		126,357,900	126,277,900	80,000			
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan		117,870,000	117,790,000	80,000	99.93		
	Lokasi	Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		117,870,000	117,790,000	80,000	99.93		
	Keluaran (output)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2 Unit	#VALUE!			
	Hasil (outcome)	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan	Unit	2	2 Unit	#VALUE!			
						-			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		8,487,900	8,487,900	-	100.00		
	Lokasi	Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		8,487,900	8,487,900	-	100.00		
	Keluaran (output)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1 Unit	#VALUE!			
	Hasil (outcome)	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	1	1 Unit	#VALUE!			
						-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23,800,000	23,800,000	-	100.00		
	Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		16,100,000	16,100,000	-	100.00		
	Lokasi	Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		16,100,000	16,100,000	-	100.00		
	Keluaran (output)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1 Laporan	#VALUE!			
	Hasil (outcome)	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1 Laporan	#VALUE!			
						-			
	Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		7,700,000	7,700,000	-	100.00		
	Lokasi	Kecamatan Way Lima				-			
	Masukan (input)	Jumlah Anggaran		7,700,000	7,700,000	-	100.00		
	Keluaran (output)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1 Dokumen	#VALUE!			
	Hasil (outcome)	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1 Dokumen	#VALUE!			

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GEDONG TATAAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
7.01	KECAMATAN GEDONG TATAAN	Rp	2,004,968,011	1,891,769,405	113,198,606	94.35%	100%	95%
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI	Rp	2,004,968,011	1,891,769,405	113,198,606	94.35%	100%	95%
I.	BELANJA LANGSUNG	Rp	2,004,968,011	1,891,769,405	113,198,606	94.35%		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	1,989,118,011	1,877,219,405	111,898,606	94.37%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	2,846,200	2,846,200	-	100.00%		
	Lokasi : Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan						100%	100%
	Hasil : Terpenuhinya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi						100%	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	1,674,013,811	1,588,029,855	85,983,956	94.86%		
	Lokasi : Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan						100%	100%
	Hasil : Terlaksananya Administrasi Keuangan						100%	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	118,478,000	110,897,800	7,580,200	93.60%		
	Lokasi : Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum						100%	95%
	Hasil : Terlaksananya Administrasi Umum						100%	95%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	57,300,000	40,620,050	16,679,950	70.89%		
	Lokasi : Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	100%
	Hasil : Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	136,480,000	134,825,500	1,654,500	98.79%		
	Lokasi : Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						100%	100%
	Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						100%	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	15,850,000	14,550,000	-	91.80%		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	13,600,000	12,300,000	1,300,000	90.44%		
	Lokasi : Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Terlaksananya Musrenbang kecamatan						100%	95%
	Hasil : Terlaksananya Musrenbang kecamatan						100%	95%
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp	2,250,000	2,250,000	-	100.00%		
	Lokasi : Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						100%	100%
	Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan						100%	100%

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		9,114,010,687	8,914,134,554	199,876,133	97.81		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		8,752,509,687	8,554,959,774	197,549,913	97.74		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,658,069,387	2,471,459,287	186,610,100	92.98		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,467,122,787	2,321,929,287	145,193,500	94.11		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		190,946,600	149,530,000	41,416,600	78.31		
	Administrasi Umum perangkat Daerah		16,035,000	16,035,000	-	100.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4,000,000	4,000,000	-	100.00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12,035,000	12,035,000	-	100.00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,677,960,000	5,674,740,487	3,219,513	99.94		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4,754,960,000	4,751,740,487	3,219,513	99.93		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		923,000,000	923,000,000	-	100.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah		400,445,300	392,725,000	7,720,300	98.07		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		395,981,300	388,261,000	7,720,300	98.05		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4,464,000	4,464,000	-	100.00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		198,659,400	198,597,680	61,720	99.97		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		60,000,000	60,000,000	-	100.00		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		60,000,000	60,000,000	-	100.00		
	Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		138,659,400	138,597,680	61,720	99.96		
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		8,659,400	8,600,000	59,400	99.31		
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		130,000,000	129,997,680	2,320	100.00		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		162,841,600	160,577,100	2,264,500	98.61		
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		152,841,600	150,577,100	2,264,500	98.52		
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		152,841,600	150,577,100	2,264,500	98.52		
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		10,000,000	10,000,000	-	100.00		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		10,000,000	10,000,000	-	100.00		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/		14,654,852,321	14,261,756,041	393,096,280	97.32		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,593,891,021	3,388,459,136	205,431,885	94.28		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Jumlah anggaran		3,460,371,021	3,265,469,136	194,901,885	94.37		
	Keluaran : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	-	100		
	Hasil : Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesawaran	Bulan	12	12	-	100		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Jumlah anggaran		133,520,000	122,990,000	10,530,000	92.11		
	Keluaran : Terbayarnya honorarium Pegawai Tenaga Kontrak dan Penatausahaan Keuangan (PA, P2K, PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran, Bendahara Barang, Pembantu Bendahara dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	orang	18	18	-	100		
	Hasil : Terwujudnya kinerja Pegawai Tenaga Kontrak dan Terlaksananya administrasi penatausahaan keuangan	orang	18	18	-	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		153,765,000	65,985,760	87,779,240	42.91		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Jumlah anggaran		25,548,760	25,548,760	-	100		
	Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor	Item	33	33	-	100		
	Hasil : Terlaksananya administrasi perkantoran	Item	33	33	-	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Jumlah anggaran		19,677,000	19,677,000	-	100		
	Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Item	4	4	-	100		
	Hasil : Terlaksananya administrasi perkantoran	Item	4	4	-	100		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Jumlah anggaran		108,539,240	20,760,000	87,779,240	19.13		
	Keluaran : ikut serta pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	kali	11	11	-	100		
	Hasil : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedinasan	kali	11	11	-	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10,468,435,000	10,391,805,000	76,630,000	99.27		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Jumlah anggaran		22,000,000	18,000,000	4,000,000	81.82		
	Keluaran : Terbayarnya listrik kantor Satpol PP Kabupaten Pesawaran	Bulan	12	12	-	100		
	Hasil : Listrik untuk kantor Satpol PP Kabupaten Pesawaran	Bulan	12	12	-	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Jumlah anggaran		10,446,435,000	10,373,805,000	72,630,000	99.30		
	Keluaran : Terbayarnya honor THLS Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesawaran	Bulan	12	12	-	100		
	Hasil : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesawaran	Bulan	12	12	-	100		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		438,761,300	415,506,145	23,255,155	94.70		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Jumlah anggaran		438,761,300	415,506,145	23,255,155	94.70		
	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	15	15	-	100		
	Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	15	15	-	100		
JUMLAH			14,654,852,321	14,261,756,041	393,096,280	97.32		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	Rp.	732,500,000	732,360,100	139,900	99.98		
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Rp.	732,500,000	732,360,100	139,900	99.98		
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	732,500,000	732,360,100	139,900	99.98		
03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		468,750,000	468,677,100	72,900	99.98		
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Tersedianya tenaga teknis untuk melaksanakan tender dan non tender							
	Hasil : Jumlah Pelaksanaan Tender/Non Tender tepat Waktu, Efisien dan Efektif						167 Paket	167 Paket
03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)		238,750,000	238,683,000	67,000	99.97		
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Tersedianya Layanan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE)							
	Hasil : Tersedianya OPD yang melaksanakan Layanan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE)						34 OPD	34 OPD
03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		25,000,000	25,000,000	-	100.00		
	Masukan : Jumlah Dana							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Tersedianya Aparatur yang Berkualitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa							
	Hasil : Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya untuk pengadaan Barang dan jasa						25 Orang	25 Orang

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,149,594,731	2,975,584,527	174,010,204	94.48		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,742,173,431	2,569,295,605	172,877,826	93.70		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		2,617,663,431	2,444,785,605	172,877,826	93.40		
	Keluaran : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai	Bulan	12	12	-	100		
	Hasil : Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran	Bulan	12	12	-	100		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		124,510,000	124,510,000	-	100		
	Keluaran : Terbayarnya honorarium Pegawai Tenaga Kontrak dan Penatausahaan Keuangan (PA, P2K, PPK, PPTK,	orang	20	20	-	100		
	Bendahara pengeluaran, Bendahara Barang, Staf Bendahara dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa)				-			
	Hasil : Terwujudnya kinerja Pegawai Tenaga Kontrak dan Terlaksananya administrasi penatausahaan keuangan	orang	20	20	-	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		192,940,000	191,920,662	1,019,338	99.47		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		23,940,000	22,920,662	1,019,338	95.74		
	Keluaran : Terbayarnya listrik dinas sosial kabupaten pesawaran	Bulan	12	12	-	100		
	Hasil : Listrik untuk Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran	Bulan	12	12	-	100		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-			
	Lokasi : Gedung Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		169,000,000	169,000,000	-	100		
	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PTK	13	13	-	100		
	Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PTK	13	13	-	100		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		214,481,300	214,368,260	113,040	99.95		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas				-			

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Operasional atau Lapangan				-			
	Lokasi : Gedong Tataan				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		214,481,300	214,368,260	113,040	99.95		
	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	unit	7	7	-	100		
	Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	unit	7	7	-	100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		190,000,000	190,000,000	-	100		
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		190,000,000	190,000,000	-	100		
	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten / kota				-			
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		70,000,000	70,000,000	-	100		
	Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan KapasitasnyaKewenangan Kabupaten/Kota	LKS	5	5	-	100		
	Hasil : Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasismasyarakat(WKBSM)/lembaga kesejahteraan sosial	LKS	5	5	-	100		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan				-			
	Keluarga (LK3)				-			
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		120,000,000	120,000,000	-	100		
	Keluaran : Jumlah karang taruna peserta Bulan Bhakti dan Peserta lomba desa	orang	33	33	-	100		
	Hasil : Kesiapan warga karang taruna peserta Bulan Bhakti dan Peserta lomba desa	orang	33	33	-	100		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				-			
			14,950,000	14,950,000	-	100		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				-			
			14,950,000	14,950,000	-	100		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				-			
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran				-			
	Masukan : Dana yang dibutuhkan		14,950,000	14,950,000	-	100		
	Keluaran : Jumlah TAGANA di Kabupaten Pesawaran	Paket	24	24	-	100		
	Hasil : Penanggulangan bencana alam dan Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Pesawaran	Paket	24	24	-	100		
			3,354,544,731	3,180,534,527	174,010,204	94.81		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	Rp	492,500,000	490,277,280	2,222,720	99.54		
	BELANJA LANGSUNG	Rp	492,500,000	490,277,280	2,222,720	99.54		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp	492,500,000	490,277,280	2,222,720	99.54		
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Rp	492,500,000	490,277,280	2,222,720	99.54		
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp	97,880,000	97,799,400	80,600	99.91		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Masukan : Jumlah Dana							
	Keluaran : Tersusunya Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						5 Dokumen	5 Dokumen
	Hasil : Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						5 Dokumen	5 Dokumen
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		97,145,000	96,857,800	287,200	99.70		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Masukan : Jumlah Dana							
	Keluaran : Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1 Laporan	1 Laporan
	Hasil : Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1 Laporan	1 Laporan
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		25,000,000	24,724,600	275,400	98.89		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Masukan : Jumlah Dana							
	Keluaran : Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						1 Dokumen	1 Dokumen
	Hasil : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						1 Dokumen	1 Dokumen
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		200,000,000	198,721,280	1,278,720	99.36		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Masukan : Jumlah Dana							
	Keluaran : Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1 Dokumen	1 Dokumen
	Hasil : Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1 Dokumen	1 Dokumen
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		72,475,000	72,174,200	300,800	99.58		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Masukan : Jumlah Dana							
	Keluaran : Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil : Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,319,902,641	3,852,560,580				
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,319,902,641	3,852,560,580				
2.12.01.2.02.01	penyedia gaji dan tunjangan ASN							
	Masukan : Jumlah Dana		2,134,051,341	1,943,313,541	190,737,800	91.06%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Gaji PNS						12 bln	12 bln
	Hasil : Terbayarnya gaji PNS						100.00%	100.00%
2.12.01.2.02.03	pelaksanaan dan penatausahaan penguji/verifikasi keuangan SKPD							
10.01.01	Program Pelayanan Administasi Perkantoran		721,851,300	459,714,966	249,427,737	63.69%	100%	89.75%
10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Komunikasi dan Penerangan						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersedianya Jasa Komunikasi dan Penerangan Kantor						100%	100%
10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	105,320,000	93,330,000	11,990,000	88.62%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersedianya Administrasi Keuangan						100%	100%
10.01.01.10	Penyediaan ATK							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	224,156,000	23,769,350	200,386,650	10.60%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Alat tulis kantor						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Terlaksananya Kegiatan Kantor						100%	100%
10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	0.00%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terpenuhiya Barang Cetak dan Penggandaan						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Terlaksananya Kegiatan Kantor						100%	100%
10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Instalasi Knator						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Terlaksananya Kegiatan Kantor						100%	100%
10.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Terlaksananya Alat Kebersiahn Rumah Tangga						100%	100%
10.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersempainya Informasi dan Berita						100%	100%
10.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Bahan Makan dan Minum						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersempainya Rapat Dan Pertemuan						100%	100%
10.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	113,834,000	76,782,913	37,051,087	67.45%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersedianya Data dan Informasi						100%	100%
10:01:02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		278,541,300	265,832,703	12,708,597	95.44%	100%	99.98%
10.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor						23 unit	23 unit
	Hasil : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor						100%	100%
10.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor						17 unit	17 unit
	Hasil : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor						100%	100%
10.01.02.10	Pengadaan Meubelair							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Kantor						35 unit	35 unit
	Hasil : Tersedianya Meubiliar Kantor						100%	100%
10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	278,541,300	265,832,703	12,708,597	95.44%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terpenuhiya Pemeliharaan Kendaraan Dinas						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersedianya Meubiliar Kantor						100%	100%
10.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor			-				
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terpenuhiya Kegiatan Pemeliharaan Kantor						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersedianya Meubiliar Kantor						100%	100%
10:01:03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	-	#DIV/0!	100%	100%
10.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terpenuhiya Pakaian Olahraga						222 stel	222stel
	Hasil : Tersedianya Pakaian Olahraga						100%	100%
10:01:05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	#DIV/0!	100%	41.67%
10.01.05.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terlaksananya Pelatihan khusus						5 org	5 org
	Hasil : Meningkatnya Kemampuan Sumberdaya Aparatur						100%	41.67%
10:01:06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan		-	-	-	#DIV/0!	100%	100.00%

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
10.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terpenuhinya Laporan Kinerja SKPD						4 lap	4 lap
	Hasil : Tersedianya Laopran RENJA, LPPD, LAKIP, LKPJ dan RENSTRA						100%	100%
10.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terpenuhinya Informasi Keuangan SKPD						2 lap	2 lap
	Hasil : Tersedianya Administrasi Keuangan SKPD						100%	100%
10:01:15	Penataan Administrasi Kependudukan		500,000,000	498,314,350	1,685,659	99.66%	100%	100.00%
10.01.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Data Penduduk yang Akurat						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersedianya Informasi Kependudukan						100%	100%
10.01.15.14	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat						100%	100%
10.01.15.15	Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	9	-	9	0.00%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan						770 org	770 org
	Hasil : Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat Akan Peraturan perundang-undangan Administrasi Kependudukan						100%	100%
10.01.15.16	Pembinaan Peningkatan Pelayanan capil							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	125,000,000	124,619,750	380,250	99.70%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Data Penduduk yang Akurat						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersedianya Informasi Kependudukan						100%	100%
10.01.15.19	Promosi dan Informasi Kependudukan							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	-	-	-	#DIV/0!		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya informasi Kependudukan						1 kali	1 kali
	Hasil : Tersedianya Informasi Kependudukan						100%	100%
10.01.15.20	Kegiatan peningkatan Pelayanan Akta Pengakuan, Pengesahan Anak							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	225,000,000	224,112,500	887,500	99.61%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Pengesahan dan Pengangkatan Anak						12 Bln	12 Bln
	Hasil : Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat						100%	100%
10.01.15.21	Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Pesawaran							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	150,000,000	149,582,100	417,900	99.72%		
	Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	Keluaran : Tersedianya Informasi Kependudukan						50 buku	50 buku
	Hasil : Tersedianya Data Kependudukan						100%	100%
	JUMLAH		4,319,902,641	3,852,560,580	467,342,061	89.18%	100%	0.00%

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	Rp.	292,500,000	289,491,653	3,008,347	98.97		
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Rp.	292,500,000	289,491,653	3,008,347	98.97		
	BELANJA LANGSUNG	Rp.	292,500,000	289,491,653	3,008,347	98.97		
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	292,500,000	289,491,653	3,008,347	98.97		
4 01 03 2 02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		76,540,000	76,406,000	134,000	99.82		
	Masukan : Jumlah Anggaran							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Tersusunnya Pedoman Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Biaya (SHSB)							
	Hasil : 1. Jumlah Pedoman Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB)						1 Buku	1 Buku
	2. Jumlah Pedoman Standar Harga Satuan Biaya (SHSB)						1 Buku	1 Buku
4 01 03 2 02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		161,256,000	158,671,653	2,584,347	98.40		
	Masukan : Jumlah Anggaran							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : 1. Tersediannya Laporan Realisasi Capaian Keuangan dan Kinerja							
	2. Terselenggaranya Pekan Raya Lampung							
	Hasil : 1. Jumlah Laporan Realisasi Capaian Keuangan dan Kinerja						12 Laporan	12 Laporan
	2. Tereksposnya hasil produk-produk unggulan Kabupaten Pesawaran						1 Kegiatan	1 Kegiatan
4 01 03 2 02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		54,704,000	54,414,000	290,000	99.47		
	Masukan : Jumlah Anggaran							
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : 1. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Sekretariat							
	2. Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan							
	3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan							
	Hasil : 1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Sekretariat						3 Dokumen	3 Dokumen
	2. Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan						4 Laporan	4 Laporan

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan						100%	100%

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PESAWARAN	Rp.	4,351,593,626	4,181,311,001	170,282,625	96.09	100.00	96.09
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rp.	4,351,593,626	4,181,311,001	170,282,625	96.09	100.00	96.09
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3,021,593,626	2,862,294,801	159,298,825	94.73	100.00	94.73
2.09.01.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2,636,593,626	2,479,623,951	156,969,675	94.05	100.00	94.05
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,501,593,626	2,360,863,951	140,729,675	94.37	100.00	94.37
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		135,000,000	118,760,000	16,240,000	87.97	100.00	87.97
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		205,000,000	204,902,220	97,780	99.95	100.00	99.95
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		10,000,000	9,902,220	97,780	99.02	100.00	99.02
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		195,000,000	195,000,000	-	100.00	100.00	100.00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		180,000,000	177,768,630	2,231,370	98.76	100.00	98.76
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		180,000,000	177,768,630	2,231,370	98.76	100.00	98.76
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		405,000,000	394,090,800	10,909,200	97.31	100.00	97.31
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		200,000,000	191,090,800	8,909,200	95.55	100.00	95.55
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		200,000,000	191,090,800	8,909,200	95.55	100.00	95.55
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		205,000,000	203,000,000	2,000,000	99.02	100.00	99.02
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi		205,000,000	203,000,000	2,000,000	99.02	100.00	99.02
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		925,000,000	924,925,400	74,600	99.99	100.00	99.99
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan VKewenangan Kabupaten/Kota		925,000,000	924,925,400	74,600	99.99	100.00	99.99
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		925,000,000	924,925,400	74,600	99.99	100.00	99.99

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN KERJASAMA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	BAGIAN KERJASAMA	Rp.	192,500,000	188,910,000	-	98.14	100.00	98.14
	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKAYAT	Rp.	192,500,000	188,910,000	-	98.14	100.00	98.14
4 01 4 01 01 22	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	192,500,000	188,910,000	-	98.14	100.00	98.14
4 01 4 01 01 22 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	34,000,000	32,990,000	1,010,000	97.03		
	Lokasi : Pesawaran							
	Keluaran : Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan potensi daerah melalui kerjasama daerah						1 tahun	1 tahun
	Hasil : Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan potensi daerah melalui kerjasama daerah dengan baik						100.00	97.03
4 01 4 01 01 22 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	92,000,000	90,430,000	1,570,000	98.29		
	Lokasi : Pesawaran							
	Keluaran : Tercapainya Kerja Sama daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Daerah lain/Pihak Ketiga/ Lembaga Lainnya						6kl / 30 dok	6kl / 30 dok
	Hasil : Tercapainya Kerja Sama daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Daerah lain/Pihak Ketiga/ Lembaga Lainnya secara Baik						100.00	98.29
4 01 4 01 01 22 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	66,500,000	65,490,000	1,010,000	98.48		
	Lokasi : Pesawraan							
	Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri						12 dok	12 dok
	Hasil : Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri secara baik						100.00	98.48

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
2.10.2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp.	12,492,981,661	11,603,411,944	889,569,717	93	100	100
2.10	URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp.	12,492,981,661	11,603,411,944	889,569,717	93	100	100
I	BELANJA LANGSUNG	Rp.	12,492,981,661	11,603,411,944	889,569,717	93		
2 16 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/ Kota	Rp.	3,736,519,911	3,475,714,189	260,805,722	93		
2 16 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	3,736,519,911	3,475,714,189	260,805,722	93		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Penyediaan Administrasi Gaji dan Tunjangan Tugas ASN						1 Laporan	1 Laporan
	Hasil : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Berjalan Lancar						100	100
2 16 1 2 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	764,629,000	693,255,128	71,373,872	91		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya sarana ATK, Cetak Penggandaan, Rapat Koordinasi Konsultasi dan Sitem Pemerintah Berbasis Elektrinik pada SKPD						4 Laporan	4 Laporan
	Hasil : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan Lancar						100	100
2 16 1 2 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	37,500,000	33,104,954	4,395,046	88		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Anggaran Listrik Dinas/ OPD						1 Unit	1 Unit
	Hasil : Terbayarnya Listrik Dinas Kominfo						100	100
2 16 1 2 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	196,032,300	187,224,530	8,807,770	96		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional						4 Unit	4 Unit
	Hasil : Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100	100
2 16 2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	5,188,398,350	4,801,638,691	386,759,659	93		
2 16 2 2 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	5,188,398,350	4,801,638,691	386,759,659	93		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						2 item	2 item
	Hasil : Tertatanya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						100	100
2 16 3	Program Aplikasi Informatika	Rp.	2,410,926,100	2,331,063,952	89,362,148	97		
2 16 3 2 1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	2,175,612,100	2,130,400,825	45,211,275	98.00		
	Lokasi : Kabupaten Pesawaran							
	Keluaran : Tersedianya Sub Domain dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah						1 item	1 item
	Hasil : Meningkatnya Layanan Domain dan Jaringan Intra di Pemerintah Daerah						100	100
2 16 3 2 2	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	235,314,000	191,163,127	44,150,873	85.00		
	Lokasi : Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersedianya Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi, Government Chief Information Officer (GCIO) dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)						3 item	3 item
	Hasil : Meningkatkan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						100	100
2 20 2	Program Penyelenggara Statistik Setoral	Rp.	143,000,000	67,449,500	75,550,500	47		
2 20 2 2 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	143,000,000	67,449,500	75,550,500	47		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Tersusunnya laporan pencapaian dan kinerja SKPD						3 Laporan	3 Laporan
	Hasil : Terselenggaranya sistem laporan capaian kinerja yang akuntabel						100	100
2 21 2	Program Penyelenggra Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	15,976,000	13,961,000	2,015,000	87.00		
2 21 2 2 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota							
	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	15,976,000	13,961,000	2,015,000	87.00		
	Lokasi : Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan							
	Keluaran : Terlaksananya Penyelenggra Persandian untuk Pengamanan Informasi						1 Laporan	1 Laporan
	Hasil : Tersedianya Keamanan informasi Kab/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						100	100

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan		4,124,523,556	3,885,414,955	239,108,601	94.20		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,293,092,256	3,074,079,761	219,012,495	93.35		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		3,092,892,256	2,895,099,761	197,792,495	93.60		
	Keluaran : Tersedianya layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12		100.00		
	Hasil: Jumlah layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12		100.00		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		200,200,000	178,980,000	21,220,000	89.40		
	Keluaran: Terlaksananya penatusahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	12		100.00		
	Hasil: Jumlah penatusahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	12		100.00		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7,500,000	7,500,000		100.00		
	Pemulangan Pegawai yang pensiun							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		7,500,000	7,500,000		100.00		
	Keluaran : Terlaksananya pemulang Pegawai yang Pensiun	orang	230	230		100.00		
	Hasil: Jumlah pegawai yang pensiun		100%	100%		100.00		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		130,230,000	121,115,654	9,114,346	93.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Masukan: Jumlah Dana		27,220,400	27,220,400		100.00		
	Keluaran: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12		100.00		
	Hasil: Jumlah layanan peralatan dan perlengkapan kantor		100%	100%		100.00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		3,010,000	3,010,000		100.00		
	Keluaran: Tersedianya peralatan rumah tangga	Bulan	12	12		100.00		
	Hasil: Jumlah layanan peralatan rumah tangga		100%	100%		100.00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		15,000,000	15,000,000		100.00		
	Keluaran: Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	bulan	12	12		100.00		
	Hasil: Jumlah layanan makanan dan minuman		100%	100%		100.00		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		4,997,600	4,997,600		100.00		
	Keluaran: Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan	12	12		100.00		
	Hasil: Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan		100%	100%		100.00		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		20,000,000	20,000,000		100.00		
	Keluaran: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12		100.00		
	Hasil: Jumlah layanan Bahan Bacaan		100%	100%		100.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		60,002,000	50,887,654	9,114,346	84.81		
	Keluaran: Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	kali	24	22	2	91.67		
	Hasil: Jumlah koordinasi dan konsultasi		100%	91,67%	#VALUE!	91.67		
	Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah		508,000,000	499,209,360	8,790,640	98.27		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		66,000,000	58,209,360	7,790,640	88.20		
	Keluaran: Terpenuhinya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12		100		
	Hasil: Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	100%		100		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		442,000,000	441,000,000	1,000,000	99.77		
	Keluaran: Terpenuhi nya layanan umum kantor	bulan	12	12		100		
	Hasil: Jumlah layanan umum kantor		100%	100%		100		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		185,701,300	183,510,180	2,191,120	99		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		185,701,300	183,510,180	2,191,120	98.82		
	Keluaran: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin dan berkala	unit	4	4		100		
	Hasil: Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100%	100%		100		
	Program Kepegawaian Daerah		1,147,943,000	872,315,568	275,627,432	100		
	Kegiatan Pengadaan, pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN		162,375,000	128,630,261	33,744,739	100		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		147,375,000	119,632,000	27,743,000	81.18		
	Keluaran: Terselenggaranya seleksi CPNS dan PPPK	dok	1	1		100.00		
	Hasil: Jumlah PNS dan PPPK yang diterima		100%	100%		100.00		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		15,000,000	8,998,261	6,001,739	60.0		
	Keluaran: Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang akurat	bulan	12	12		100.00		
	Hasil: Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian		100%	100%		100.00		
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		485,600,000	352,663,000	132,937,000	72.62		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		5,000,000	5,000,000		100.00		
	Keluaran: Terlaksananya Administrasi kenaikan pangkat	SK	500	500		100.00		
	Hasil: Jumlah Periode Kenaikan Pangkat ASN		100%	100%		100.00		
	Pengelolaan Promosi ASN							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		480,600,000	347,663,000	132,937,000	72.34		
	Keluaran: Terlaksananya Pelantikan ASN, Seleksi Terbuka JPTP, Serta Assesment Jabatan Administrasi	keg	3	2	1	66.7		
	Hasil: Jumlah Kegiatan Pelantikan, seleksi Terbuka JPTP, Dan Assesmenst Jabatan Administrasi		100%	67%		66.7		
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		17,000,000	17,000,000		100.00		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		12,000,000	12,000,000		100.00		
	Keluaran: Terlaksananya seleksi Izin Belajar bagi ASN yang melaksanakan Pendidikan Lanjutan	SK	55	52	3	94.5		
	Hasil: Jumlah SK Izin Belajar yang diterbitkan		100%	94.5%		94.5		
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		5,000,000	5,000,000		100.00		
	Keluaran: Terlaksananya Pelayanan ASN dalam Jabatan Fungsional	SK	700	700		100.00		

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil: Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan		100%	100%		100.00		
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		482,968,000	374,022,307	108,945,693	77.44		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		475,468,000	366,522,307	108,945,693	77.09		
	Keluaran: Terukurnya kinerja ASN kab.pesawaran	orang	3949	3949		100.00		
	Hasil: Jumlah Laporan Sasaran Kinerja Pegawai melalui E-Lapkin		100%	100%		100.00		
	Pembinaan Disiplin ASN							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		7,500,000	7,500,000		100.00		
	Keluaran: Terlaksananya Pelaporan LHKPN	orang	84	84		100.00		
	Hasil: Jumlah Wajib Lapor LHKPN		100%	100%		100.00		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		53,000,000	46,920,000	6,080,000	88.53		
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan Tenaga Pengembang kompetensi, pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		53,000,000	46,920,000	6,080,000	88.53		
	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional							
	Lokasi: BKPSDM Pesawaran							
	Masukan: Jumlah Dana		53,000,000	46,920,000	6,080,000	88.53		
	Keluaran: Terlaksannanya Diklat prajabatan	orang	4	4		100.00		
	Hasil: Jumlah CASN yang mengikuti Diklat Prajabatan		100%	100%		100.00		

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WAY KHILAU

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN	Rp.	1,541,980,325	1,441,043,434	100,936,891	93.45	100.00	93.45
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN WAY KHILAU	Rp.	1,541,980,325	1,441,043,434	100,936,891	93.45	100.00	93.45
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	1,517,732,525	1,421,587,834	96,144,691	93.67	100.00	93.67
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	1,451,900	1,451,900	-	100.00	100.00	100.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	1,451,900	1,451,900	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Kantor KecamatanWay Khilau	Dokumen	7	7	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Kantor KecamatanWay Khilau	Dokumen	7	7	-		100.00	100.00
7.01.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp.	1,108,788,765	1,046,177,249	62,611,516	94.35	100.00	94.35
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	1,059,688,765	997,077,249	62,611,516	94.09	100.00	94.09
	Keluaran (Output) : Jumlah pegawai ASN pada Kantor KecamatanWay Khilau	Pegawai ASN	10	10	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai ASN	10	10	-		100.00	100.00
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	49,100,000	49,100,000	-	100.00	100.00	100.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	Rp.	49,100,000	49,100,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah pegawai dalam Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas pegawai ASN	stell	10	10	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) PrOsentase terlaksananya administrasi perkantoran	pegawai ASN	10	10	-		100.00	100.00
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	62,768,860	27,691,860	35,077,000	44.12	100.00	44.12
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	7,272,400	3,489,800	3,782,600	47.99	100.00	47.99
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp.	7,272,400	3,489,800	3,782,600	47.99	100.00	47.99
	Keluaran (Output) : Jumlah Alat Tulis Kantor pada kantor Kec, Way Khilau	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : terpenuhinya Alat Tulis Kantor pada kantor Kec, Way Khilau	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	Rp.	10,246,360	4,526,560	5,719,800	44.18	100.00	44.18
	Keluaran (Output) : Jumlah Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	item	19	10	9		100.00	44.18

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
				PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2		3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (Outcome) :	Terpenuhinya Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	item	19	10	9		100.00	44.18
5.1.02.01.01.003 1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik		Rp.	6,867,000	1,870,000	4,997,000	27.23	100.00	27.23
	Keluaran (Output) :	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan Instalasi Listrik	Item	19	5	14		100.00	27.23
	Hasil (Outcome)	Terpenuhinya Penyediaan penyediaan peralatan dan perlengkapan Instalasi Listrik	Item	19	5	14		100.00	27.23
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.	11,000,000	7,015,000	3,985,000	63.77	100.00	63.77
5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp.	11,000,000	7,015,000	3,985,000	63.77	100.00	63.77
	Keluaran (Output) :	Jumlah makanan dan minuman	Kotak	200	127	73		100.00	63.77
	Hasil (Outcome) :	Terpenuhinya makan dan minuman	Kotak	200	127	73		100.00	63.77
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.	8,008,000	2,540,500	5,467,500	31.72	100.00	31.72
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		Rp.	5,000,000	1,000,000	4,000,000	20.00	100.00	20.00
	Keluaran (Output) :	Jumlah Barang Cetak	meter	100	20	80		100.00	20.00
	Hasil (Outcome) :	Terpenuhinya Barang Cetak	meter	100	20	80		100.00	20.00
5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		Rp.	3,008,000	1,540,500	1,467,500	51.21	100.00	51.21
	Keluaran (Output) :	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Lembar	15,040	7,703	7,337		100.00	51.22
	Hasil (Outcome) :	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Lembar	15,040	7,703	7,337		100.00	51.22
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp.	6,000,000	6,000,000	-	100.00	100.00	100.00
5.1.02.02.01.006 2	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		Rp.	6,000,000	6,000,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) :	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	eksemplar	120	120	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) :	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	eksemplar	120	120	-		100.00	100.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.	13,375,000	12,250,000	1,125,000	91.59	100.00	91.59
5.1.02.02.12.000 3	Belanja Bimbingan Teknis		Rp.	10,000,000	10,000,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) :	Jumlah Penyelenggaraan Bimtek SIPD	kegiatan	1	1	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) :	Jumlah Penyelenggaraan Bimtek SIPD	kegiatan	1	1	-		100.00	100.00
5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp.	3,375,000	2,250,000	1,125,000	66.67	100.00	66.67
	Keluaran (Output) :	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	oh	35	23	12		100.00	65.71
	Hasil (Outcome) :	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	oh	35	23	12		100.00	65.71
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Rp.	165,600,000	163,697,400	1,902,600	98.85	100.00	98.85
7.01.01.2.08.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		Rp.	2,400,000	1,345,000	1,055,000	56.04	100.00	56.04
	Keluaran (Output) :	Jumlah Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	laporan	48	27	21		100.00	56.25
	Hasil (Outcome) :	Terpenuhinya Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	laporan	48	27	21		100.00	56.25

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	7,200,000	6,352,400	847,600	88.23	100.00	88.23
	Keluaran (Output) : Jumlah Jasa Tagihan Listrik dan internet	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Jasa Tagihan Listrik dan Internet	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	156,000,000	156,000,000	-	100.00	100.00	100.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kontrak (9 orang) dan Tenaga Kebersihan, Sopir, Penjaga Gedung		153,000,000	153,000,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (9 orang) dan Tenaga Kebersihan, Sopir, Penjaga Gedung	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Jasa Tenaga Kontrak (9 orang) dan Tenaga Kebersihan, Sopir, Penjaga Gedung	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer OPD		3,000,000	3,000,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Jasa Tenaga Operator Komputer OPD	orang	6	6	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Jasa Tenaga Operator Komputer OPD	orang	6	6	-		100.00	100.00
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	29,453,000	29,453,000	-	100.00	100.00	100.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Mebel	Rp.	3,336,000	3,336,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Pengadaan Mebel	unit	2	2	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Pengadaan Mebel	unit	2	2	-		100.00	100.00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	26,117,000	26,117,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	4	4	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	4	4	-		100.00	100.00
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.	140,670,000	134,116,425	6,553,575	95.34	100.00	95.34
7.01.01.2.09.02	Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Rp.	123,070,000	117,208,225	5,861,775	95.24	100.00	95.24
	Keluaran (Output) : Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Randis Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Randis Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	-		100.00	100.00
7.01.01.2.09.06	PEMELIHARAN PERALATAN MESIN LAINYA	Rp.	8,000,000	7,308,200	691,800	91.35	100.00	91.35
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Rp.	8,000,000	7,308,200	691,800	91.35	100.00	91.35
	Keluaran (Output) : Jumlah jasa Pemeliharaan PC dan Printer	unit	6	5	1		100.00	83.33
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Pemeliharaan PC dan Printer	unit	6	5	1		100.00	83.33
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	9,600,000	9,600,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	paket	1	1	-		100.00	100.00

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	paket	1	1	-		100.00	100.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	24,247,800	19,455,600	4,792,200	80.24	100.00	80.24
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.	8,825,000	8,825,000	-	100.00	100.00	100.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Desa	Rp.	8,825,000	8,825,000	-	100.00	100.00	100.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	1,950,000	1,950,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Alat Tulis Kantor musrenbangcam	item	20	20	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor musrenbangcam	item	20	20	-		100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.	250,000	250,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Bahan Cetak Kegiatan musrenbangcam	meter	5	5	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Bahan Cetak Kegiatan musrenbangcam	meter	5	5	-		100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman rapat	Rp.	4,500,000	4,500,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Makanan dan Minuman rapat musrenbangcam	Kotak	100	100	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Makanan dan Minuman rapat musrenbangcam	Kotak	100	100	-		100.00	100.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber, moderator pembawa acara dan panitia	Rp.	1,000,000	1,000,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Narasumber, moderator pembawa acara dan panitia musrenbangcam	orang	4	4	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Honor Narasumber, moderator pembawa acara dan panitia	orang	4	4	-		100.00	100.00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Rp.	1,125,000	1,125,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Alat Tulis Kantor musrenbangcam	item	20	20	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor musrenbangcam	item	20	20	-		100.00	100.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp.	11,500,000	6,765,000	4,735,000	58.83	100.00	58.83
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp.	6,000,000	1,400,000	4,600,000	23.33	100.00	23.33
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	1,415,300	1,400,000	15,300	98.92	100.00	98.92
	Keluaran (Output) : Jumlah Alat tulis kantor Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	item	10	9	1	90.00	100.00	90.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Alat tulis kantor Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	item	10	9	1	90.00	100.00	90.00

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.	1,434,700		1,434,700	-	100.00	-
	Keluaran (Output) : Jumlah Bahan Cetak Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Lembar	7,174		7,174	-	100.00	-
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Bahan Cetak Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Lembar	7,174		7,174	-	100.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	3,150,000	-	3,150,000	-	100.00	-
	Keluaran (Output) : Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	Kotak	58	-	58	-	100.00	-
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Kotak	58	-	58	-	100.00	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp.	5,500,000	5,365,000	135,000	97.55	100.00	97.55
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	1,724,500	1,589,500	135,000	92.17	100.00	92.17
5.1.02.01.01.0024	Keluaran (Output) : Jumlah Alat tulis kantor Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	item	10	10	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Alat tulis kantor Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	item	10	10	-		100.00	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.	1,885,500	1,885,500	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Bahan Cetak Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	lembar	9,428	9,428	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Bahan Cetak Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	lembar	9,428	9,428	-		100.00	100.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	1,890,000	1,890,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	Kotak	35	35	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	Kotak	35	35	-		100.00	100.00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp.	3,922,800	3,865,600	57,200	98.54	100.00	98.54
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.	3,922,800	3,865,600	57,200	98.54	100.00	98.54
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	908,000	908,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Alat tulis kantor Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	item	20	20	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Alat tulis kantor Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	item	20	20	-		100.00	100.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kertas dan Cover	Rp.	514,800	457,600	57,200	88.89	100.00	88.89
	Keluaran (Output) : Jumlah Bahan Cetak Amplop Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kotak	9	8	1		100.00	88.89
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Bahan Cetak Amplop Kegiatan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kotak	9	8	1		100.00	88.89
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.	2,500,000	2,500,000	-	100.00	100.00	100.00
	Keluaran (Output) : Jumlah Bahan Cetak Banner	Meter	50	50	-		100.00	100.00
	Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Bahan Cetak banner	Kotak	50	50	-		100.00	100.00

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REK	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN			KINERJA KEUANGAN (%)	TARGET KINERJA (KELUARAN & HASIL)	
			PAGU	REALISASI	SISA	REALISASI (%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4a	4b	4c	5	6a	6b
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				-			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		11,830,300,000	9,822,257,895	2,008,042,105	83.02%		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				-			
	Lokasi : Kab. Pesawaran				-			
	Masukan : Jumlah Anggaran		11,191,116,000	9,189,847,695	2,001,268,305	82.12%		
	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam, Kunjungan Silaturahmi Ramadhan, Khatam Qur'an, Pengajian Akbar, Istighozah, Pembinaan Qori-Qori'ah, Pengiriman MTQ Provinsi, Pembinaan Himpunan Majelis Taklim, Festival Rebana, Hari Santri dan Pemberian Hibah.				-			
	Hasil :				-			
	1. Peringatan Hari Besar Islam	Kegiatan	5	5	-	100.00%		
	2. Kunjungan Silaturahmi Ramadhan (Safari Ramadhan)	Kali	12	12	-	100.00%		
	3. Pembinaan Qori-Qori'ah	Kegiatan	1	1	-	100.00%		
	4. Pelepasan dan Penyambutan Jemaah Haji Kab Pesawaran	Kegiatan	2	2	-	100.00%		
	5. Pengajian Akbar	Kegiatan	1	1	-	100.00%		
	6. Istighozah, Sholawat dan Do'a Lintas Agama	Kegiatan	3	3	-	100.00%		
	7. Peringatan Hari Santri Nasional	Kegiatan	1	1	-	100.00%		
	8. Pengiriman MTQ Provinsi	Kegiatan	1	1	-	100.00%		
	9. Pemberian Hibah	Tahun	1	1	-	58.00%		
					-			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				-			
	Lokasi : Kab. Pesawaran				-			
	Masukan : Jumlah Anggaran		175,031,000	175,031,000	-	100.00%		
	Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Operasional Hibah dan Pemberian Hibah kepada INSTIDLA				-			
	Hasil :				-			
	1. Operasional Hibah	Kegiatan	1	1	-	100.00%		
	2. Pemberian Hibah kepada Instidla	Tahun	1	1	-	100.00%		
	3. Pembinaan Himpunan Majelis Taklim	Kali	8	8	-	100.00%		
	1. Festival Rebana Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	-	100.00%		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				-			
	Lokasi : Kab. Pesawaran				-			
	Masukan : Jumlah Anggaran		464,153,000	457,379,200	6,773,800	98.54%		
	Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Kedaerahan				-			
	Hasil :				-			
	1. Peringatan Hari Besar Nasional	Kegiatan	6	6	-	99.00%		
	1. Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Kegiatan	1	1	-	100.00%		